

**RANCANGAN
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI SUMATERA UTARA**

TAHUN 2005 - 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Sejarah Ringkas Pembentukan Daerah

Berdasarkan latar belakang sejarah pembentukannya, Provinsi Sumatera Utara terbentuk melalui Undang-undang No. 10 Tahun 1948 tanggal 15 April 1948. Undang-undang tersebut membagi Pemerintahan Sumatera (Gouvernement van Sumatera yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda) menjadi tiga Provinsi yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah dan Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara meliputi tiga keresidenan yaitu Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur dan Keresidenan Tapanuli.

Pada tahap selanjutnya, sesuai dengan perkembangan politik dan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Undang-undang No. 24 Tahun 1956, yang dikenal sebagai undang-undang pembentukan daerah otonom Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dimekarkan menjadi dua Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara dan Daerah Otonom Provinsi Aceh.

Berdasarkan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1956, kemudian disusul berturut-turut oleh Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1956, Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1956 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 Tahun 1964, Provinsi Sumatera Utara ditetapkan terdiri dari 17 Daerah Tingkat II yaitu 11 kabupaten dan 6 kotamadya. Berdasarkan undang-undang diatas, wilayah Sumatera Utara memiliki luas areal 71.680 km².

Dengan bergulirnya reformasi politik sebagai dampak dari krisis moneter yang muncul pada pertengahan tahun 1997, tuntutan terhadap pemekaran kabupaten di lingkungan Provinsi Sumatera Utara demikian marak sebagaimana juga halnya dengan Provinsi-Provinsi lain di Indonesia, Tuntutan-tuntutan pemekaran yang dilakukan masyarakat ternyata membuahkan pemekaran yang relatif pesat. Sampai dengan saat ini, proses pemekaran wilayah kabupaten telah membuahkan peningkatan jumlah kabupaten dan kota menjadi 25 buah yang terdiri dari 18 kabupaten dan 7 kota. Undang-undang No. 12 Tahun 1998 menetapkan pembentukan Kabupaten Mandailing Natal sebagai hasil pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Toba Samosir sebagai hasil pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara. Selanjutnya Undang-undang No. 4 Tahun 2001

menetapkan Pemerintah Kota Padang Sidempuan sebagai hasil pemekaran lebih lanjut Kabupaten Tapanuli Selatan.

Undang-undang No. 4 Tahun 2001 menetapkan pembentukan 3 kabupaten baru yaitu Kabupaten Nias Selatan sebagai hasil pemekaran Kabupaten Nias, Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai hasil pemekaran lebih lanjut Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Pakpak Bharat sebagai hasil pemekatan Kabupaten Dairi. Kemudian Undang-undang No. 36 Tahun 2003 menetapkan pembentukan Kabupaten Serdang Bedagei sebagai hasil pemekaran Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Samosir sebagai hasil pemekaran Kabupaten Toba Samosir. Dengan demikian dalam periode 1998-2003 telah bertambah 7 kabupaten baru dan 1 kota baru sehingga Provinsi Sumatera Utara telah memiliki 18 kabupaten dan 7 kota yang masing-masing memiliki pemerintahan yang otonom. Seperti halnya kabupaten, beberapa kecamatan juga mengalami pemekaran selama periode diatas sehingga jumlah kecamatan di seluruh wilayah Sumatera Utara 1meningkat menjadi 361 kecamatan dengan 5.626 desa/ kelurahan.

Wacana tentang pemekaran lebih lanjut wilayah Provinsi Sumatera Utara baik pemekaran pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten / kota pada saat ini masih cukup hangat. Walaupun peluang bahwa wacana tersebut menjadi kenyataan tetap ada, karena sifatnya pada saat ini masih berupa wacana, maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 ini akan menjadi sangat sulit apabila faktor-faktor pemekaran lanjutan tersebut turut dianalisis secara mendalam. Oleh karena itu, keterlibatan kabupaten / kota hasil pemekaran berikutnya jika menjadi kenyataan perlu dicakup dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM).

1.1.2 Perubahan Konsep Rencana Pembangunan Daerah

Setelah tuntutan pemekaran semakin marak dan hampir seluruhnya terwujud, maka pertanyaan kemudian bermunculan sehubungan dengan fakta-fakta yang di temui dilapangan bahwa peningkatan kesejahteraan rakyat yang selalu di klaim sebagai alasan mendesak pentingnya dilakukan pemekaran ternyata belum juga terwujud. Salah satu jawaban yang mungkin dapat diberikan mengapa perbaikan kesejahteraan yang dimaksud belum terwujud adalah masih lemahnya rencana pembangunan dan implementasinya dan juga mungkin pula karena ditemuinya kesulitan besar dalam menggali potensi daerah yang dijadikan salah satu pokok pembenaran pemekaran tersebut.

Dalam periode puncak krisis ekonomi, konsep pembangunan yang dibakukan sebelumnya yaitu Repelita yang berjangka waktu 5 tahun diganti dengan Pokok-pokok Reformasi (hanya untuk jangka waktu sangat pendek) kemudian diganti lagi dengan Propeda yang

dilengkapi dengan Renstra sampai akhir tahun 2005. Pada tahun 2006, konsep perencanaan pembangunan tersebut diganti lagi dengan RPJP-D (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) yang berjangkauan waktu 20 tahun kedepan. RPJP-D ini kemudian diterjemahkan kedalam RPJM-D (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang berjangkauan waktu 5 tahun.

Buku ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sumatera Utara untuk periode 2005-2025 yang sepenuhnya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui UU No. 17 Tahun 2007, dengan tetap memperhatikan potensi, masalah dan kendala spesifik daerah Sumatera Utara serta keberadaan undang-undang dan peraturan daerah yang relevan.

1.1.3 Pengertian RPJP Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat RPJP-D adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah (Provinsi) untuk periode 20 tahun kedepan. Dokumen ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) untuk setiap jangka waktu 5 tahun. Dokumen RPJP Daerah ini bersifat makro memuat visi, misi, tujuan dan arah pembangunan daerah yang disusun melalui pendekatan partisipatif yaitu melibatkan seluruh unsur stakeholder.

1.1.4 Proses Penyusunan RPJP-D

Proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Sumatera Utara dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008. Menurut peraturan tersebut, proses penyusunan RPJP-D Sumatera Utara sebagai dokumen rencana pembangunan daerah dalam jangka panjang dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- . RPJP-D Sumatera Utara mengacu kepada RPJP Nasional.
- . RPJP-D Sumatera Utara harus dapat dan layak menjadi acuan RPJP-D Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.
- . RPJP-D Sumatera Utara memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui mekanisme Musrenbang RPJP-D.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa setelah proses penyusunan RPJP-D selesai maka RPJP-D tersebut harus dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri cq Ditjend Bina Pembangunan Daerah sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Provinsi. Sedangkan RPJP-D Kabupaten /Kota dikonsultasikan dengan Gubernur cq Bappeda sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten /Kota.

Seperti telah dijelaskan diatas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini merupakan dokumen dengan cakupan waktu (time horizon) 20 tahun. Dokumen ini kemudian digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk setiap jangka waktu 5 tahun. Karena cakupan waktu perencanaan cukup panjang maka dalam upaya mengantisipasi arah pembangunan kedepan diperlukan proses analisis secara bertahap yang setiap tahapnya membutuhkan metode analisis tertentu. Tahapan analisis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tahap Pertama : Penyiapan Rancangan RPJP-D Sumatera Utara

Rancangan RPJP-D Sumatera Utara dibutuhkan untuk mendapatkan gambaran awal dari visi, misi dan arah pembangunan daerah Sumatera Utara. Dalam Rencana Strategik Sumatera Utara yang disusun tahun 2003, rumusan visi, misi dan arah pembangunan Sumatera Utara untuk cakupan waktu (*time horizon*) 15 tahun telah dirumuskan dan telah digunakan dalam penyusunan rencana APBD setiap tahun. Karena cakupan waktu RPJP-D lebih panjang dari sisa waktu masa berlaku Rencana Strategik Sumatera Utara tersebut maka perumusan kembali visi, misi dan arah pembangunan tetap diperlukan dengan menggunakan rumusan visi, misi dan arah Rencana Strategik sebagai salah satu masukan.

Tahap Kedua : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang Daerah Sumatera Utara

Musrenbang diselenggarakan untuk mendapatkan masukan sekaligus membangun komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap rancangan RPJP-D sehingga setelah ditetapkan sebagai dokumen rencana pembangunan, proses implementasi dan pengawasannya menjadi lebih mudah.

Tahap Ketiga : Konsultasi Publik

Konsultasi publik diselenggarakan untuk mendapatkan masukan dari seluruh stakeholder termasuk LSM, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan seluruh SKPD Provinsi Sumatera Utara serta unsur-unsur kritikal lainnya.

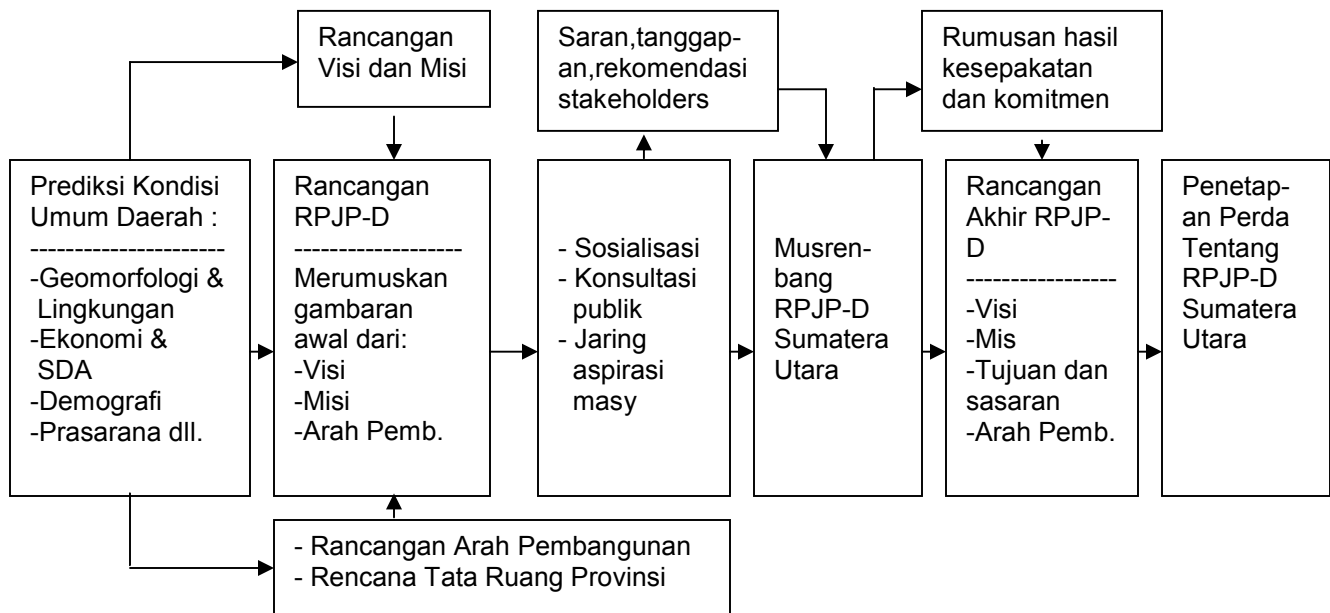
Tahap Keempat : Penyusunan Rancangan Akhir RPJP-D Sumatera Utara

Apabila masukan dan komitmen dari pemangku kepentingan melalui mekanisme Musrenbang telah diperoleh maka dilakukan penyempurnaan Rancangan RPJP-D untuk

mendapatkan Rancangan Akhir yang siap untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Sumatera Utara.

Tahap Kelima : Penetapan Perda Tentang RPJP-D Sumatera Utara

Rancangan Akhir RPJP-D Sumatera Utara beserta lampirannya disampaikan kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai inisiatif Pemerintah Daerah untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah tentang RPJP-D. Secara diagramatik, proses penyusunan RPJP-D Sumatera Utara dilakukan sebagai berikut:



1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sumatera Utara ini ialah untuk menyediakan sebuah dokumen resmi rencana pembangunan jangka panjang Sumatera Utara yang mempunyai cakupan waktu 20 tahun kedepan. Dengan adanya dokumen resmi ini maka RPJP-D ini menjadi sumber dan acuan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sumatera Utara yang bercakupan waktu 5 tahun dan juga bagi penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten dan Kota yang berjangka waktu 20 tahun ke depan.

1.3 Landasan Hukum

Rencana Pembangunan Jangka Panjang disusun dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga, Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/RPJP-D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/RPJM-D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/RKP-D) sebagai rencana tahunan. Penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut dilakukan melalui proses kordinasi administrasi pemerintah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

1.4 Hubungan RPJP-D Sumatera Utara dengan Dokumen Perencanaan Lain

Pembangunan Daerah Sumatera Utara baik dalam jangka panjang maupun jangka menengah adalah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Tujuannya secara makro ialah memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, RPJP-D Sumatera Utara disusun dengan berpedoman kepada RPJP Nasional dengan tetap memperhatikan keunikan Sumatera Utara sebagai potensi besar yang dapat dimanfaatkan. Sehubungan dengan hal diatas maka disamping dokumen RPJP Nasional, RPJP-D Sumatera Utara juga disusun dengan memperhatikan dokumen rencana pembangunan lain yang telah ada dan masih berlaku seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Sumatera Utara, dan Rencana Strategik Sumatera Utara.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sumatera Utara ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

Seluruh pokok bahasan dibagi dalam 5 bab yang ditulis berturut-turut Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV dan Bab V. Dalam Bab I diuraikan latar belakang penyusunan RPJP-D Sumatera Utara yang meliputi sejarah singkat pembentukan daerah Sumatera Utara, maksud dan tujuan penyusunan RPJP Sumatera Utara, landasan hukum penyusunan RPJP-D, dan hubungan antara RPJP-D dan dokumen rencana pembangunan lain baik pada tingkat pusat seperti RPJP Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Sumatera Utara dan lain-lain.

Dalam Bab II dibahas kondisi Sumatera Utara yang memiliki faktor-faktor strategik antara lain ialah kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup, demografi, ekonomi dan sumberdaya alam, sosial budaya dan politik, prasarana dan sarana ekonomi dan wilayah, pemerinthan. Data-data tentang kondisi masing-masing bahasan tersebut diambil dalam cakupan waktu 12 tahun yaitu 1994-2006. Analisis terhadap kondisi yang berkembang dalam rentang waktu 12 tahun tersebut dilakukan secara mendetail dan sedapat mungkin dilakukan prediksi perkembangan 20 tahun kedepan dengan selang waktu setiap 5 tahun.

Dalam Bab III diuraikan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis dan prediksi perkembangan 20 tahun kedepan dengan tetap memperhatikan dokumen resmi pembangunan Sumatera Utara yang hingga saat ini masih berlaku seperti Renstra, Rencana Tata Ruang Wilayah Sumatera Utara dan lain-lain.

Dalam Bab IV diuraikan arah, tahapan dan prioritas pembangunan daerah. Tahapan pembangunan yang dimaksud adalah tahapan rencana lima tahunan yang membagi RPJP-D atas 4 RPJM-D secara berkesinambungan yang masing-masing menegaskan prioritas.

Bab V yang merupakan bagian penutup yang berisikan berbagai kesimpulan yang perlu menjadi fokus perhatian setiap penanggung jawab unit pelaksana terkait sarta berbagai saran yang juga perlu diperhatikan agar implementasi RPJPD Sumatera Utara ini dapat mencapai tujuan dan sasaran seperti ditetapkan.

BAB II

KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

2.1 Kondisi dan Analisis

2.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

1). Kondisi Umum Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

a. Kondisi Masa Lampau

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1-4° Lintang Utara dan 98-100° Bujur Timur dan merupakan bagian dari wilayah pada posisi silang di kawasan Palung Pasifik Barat. Daerah ini berbatasan dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Sebelah Utara, Provinsi Riau dan Sumatera Barat di Sebelah Selatan, Selat Malaka di sebelah Timur dan Lautan Hindia di sebelah Barat.

Provinsi Sumatera Utara yang luasnya 71.680 km², secara geografis terbagi atas Wilayah Pantai Timur, Wilayah Dataran Tinggi, Wilayah Pantai Barat dan Wilayah Kepulauan yang masing-masing memiliki topografi dan kontur yang beragam. Wilayah Pantai Timur yang luasnya sekitar 26.360 km² (36,8 %) dari luas wilayah Sumatera Utara), secara umum merupakan dataran rendah yang cukup lembab dan subur dengan curah hujan yang relatif tinggi. Karena faktor kesuburannya, kawasan ini relatif cukup cepat terbangun. Hal ini membuat arus migrasi ke kawasan ini demikian tinggi sehingga tingkat kepadatan penduduk meningkat secara tajam.

Secara geologis, Daerah Sumatera Utara memiliki struktur dan batuan yang kompleks dan telah beberapa kali mengalami proses tektonik karena merupakan pertemuan lempeng Eurasia dan lempeng Australia. Hal ini menyebabkan terbentuknya rangkaian jalur patáhan, rekahan dan pelipatan disertai kegiatan vulkanik. Jalur patáhan tersebut melewati jalur Sumatera Utara mulai dari segmen Alas-Karo dan sepanjang kurang lebih 390 km merupakan pusat-pusat gempa di darat. Jalur patáhan (*subduction*) di Pantai Barat sepanjang kurang lebih 250 km merupakan pusat-pusat gempa di dasar laut. Kondisi struktur geologi yang kompleks yang dicirikan oleh bentuk bentang alam perbukitan, terlipat dengan patáhan selain merupakan jalur gempa juga potensial menimbulkan tanah longsor. Sekitar 40-50 % dari luas daerah Sumatera Utara yang mencakup 18 wilayah kabupaten dan 1 kota (menurut keadaan tahun 2005) merupakan kawasan yang rentan gerakan tanah longsor.

Salah satu konsekwensi negatif dari tingginya tingkat kepadatan penduduk kawasan ini ialah penggalian / eksploitasi sumberdaya alamnya termasuk sumberdaya hutan semakin

sulit dikendalikan dan berakibat terjadinya gangguan pada sistem lingkungan. Banjir sering melanda kawasan ini karena sungai-sungai yang ada mengalami pendangkalan secara terus menerus akibat tingkat erosi cukup tinggi. Sebaliknya pada musim kemarau, terjadi pula kekurangan persediaan air karena kerusakan hutan yang telah sampai mengganggu kemampuan hutan mengatur persediaan air.

Wilayah Dataran Tinggi, dan Wilayah Pantai Barat secara bersama-sama mempunyai luas areal 45.320 km² (63,2 % luas Sumatera Utara) sebagian besar berupa pegunungan. Baik tingkat kesuburan tanah maupun iklim, topografi dan kontur tanah sangat bervariasi. Sebagian wilayah ini khususnya di pulau Nias, tanahnya sangat labil. Beberapa danau, sungai, air terjun dan gunung berapi yang aktif ditemui di kawasan ini yaitu SoriK Merapi (tipe A) di Mandailing Natal, Sibayak dan Sinabung (tipe B) di Karo, Pusuk Buhit (tipe B) di Samosir, Hela Toba / Martimbang (tipe B) di Tapanuli Utara dan Sibual-buali (tipe A) di Tapanuli Selatan. Keberadaan keenam gunung berapi ini memerlukan pemantauan secara terus-menerus untuk mengetahui kemungkinan terjadinya peningkatan kegiatan karena potensi letusan tidak dapat diabaikan.

Curah hujan relatif cukup tinggi yaitu berkisar 1.431- 2.265 mm per tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata sebesar 173-230 hari per tahun. Musim kemarau pada umumnya terjadi pada Juni sampai September dan musim penghujan terjadi pada bulan November sampai Maret.

b. Permasalahan

Beberapa permasalahan utama yang ditemui sehubungan dengan kondisi fisik wilayah Sumatera Utara ialah:

(1). Sebagian wilayah Sumatera Utara memiliki kondisi fisik yang sangat sulit. Sebagian besar kawasan Pantai Barat sangat berbukit dan bergelombang dan khusus Pulau Nias memiliki tanah yang sangat tidak stabil. Kondisi ini sangat menyulitkan pembangunan prasarana jalan dan juga bendungan irigasi yang merupakan kunci dalam percepatan pembangunan wilayah.

(2). Kualitas lingkungan baik kawasan pantai maupun di pegunungan telah banyak mengalami kerusakan akibat penebangan mangrove dan penggundulan hutan secara berlebihan termasuk *illegal logging*. Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang rawan longsor dan khususnya kota Medan menjadi daerah rawan banjir karena faktor erosi dan pendangkalan sungai, tanah longsor di daerah pegunungan.

(3). Peralihan fungsi hutan menjadi lahan perkebunan tanaman keras seperti kelapa sawit, karet, coklat dan lain-lain oleh masyarakat sehubungan dengan perkiraan kenaikan harga pasar komoditas perkebunan tersebut menyebabkan luas areal hutan semakin kritis sehingga mengancam ketersediaan sumberdaya air disamping banjir, pendangkalan sungai dan lain-lain.

(3) Kualitas lingkungan pesisir dan laut juga semakin memprihatinkan sehubungan dengan intrusi air laut yang semakin jauh kedaratannya, kerusakan pantai sehubungan dengan penambangan pasir pantai yang semakin tidak terkendali, dan penjarahan terumbu karang yang terus terjadi.

(4). Kualitas lingkungan hidup khususnya di daerah pinggiran kota dan di pedesaan semakin kumuh karena sistem pembuangan limbah dan drainase yang tidak terkendali, baik dari rumah tangga, rumah makan, industri maupun pasar-pasar tradisional.

(5). Pencemaran air Danau Toba akibat pemanfaatan air danau sebagai keramba ikan serta pembuangan limbah usaha peternakan disekitar danau telah sangat mengganggu pemanfaatan potensi besar Danau Toba sebagai daerah tujuan wisata di Sumatera Utara.

c. Capaian/Keberhasilan

(1). Pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Sumatera Utara, sebagaimana halnya pada tingkat nasional telah mendapat sambutan luas baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat khususnya dari organisasi-organisasi non-pemerintah. Pada pemerintah provinsi, kuatnya komitmen terhadap pelestarian sumberdaya alam terlihat dari terbentuknya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) setingkat dinas yang bertanggung jawab dalam memantau, menganalisis dan membuat rekomendasi kebijakan pemerintah yang harus dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup.

(2). Berbagai perangkat Peraturan Daerah tentang pengamanan lingkungan hidup dalam arti luas telah berhasil disahkan dan diberlakukan dalam pemberian berbagai ijin kegiatan ekonomi dan sosial seperti ijin industri, pembangunan permukiman, hiburan, pariwisata dan lain-lain.

2). Analisis Proyeksi

Proyeksi Peluang

(1) Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan hidup termasuk aparat pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dan politisi telah semakin meningkat.

(2). Tuntutan lembaga-lembaga dunia internasional tentang pentingnya setiap negara secara intensif melindungi sistem ekologi melalui sistem pembangunan berkelanjutan melalui pertemuan-pertemuan internasional seperti KTT Bumi Rio de Janeiro dan Johannesburg, Protocol Kyoto dan lain-lain merupakan peluang besar untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan hidup.

Proyeksi Ancaman

(1) Tekanan ekonomi yang masih belum berhasil dikurangi secara signifikan terutama terhadap masyarakat kelompok ekonomi lemah yang hidup dipedesaan sangat kuat mendorong kelompok masyarakat tersebut untuk mengeksploitasi nilai ekonomi lingkungan secara tidak terencana seperti perambahan hutan untuk pertanian, pengambilan batu/pasir sungai dan pasir pantai / terumbu karang secara berlebihan, pembuangan limbah industri rumah tangga secara sembarangan dan lain-lain.

(2) Masih maraknya praktek-praktek *illegal logging* yang tetap tidak terjangkau oleh hukum karena praktek-praktek KKN belum sepenuhnya dapat diatasi sehubungan dengan masih lemahnya kewibawaan hukum. Demikian juga dengan ketidak berdayaan aparat keamanan dalam pengamanan potensi ikan laut dari *illegal fishing* oleh kapal-kapal penangkap ikan asing.

(3) Tingginya kebutuhan investasi untuk penanganan limbah buangan pada dunia industri manufakturing sering kali menimbulkan biaya tambahan yang tinggi sehingga apabila dibebankan kepada produksi bersangkutan akan menurunkan daya saing perusahaan di pasar global dan regional.

(4). Terbatasnya anggaran pemerintah dalam pelaksanaan pemantauan dan pengujian limbah buangan industri menyebabkan daya jangkau pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup sangat terbatas.

(5). Meningkatnya kebutuhan dana untuk menanggulangi bencana-bencana alam yang tidak berkaitan dengan peningkatan investasi sehubungan dengan potensi terjadinya gempa bumi, tanah longsor, banjir dan lain-lain.

Proyeksi Permasalahan

(1) Penanggulangan pencemaran lingkungan masih akan tetap menjadi masalah walaupun intensitasnya sudah jauh menurun karena pembangunan ekonomi diperkirakan

belum mampu mengangkat derajat kehidupan seluruh lapisan masyarakat secara signifikan terutama melalui ketersediaan pekerjaan yang ramah lingkungan dengan pendapatan yang mampu mendukung kehidupan yang layak.

(2) Faktor kesulitan topografi di Kawasan Dataran Tinggi dan Pantai Barat masih merupakan kendala utama dalam pemerataan pembangunan dengan Kawasan Pantai Timur sehubungan dengan ketidakmampuan pemerintah dan masyarakat dalam pengadaan dana besar dalam pembangunan prasarana transportasi khususnya jalan dan jembatan.

(3) Tata ruang wilayah Sumatera Utara baik pada tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/ Kota belum memasukkan secara utuh aspek geologi dan potensi bencana alam geologi. Hal ini penting untuk memudahkan pihak calon investor memilih wilayah investasi yang paling potensial bagi mereka.

Proyeksi Keberhasilan

(1) Tantangan alam (kondisi topografi yang berat) yang menyebabkan keterisolasian wilayah Kawasan Pantai Barat sebagian telah dapat diatasi. Keterisolasian Kawasan Pantai Barat telah berhasil dikurangi dengan pembangunan kembali beberapa lapangan terbang yaitu Lapangan Terbang Binaka di Gunung Sitoli (Nias), Dr. FL Tobing (Tapanuli Tengah), Silangit (Tapanuli Utara), Sibisa (Toba Samosir) dan Aek Godang (Tapanuli Selatan) serta pengoperasian perusahaan penerbangan Sutra Airline yang merupakan kerjasama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kawasan Pantai Barat. Melihat besarnya peningkatan arus penumpang dari Medan dan sebaliknya maka diperkirakan dalam waktu yang tidak lama, faktor keterisolasian Kawasan Pantai Barat akan teratasi.

(2). Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat di Kawasan Pantai Barat telah memperlihatkan angka-angka yang semakin membaik sehubungan dengan meningkatnya program-program pembangunan provinsi di kawasan tersebut. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita akan semakin tinggi sehubungan dengan kebijakan pembangunan Sumatera Utara yang memandang semakin pentingnya pemerataan pembangunan antar ketiga kawasan yaitu Pantai Barat, Pantai Timur dan Dataran Tinggi.

2.1.2 Demografi

1). Kondisi Umum Demografi

a. Kondisi Masa Lampau

Pertumbuhan Penduduk

Menurut data BPS Sumatera Utara, pada tahun 1994 jumlah penduduk daerah ini adalah 10.981.100 jiwa. Pada tahun 1999, jumlah penduduk meningkat menjadi 11.955.400 jiwa, tahun 2004 menjadi 12.123.360 jiwa dan pada tahun 2006 menjadi 12.643.494 jiwa. Dengan demikian, tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata dalam periode 1994-1999 ialah sebesar 1,71 % per tahun dan dalam periode 1999-2006 turun menjadi 0,80 % per tahun. Jika dihitung dalam periode 1994-2006, maka tingkat pertumbuhan penduduk Sumatera Utara relatif cukup rendah yaitu hanya 0,94 % per tahun.

Jika ditinjau dari tingkat kepadatan, pada tahun 1994 tingkat kepadatan penduduk Sumatera Utara adalah 153 jiwa per km² dan pada tahun 1999 meningkat menjadi 167 jiwa per km². Pada tahun 2004 dan tahun 2006, kepadatan penduduk meningkat lagi menjadi 169 dan 177 jiwa per km². Gambaran diatas menunjukkan bahwa kendati jumlah penduduk mengalami peningkatan, tingkat pertumbuhan penduduk di Sumatera Utara cenderung mengalami penurunan. Hal ini terlihat sejalan dengan tingkat kelahiran yang juga memperlihatkan penurunan secara konsisten dari 3,26 % pada tahun 1994, menjadi 3,16 % pada tahun 1999 dan naik lagi menjadi 3,34 % pada tahun 2006. Kondisi ini dapat dipandang sebagai sebuah keberhasilan dalam pengendalian jumlah penduduk karena secara nasional tingkat pertumbuhan penduduk relatif masih tinggi yaitu berada diatas sebesar 1,50 % per tahun.

Piramida kependudukan memperlihatkan bahwa pada tahun 1994 persentase penduduk pada usia dibawah 10 tahun adalah 26,14 % dan diatas 65 tahun sebesar 3,26 %. Dengan demikian jumlah penduduk pada usia non-produktif adalah 29,40 % dan usia produktif 70,60 %. Pada tahun 1999 dan 2006, jumlah penduduk pada usia non-produktif masing-masing 25,54 % dan 36,30 % dan usia produktif masing-masing sebesar 74,46 % dan 63,70 %. Gambaran ini menunjukkan bahwa dalam periode 1994-2006, telah terjadi pergeseran pada piramida penduduk Sumatera Utara yang mengarah pada peningkatan jumlah usia produktif walaupun relatif kecil.

Dari sudut *sex ratio* (rasio jenis kelamin), Sumatera Utara masih belum mampu memperlihatkan angka yang seimbang. Pada tahun 1994 angka rasio jenis kelamin 99,53. Pada tahun 1999 dan 2006 masing-masing 99,05 dan 100,09. Kabupaten / kota yang memiliki rasio jenis kelamin yang relatif masih cukup pincang antara lain Mandailing

Natal, Toba Samosir, Tapanuli Selatan dan Samosir. Pada tahun 2006, penduduk Sumatera Utara berjenis kelamin perempuan berjumlah sekitar 6.318.990 jiwa dan penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 6.324.504 jiwa, dengan demikian *sex ratio* penduduk Sumatera Utara adalah sebesar 100,09 %.

Ketenagakerjaan

Ditinjau dari sudut ketenagakerjaan, jumlah tenaga kerja pada tahun 1994 adalah 8.370.829 jiwa atau 75,11 % dari jumlah penduduk. Jumlah angkatan kerja pada periode yang sama relatif cukup rendah yaitu hanya 4.811.298 jiwa atau 43,17 % dari jumlah penduduk. Dengan demikian, tingkat partisipasi angkatan kerja hanya 57,48 %. Pada tahun 1999 jumlah tenaga kerja, angkatan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja masing-masing sebesar 77,45 %, 45,04 % dan 58,15 % dan pada tahun 2006 menjadi 64,47 %, 43,43 % dan 71,94 %. Gambaran diatas menunjukkan bahwa dalam periode 1994-2006, Sumatera Utara mengalami perbaikan dalam tingkat partisipasi angkatan kerja sejalan dengan perbaikan dalam piramida kependudukan yang memperlihatkan persentase jumlah penduduk usia produktif yang semakin meningkat.

Pengangguran telah lama merupakan problema yang dihadapi oleh masyarakat Sumatera Utara sebagaimana juga halnya di provinsi lainnya di Indonesia. Pada tahun 1994, tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Utara adalah 3,80 %. Pada tahun 1999 dan 2006, tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 3,75 % dan 11,51 %.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Utara tahun 2006 adalah 71,94 %. Dilihat dari status pekerjaannya, 31,57 % adalah buruh/karyawan, 19,48 % pekerja keluarga, pengusaha (yang mempekerjakan buruh tetap/bukan anggota keluarganya) 3,43 %. Penduduk bekerja sebagian besar (49,64 %) pada sektor pertanian, sebanyak 19,21 % pada sektor perdagangan, hotel dan pada sektor industri.

Angka Kelahiran Total, Angka Kematian Bayi dan Harapan Hidup

Angka kelahiran total Sumatera Utara pada tahun 1994 adalah 3,26 % yang bervariasi antar kabupaten / kota dari 2,32 % sampai 4,61 %. Pada tahun 1999, angka ini menurun menjadi 3,16 % dengan variasi 2,44 % sampai 3,86 % antar kabupaten / kota. Pada tahun 2004 menurun lagi menjadi 2,96 % dan tahun 2006 menjadi 2,47 % dengan variasi antar kabupaten/kota dari 2,16 % sampai 3,25 %. Kabupaten / kota yang masih tinggi angka kelahiran totalnya antara lain ialah Kabupaten Toba Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Dairi Labuhan Batu, dan Mandailing Natal walaupun dalam periode 1994-2006 terlihat penurunan secara terus-menerus.

Disamping itu, angka kematian bayi rata-rata pada tahun 1994 di Sumatera Utara ialah sebesar 60 yang bervariasi dari 28 sampai 91 antar kabupaten /kota . Pada tahun 1999, angka kematian bayi turun menjadi 43 dengan variasi 22,5 sampai 55,5 dan pada tahun 2004 turun lagi menjadi 36,7 dengan variasi tahun 2004 antara 18,6 sampai 57 antar kabupaten /kota, dan tahun 2006 turun menjadi 28,20 dengan variasi tahun 2006 antara 15.09 sampai 46,67 antar kabupaten /kota. Kabupaten /kota yang masih memperlihatkan angka kematian bayi yang relatif masih tinggi antara lain ialah Mandailing Natal, Labuhan Batu, Asahan, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Tanjung Balai, Tapanuli Tengah, dan Toba Samosir walaupun pada kabupaten-kabupaten tersebut memperlihatkan penurunan secara terus-menerus.

Angka harapan hidup masyarakat Sumatera Utara juga memperlihatkan perbaikan secara terus menerus. Pada tahun 1994, angka harapan hidup rata-rata adalah 66 tahun yang bervariasi dari 55,81 tahun sampai 70,20 tahun. Pada tahun 1999 meningkat menjadi 66,3 tahun dengan variasi 63,8 tahun sampai 71,9 tahun dan pada tahun 2004 meningkat lagi menjadi 68,2 tahun, dan tahun 200 mencapai 68,9 tahun dengan variasi 63,4 tahun sampai 72,8 tahun. Kabupaten/ kota yang memiliki angka harapan hidup yang masih rendah antara lain Mandailing Natal, Pakpak Bharat, Tapanuli Selatan, Dairi, Humbang Hasundutan, dan Labuhan Batu, sedangkan yang memiliki angka harapan hidup yang tinggi antara lain Karo, Pematang Siantar, Medan, Tebing Tinggi dan Binjai.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia diukur pada empat komponen sumberdaya manusia yaitu harapan hidup, melek huruf, lama sekolah rata-rata dan pengeluaran riil per kapita. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara dari tahun ke tahun dalam periode 1990-2005 mengalami perbaikan yang cukup besar. Pada tahun 1990, IPM adalah 67,0 dengan variasi 43,2 sampai 71,6. Pada tahun 1996 meningkat menjadi 70,5 yang bervariasi dari 55,5 sampai 74,3. Tetapi pada tahun 1999, terjadi penurunan yang cukup besar yaitu menjadi hanya 66,6 yang bervariasi dari 50,4 sampai 70,9. Pada tahun 2004 meningkat kembali dan menjadi 71,4 yang bervariasi dari 63,1 sampai 75,4 seperti terlihat dalam Tabel-1, dan tahun 2005 menjadi 72,0.

Terjadinya penurunan IPM secara drastis pada tahun 1999 terkait kuat dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan Sumatera Utara yang menimbulkan kemiskinan yang meluas di daerah ini karena meluasnya pemutusan hubungan kerja sehubungan dengan berhentinya operasi perusahaan. Berdasarkan perhitungan BPS Sumatera Utara, pada setiap 1 % penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah Sumatera Utara, akan berakibat pemutusan hubungan kerja yang secara makro diperkirakan rata-rata sebanyak 15.000 tenaga kerja. Ketika krisis ekonomi menurunkan pertumbuhan ekonomi daerah

ini dari rata-rata 8 % per tahun menjadi - 11 % atau menurun sebesar 19 % maka berdasarkan asumsi diatas telah terjadi pemutusan hubungan kerja sebanyak 165.000 tenaga kerja. Jumlah ini sangat berarti dalam menurunkan IPM Sumatera Utara dari 70,5 menjadi 66,6 seperti terlihat dalam Tabel -1.

Tabel- 1
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara

Daerah	Indeks IPM Pada Tahun					
	1990	1996	1999	2001	2004	2005
1. Nias*	43,2	55,5	50,4	59,0	65,0	66,1
2. Mandailing Natal	-	-	-	63,8	67,5	68,8
3. Tapanuli Selatan	64,0	68,5	65,2	69,3	71,0	72,2
4. Tapanuli Tengah	58,8	63,8	62,1	65,3	68,4	68,9
5. Tapanuli Utara	64,4	67,9	65,7	66,4	70,9	72,1
6. Toba Samosir	-	-	-	67,4	73,8	74,5
7. Labuhan Batu	62,8	68,0	64,0	65,8	70,6	71,1
8. Asahan	65,3	68,9	65,1	67,1	69,7	70,1
9. Simalungun	60,0	68,2	65,1	68,5	70,5	71,3
10. Dairi	63,8	68,3	61,1	63,0	69,9	70,5
11. Karo	70,0	73,3	69,1	73,3	72,5	73,5
12. Deli Serdang	67,3	70,5	66,1	71,0	71,6	72,4
13. Langkat	62,6	68,3	67,1	70,0	70,7	71,3
14. Nias Selatan	-	-	-	-	63,1	63,9
15. Humbang Hasundutan	-	-	-	-	69,1	70,0
16. Pakpak Bharat	-	-	-	-	68,3	68,7
17. Samosir	-	-	-	-	71,7	72,2
18. Serdang Bedagai	-	-	-	-	70,0	71,2
19. Sibolga	66,7	72,0	68,9	72,0	72,9	73,2
20. Tanjung Balai	63,3	72,5	66,8	67,3	71,0	71,6
21. Pematang Siantar	66,3	73,7	70,9	74,6	75,4	75,8
22. Tebing Tinggi	69,2	74,2	69,5	73,4	74,0	74,3
23. Medan	71,6	74,3	70,8	73,2	74,7	75,4
24. Binjai	71,0	73,6	68,5	72,2	74,0	74,4
25. Padang Sidempuan	-	-	-	-	72,6	73,3
Sumatera Utara	67,0	70,5	66,6	69,5	71,4	72,0

Sumber : BPS Sumatera Utara Tahun 2005

* Termasuk Nias Selatan

Data diatas menunjukkan bahwa sebelum tahun 2000 masih ada bagian wilayah Sumatera Utara yang memiliki IPM pada kategori rendah (sekitar 50 menurut standar UNDP). Pada tahun 2001, semua daerah otonom telah memiliki IPM sedikitnya pada tingkat moderat bawah bahkan hanya 5 kabupaten saja dari 25 kabupaten/kota yang memiliki IPM < 66 yaitu Nias, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Labuhan Batu dan Dairi. Pada tahun 2004 hanya Kabupaten Nias dan Nias Selatan (hasil pemekaran Kabupaten Nias) yang masih berada pada tingkat moderat bawah. Perkembangan IPM dalam periode 1994-2005 tersebut menunjukkan bahwa, Sumatera Utara pada dasarnya tidak menghadapi kendala serius dalam pembangunan sumberdaya manusianya.

Kabupaten / kota yang mempunyai IPM yang masih rendah antara lain Nias, Mandailing Natal, Tapanuli Utara sedangkan yang mempunyai IPM yang relatif tinggi antara lain Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, Karo, Toba Samosir dan Sibolga yang semuanya berada diatas rata-rata Sumatera Utara.

b. Permasalahan Demografi

(1). Walaupun laju pertumbuhan penduduk dalam periode 1994-2004 sudah menurun secara drastis sehubungan dengan semakin menurunnya tingkat kelahiran, karena jumlah penduduk Sumatera Utara relatif tinggi maka kepadatan penduduk tetap semakin meningkat yaitu rata-rata dari 153 jiwa /km² pada tahun 1994 menjadi 167 jiwa /km² pada tahun 1999 dan 172 jiwa /km² pada tahun 2005.

(2). Tingkat kelahiran total yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun yaitu dari 3.55 % pada tahun 1994 menjadi 2,47 % tahun 2006 sangat tidak merata antar wilayah (desa dan kota) yaitu berkisar 2,32-4,61 %. Demikian juga halnya dengan angka kematian bayi yang telah berhasil diturunkan dari 60 orang pada tahun 1994 menjadi 43 orang pada tahun 1999 dan 28.20 orang pada tahun 2006, juga sangat tidak merata antara kota dan desa yaitu berkisar 15.09 (Medan) - 46.67 (Mandailing Natal) orang pada tahun 2006.

(3). Tingkat pengangguran terbuka yang dalam tahun 1994 relatif rendah yaitu 3,75 %, maka sejak krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 meningkat terus, dan pada tahun 2004 telah mencapai 13,75 %. Dan tahun 2006 turun kembali menjadi 11,51 %. Jika digabungkan dengan pengangguran yang terselubung maka jumlah angkatan kerja Sumatera Utara yang menganggur mencapai lebih dari dua kali jumlah pengangguran terbuka. Pada tahun 2006, tingkat partisipasi angkatan kerja relatif telah semakin membaik walaupun masih rendah yaitu sebesar 66.90 %.

(4) Sektor-sektor penyedia lapangan kerja yang dominan masih dalam pertanian rakyat, usaha informal dan usaha kecil dan menengah yang pada umumnya memiliki daya saing yang masih rendah. Hal ini membuat tingkat pendapatan para pekerja tetap rendah bahkan sebagian besar masih berada dibawah upah Provinsi minimum. Ketidak berdayaan tenaga kerja dalam menghasilkan produktivitas dan mutu kerja yang tinggi terletak pada ketidakmampuan mereka mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan lapangan kerja maju.

(5) Harapan hidup masyarakat juga mengalami kemajuan yang pesat yaitu dalam kurun waktu 1994-2006 terjadi peningkatan dari 66 tahun menjadi 68,9 tahun. Namun demikian, masih ditemukan variasi yang cukup besar antar desa dan kota yaitu berkisar 63,3 -71,8 tahun.

(6) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara juga masih sangat bervariasi antar kabupaten. Walaupun secara rata-rata IPM Sumatera Utara cukup baik yaitu mencapai 72 dibandingkan dengan rata-rata nasional, persebaran antar kabupaten sangat tidak merata. Nias, Mandailing Natal dan Tapanuli Utara merupakan wilayah-wilayah yang menghadapi problema IPM yang serius karena masih sangat rendah sedangkan Medan, Pematang Siantar, Toba Samosir dan Karo berada pada posisi yang cukup baik.

(7) Tingkat kemelekan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi sangat lemah. Masalah ini tidak hanya ditemui di lingkungan masyarakat lapisan bawah tetapi juga di lingkungan masyarakat berpendidikan. Kelemahan ini sangat menghambat dan merupakan salah faktor penghambat utama dalam peningkatan produktivitas sumberdaya manusia Sumatera Utara

c. Capaian / Keberhasilan

(1) Pertumbuhan penduduk Sumatera Utara yang mengalami penurunan drastis menjadi hanya (0,99% dalam rentang waktu 1994-2006) sehingga jauh dibawah pertumbuhan penduduk nasional (diatas 1,5%) adalah sebuah keberhasilan dalam program pengendalian penduduk.

(2) Piramida penduduk juga telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu persentase jumlah penduduk pada usia produktif antara 10-65 tahun mengalami peningkatan dari 70,60 % menjadi 74,15 %.

(3) Tingkat partisipasi angkatan kerja yaitu persentase tenaga kerja terhadap jumlah tenaga kerja juga mengalami peningkatan tajam yaitu dari 58,15 % menjadi 66.90 %

adalah dampak positif dari pengendalian angka kelahiran dan perbaikan derajat kesehatan masyarakat.

(4) Disamping itu, angka kematian bayi yang pada tahun 1994 relatif cukup tinggi yaitu rata-rata 60 orang per 1000 bayi lahir dan pada tahun 2006 turun menjadi rata-rata 28.20 orang per 1000 bayi lahir adalah prestasi dalam perbaikan kesehatan ibu dan bayi.

(5) Usia harapan hidup masyarakat dan indeks pembangunan manusia juga memperlihatkan keberhasilan dari tahun ke tahun. Usia harapan hidup masyarakat meningkat dari rata-rata 66 tahun menjadi 68,7 tahun dan Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara (71,4) berada diatas Indeks Pembangunan Manusia secara nasional. Sedangkan capaian pada tahun 2006 adalah 72,0.

2). Analisis Proyeksi

Proyeksi Peluang

(1) Pesatnya perkembangan teknologi kesehatan dan banyaknya pelajaran yang diperoleh masyarakat dalam menghadapi kenyataan hidup sehubungan dengan kemiskinan akibat semakin langkanya peluang kerja merupakan peluang besar untuk lebih menekan angka kelahiran penduduk dan perbaikan kesehatan masyarakat di masa yang akan datang.

(2) Kebijakan presiden dengan menginstruksikan kepada setiap kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan terobosan dalam perbaikan pada 7 subsektor strategis antara lain dalam perbaikan kesehatan masyarakat, pendidikan, pengangguran, kemiskinan dan lain-lain merupakan peluang besar untuk melakukan terobosan dalam perbaikan kualitas sumberdaya manusia di Sumatera Utara.

Proyeksi Ancaman

(1) Semakin terbatasnya luas lahan khususnya lahan-lahan pertanian akibat berbagai kebijakan konversi penggunaan lahan termasuk semakin meluasnya lahan-lahan pertanian yang rusak merupakan ancaman yang serius karena lahan pertanian yang tersedia akan semakin tidak mampu mendukung pertumbuhan penduduk. Transformasi lapangan kehidupan masyarakat khususnya masyarakat kelompok bawah ke sektor lain seperti sektor industri dan sektor jasa masih terkendala kuat sehingga membutuhkan waktu lama karena sangat terkait dengan transformasi budaya dan peningkatan keterampilan.

(2) Berbagai kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan yang sudah lama didengungkan tetapi masih tetap belum menunjukkan hasil yang berarti dan pada sisi lain tindakan korupsi semakin merajalela akan membuat masyarakat semakin tidak mempercayai kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

Proyeksi Permasalahan

(1) Rendahnya kemampuan Pemerintah Daerah Sumatera Utara dalam pengadaan dan *up grading* sarana dan prasarana pelatihan tenaga kerja akan semakin mengurangi kesempatan kerja bagi tenaga kerja baru.

(2) Masih rendahnya rasa tanggung jawab dunia usaha dalam menyediakan sarana pelatihan bagi peningkatan keterampilan tenaga kerja baru (*job seekers*) akan membuat tenaga kerja Sumatera Utara akan semakin tidak kompetitif dalam merebut kesempatan kerja dalam dan luar daerah Sumatera Utara.

2.1.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam

1) Kondisi Ekonomi dan Sumberdaya Alam

a. Kondisi Masa Lampau

Ekonomi

Sebelum krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1977 lalu, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara relatif cukup tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam periode 1994-1997 misalnya tingkat pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara atas dasar harga konstan 1993, rata-rata sebesar 9,05 %. Tetapi setelah terjadi krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara menurun secara tajam. Dalam periode puncak krisis yaitu tahun 1997- 1999, perekonomian Sumatera Utara mengalami pertumbuhan rata-rata negatif yaitu -4,42 % per tahun. Kemudian setelah melewati puncak krisis, pertumbuhan ekonomi meningkat secara tajam walaupun masih jauh dibawah pertumbuhan sebelum krisis ekonomi yaitu dalam periode 1999-2006 mencapai rata-rata sebesar 4,54 % per tahun (lihat Tabel-2).

Tabel-2 memperlihatkan bahwa sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita juga memperlihatkan pola yang sama. Dalam tahun 1994 besarnya pendapatan per kapita di Sumatera Utara atas dasar harga konstan 1993 ialah Rp 1.789.120,- dan pada tahun 1997 meningkat menjadi Rp 2.189.128,-. Jadi dalam periode

1994-1997 pendapatan perkapita meningkat rata-rata sebesar 6,95 % per tahun. Suatu hal yang sangat perlu disadari ialah bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara sebagaimana hanya pada tingkat nasional, sejak krisis moneter tahun 1997, pertumbuhan ekonomi daerah ini tidak pernah mencapai diatas 6 % per tahun.

Tabel- 2 dibawah ini menunjukkan bahwa dalam periode 1994-1997, tingkat pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara mencapai 7,92 % per tahun. Selama puncak krisis ekonomi yaitu tahun 1997-1999, merosot tajam menjadi -4,42 % per tahun dan setelah krisis berjalan hampir 7 tahun tingkat pertumbuhan ekonomi belum mencapai keadaan sebelum krisis yaitu hanya 4,54 % per tahun.

Tabel-2
Perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan 1993 (Rp Juta)

Tahun	PDRB	Tingkat Pertumbuhan (%/Tahun)		
		1994-1997	1997-1999	1999-2006
1994	19.941.033	7,92		
1997	25.065.410		-4,42	
1999	22.898.420			14,78
2005	87.897.610			

Sumber : BPS Sumatera Utara Tahun 1994, 1997,1999, 2005

Pada tahun 1999, pendapatan per kapita menurun menjadi hanya Rp 1.931.574 dan pada tahun 2005 meningkat signifikan kembali menjadi Rp 11.106.258. Dengan demikian, tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita dalam periode puncak krisis ekonomi rata-rata adalah sebesar -6,07 % per tahun dan kemudian dalam periode 1999-2005 meningkat lagi menjadi 4,08 % per tahun (lihat Tabel-3).

Tabel-3
Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan Tahun1993

Tahun	PDRB Per Kapita (Rp)	Tingkat Pertumbuhan (%/ Tahun)		
		1994-1997	1997-1999	1999-2005
1994	1.789.120	6,95		
1997	2.189.128		-6,07	
1999	1.931.574			4,08
2005	11.106.258			

Sumber : BPS Sumatera Utara Tahun 1994,1997,1999,2005

Khusus untuk tahun 2005 dan 2006, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara telah menunjukkan keadaan yang semakin membaik. Kendati dalam periode 1999-2005 tingkat pertumbuhan rata-rata masih rendah yaitu 4.08 % per tahun, pada tahun 2005 mencapai 5.48 % dan tahun 2006 meningkat lagi menjadi 6.18 %. Walaupun relatif masih jauh dibawah tingkat pertumbuhan sebelum krisis ekonomi 1997, angka pertumbuhan yang terus menerus meningkat ini mengindikasikan bahwa Sumatera Utara telah semakin beranjak dari masalah krisis.

Ditinjau dari sudut pergeseran struktur perekonomian, pada tahun 1994, sektor pertanian memberikan kontribusi yang cukup dominan yaitu sebesar 29,07 %, sektor industri pengolahan menempati urutan kedua yaitu sebesar 23,97 % dan sektor perdagangan pada posisi ketiga yaitu 18,78 %. Pada tahun 1999 dan 2005, kontribusi sektor pertanian semakin meningkat yaitu masing-masing 31,81 % dan 25,25 %, sedangkan sektor industri pengolahan menurun menjadi 21,76 % dan 24,24 %. Seperti halnya sektor industri pengolahan, kontribusi sektor perdagangan juga semakin melorot yaitu masing-masing menjadi 17,42 % dan 16,93 % (lihat Tabel-4).

Tabel -4
Pergeseran Struktur Ekonomi Sumatera Utara Dalam Periode 1994,1999, 2005

Tahun	Pertanian (Rp miliar)		Industri (Rp miliar)		Perdagangan (Rp miliar)	
	Nilai Tambah	%	Nilai Tambah	%	Nilai Tambah	%
1994	5.249,34	29,07	4.778,99	23,97	3.744,44	18,78
1999	19.536,49	31,53	16.809,64	27,13	12.229,42	19,74
2005	32.093,34	23,44	35.555,03	25,97	24.772,57	18,09

Sumber : BPS Sumatera Utara Tahun 1994,1997,1999,2005

Pada tahun 2006, struktur ekonomi Sumatera Utara tidak mengalami perubahan yang berarti yaitu sektor pertanian 24,33 %, sektor industri 25,28 % dan sektor perdagangan 18,32 %.

Pada sektor pertanian, komoditas yang menonjol dalam pembentukan nilai tambah pada sektor tersebut ialah hasil-hasil perkebunan seperti minyak sawit, karet, kakao, teh, tembakau dan tebu yang diusahakan baik oleh perusahaan besar milik negara, swasta nasional dan swasta asing maupun oleh rakyat (*smallholders*). Data statistik Sumatera Utara menunjukkan bahwa luas areal perkebunan untuk komoditas utama diatas pada tahun 1994 adalah 962.549 ha yang terdiri dari perkebunan besar 499.414 ha (51,88 %) dan perkebunan rakyat 463.135 ha (48,12 %).

Pada tahun 1999, total luas areal meningkat menjadi 1.294.206 ha yang terdiri dari perkebunan besar 58,75 % dan perkebunan rakyat 41,25 %, dan tahun 2005 menjadi 1.746.340 ha yang terdiri dari perkebunan besar 780.418 ha (44,69 %) dan perkebunan rakyat seluas 963.913 ha (55,31 %). Berdasarkan data tersebut, dalam periode 1994-1999, tingkat pertumbuhan luas areal perkebunan untuk kelima komoditas utama tersebut rata-rata sebesar 6,10 % per tahun dan dalam periode 1999-2005 menurun sedikit menjadi 5,31% per tahun. Penurunan tingkat pertumbuhan luas areal tanaman perkebunan ini terjadi karena semakin langkanya lahan yang dapat dibuka tanpa mengganggu areal hutan lindung.

Pembangunan ketahanan pangan yang merupakan bagian dari pembangunan Sektor Pertanian, dalam periode 1994 sampai dengan 2004 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Produksi padi tahun 1994 adalah 3.079.960 ton GKG, dan tahun 2004 meningkat menjadi 3.418.782 ton atau meningkat rata-rata sebesar 1,2 % per tahun. Produksi jagung yang pada tahun 1994 hanya sebesar 311.916 ton, pada tahun 2004 meningkat menjadi 712.560 ton Pipil Kering atau meningkat rata-rata sebesar 14,3 % per tahun.

Tetapi produksi komoditas kedele mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jika produksi pada tahun 1994 telah mencapai 56.097 ton Biji Kering, maka pada tahun 2004 hanya mencapai 12.333 ton atau menurun rata-rata sebesar 8,6 % per tahun.

Sub Sektor Peternakan mengalami peningkatan produksi walaupun relatif rendah. Pada tahun 1994 produksi daging adalah 6.188 ton, dan pada tahun 2004 meningkat sedikit menjadi 6.982 ton atau meningkat rata-rata sebesar 1,4 % per tahun. Produksi telur mengalami peningkatan dari 50.109 ton pada tahun 1994, menjadi 153.775 ton pada tahun 2004 atau meningkat rata-rata sebesar 22,9 % per tahun.

Pada Sub Sektor Perkebunan khususnya komoditi gula dan minyak goreng terjadi situasi yang berlawanan. Pada komoditi gula, jika pada tahun 1994 produksi telah mencapai 71.667 ton, maka pada tahun 2004 kemudian turun drastis menjadi hanya 12.300 ton atau menurun rata-rata sebesar 9,2 % per tahun. Sebaliknya, pada komoditi minyak goreng, terjadi kenaikan dari 1.068.304 ton pada tahun 1994 , menjadi 1.889.814 ton pada tahun 2004 atau mengalami kenaikan rata-rata sebesar 8,5 % per tahun.

Nilai Tukar Petani (NTP) dalam kurun waktu 1994 sampai 2004 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 1994 NTP adalah 88,5 % dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 104,9 %. Kenaikan tersebut menunjukkan suatu angka pertumbuhan yang cukup menggembirakan yang sekali gus menggambarkan peningkatan daya beli petani secara agregat.

Di sektor industri pengolahan, komoditas utama yang dihasilkan ditinjau dari besarnya kontribusi nilai tambah adalah bahan-bahan makanan dan minuman, menyusul berturut-turut produk-produk kimia /plastik, produk logam dasar dan produk-produk kayu olahan. Produk-produk mesin dan barang-barang dari logam relatif masih sangat sedikit dihasilkan di Sumatera Utara.

Keadaan diatas tidak mengalami perubahan secara signifikan sampai tahun 2005. Data periode 1999-2005 menunjukkan bahwa produksi makanan dan minuman mengalami pertumbuhan sebesar 4,86 % per tahun, tetapi produk-produk kayu dan kertas meningkat sangat drastis yaitu rata-rata sebesar 32,37 % per tahun. Produk-produk kimia juga meningkat tajam yaitu rata-rata sebesar 16,51 % dan logam dasar sebesar 19,66 % per tahun. Namun demikian, produk-produk logam termasuk produk-produk mesin-mesin mengalami penurunan yang sangat tajam yaitu rata-rata minus 20,96 % per tahun. Hal ini menunjukkan ketergantungan Sumatera Utara terhadap barang-barang modal impor semakin kuat.

Di sektor perdagangan, khususnya pada sisi ekspor dan impor mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Pada tahun 1994, Sumatera Utara mengalami surplus sebesar US \$ 1.698,46 juta dan pada tahun 1999 surplus meningkat menjadi US \$ 1.906,64 juta. Pada Tahun 2005 meningkat lagi menjadi US \$ 3.385.069 juta. Data ini menunjukkan bahwa secara rata-rata dalam kurun waktu 1994-1999 dan 1999- 2005, tingkat pertumbuhan surplus perdagangan rata-rata sebesar 2,34 % dan 11,50 % per tahun (lihat Tabel-5).

Tabel -5
Perkembangan Nilai Ekspor, Impor Dan Tingkat Pertumbuhan Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Ekspor (\$000)	Impor (\$000)	Tingkat pertumbuhan (% / Tahun)			
			Ekspor		Impor	
			1994-1999	1999-2005	1994-1999	1999-2005
1994	2.689.339	990.880	-0,62	10,22	-6,72	6,38
1999	2.606.216	699.577				
2005	4.563.075	1.178.006				

Sumber : BPS Sumatera Utara Tahun 1994, 1999, 2005

Pada tahun 2006, nilai ekspor meningkat menjadi US\$ 5.523.900 dan impor juga meningkat menjadi US \$ 1.456.987 atau surplus sebesar US \$ 4.067.806. Angka surplus ini lebih besar 20 % dari surplus tahun 2005.

Secara agregat, nilai ekspor Sumatera Utara dalam periode 1994-2006 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,16 % dan nilai impor mengalami pertumbuhan 3,26 % per tahun. Komoditas ekspor yang menonjol ialah hasil-hasil perkebunan yaitu minyak sawit (21,99 %), karet/barang-barang dari karet (20,14 %), kayu gergajian dan olahan (11,22 %), perikanan yaitu udang segar (6,03 %), dan barang-barang aluminium (7,41 %).

Pada tahun 1999 dan 2005, jenis komoditas ekspor masih belum banyak berubah. Pada tahun 2005, nilai ekspor minyak sawit meningkat tajam menjadi 37,53 %, karet dan barang-barang karet turun menjadi 17,79 %, kayu olahan dan kayu lapis turun menjadi 6,04 %, barang-barang aluminium turun menjadi 6,24 % dan udang segar/beku turun menjadi 3,12 %. Gambaran ini menunjukkan bahwa dalam periode 1994-2005 ekspor Sumatera Utara semakin terkonsentrasi pada komoditi minyak sawit walaupun keragaman jenis komoditas semakin luas.

Pada sisi impor, komoditi utama pada tahun 1994 ialah barang-barang modal yaitu mesin-mesin dan alat angkut (38,56 %), menyusul barang-barang konsumsi (31,74 %) dan bahan baku industri (10,10 %). Seperti halnya pada sisi ekspor, jenis-jenis komoditas impor hingga tahun 2005 masih tidak mengalami perubahan yang berarti kecuali pada komoditas dominan yaitu berturut-turut bahan kimia (25,84 %), bahan makanan (18,34 %), barang-barang modal seperti mesin-mesin dan alat angkut (16,71 %), dan bahan baku industri (15,38 %).

Sumberdaya Alam

Sumatera Utara termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang kaya dengan sumberdaya alam. Lahan-lahan pertanian hortikultura yang subur dan cukup luas di Kawasan Dataran Tinggi, perkebunan di di Kawasan Pantai Timur dan berbagai bahan tambang di wilayah Tapanuli. Bahan-bahan tambang yang potensial untuk diolah menjadi potensi ekonomi Sumatera Utara ialah batu kapur, belerang, zeolit, gambut, emas dan batu bara. Disamping itu, Sumatera Utara juga kaya dengan cadangan sumberdaya energi. Panas bumi (geothermal) dengan total potensi 1.000 MW terdapat di daerah Sarulla dan air terjun di Sipansipahoras Tapanuli Utara. Beberapa sungai dan air terjun dapat dimanfaatkan sebagai sumberdaya energi mikrohidro. Sumberdaya air terjun Sigura-gura Asahan telah lama dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik kapasitas sekitar 600 MW.

Hingga saat ini potensi bahan-bahan tambang dan sumberdaya energi masih sedikit yang tergali. Salah satu masalah sebagai faktor penyebab rendahnya perhatian terhadap investasi di sektor pertambangan tersebut ialah belum tersedianya data akurat dan lengkap mengenai potensi ekonomi yang siap untuk dikaji oleh calon-calon investor.

Eksplorasi yang sudah cukup marak ialah pada bahan galian golongan C antara lain pasir, belerang, batu kapur dan dolomit yang dilakukan secara intensif oleh usaha-usaha kecil dan menengah.

Sumberdaya perikanan juga merupakan potensi besar dalam ekonomi Sumatera Utara. Beragam jenis ikan laut hasil penangkapan di Pantai Timur dan Pantai Barat Sumatera Utara telah merupakan komoditi ekspor tradisional daerah ini. Masalah besar dalam sektor perikanan laut ialah maraknya kapal-kapal penangkap ikan asing yang beroperasi tanpa ijin (*illegal fishing*) di perairan Sumatera Utara sehubungan dengan ketidakmampuan daerah ini mengamankan zona perikanan laut yang dimilikinya.

Pertanian hortikultura yang dilahan-lahan subur dan luas di kawasan pegunungan (antara lain Karo, Simalungun, Dairi, Tapanuli Utara) pernah mengisi 60 % kebutuhan pasar regional Asean khususnya pasar Malaysia dan Singapore. Tetapi, sehubungan dengan perubahan paradigma pasar kearah komoditi produksi *nature farming system* yang tidak segera direspons oleh sistem pertanian hortikultura Sumatera Utara maka pangsa pasar Sumatera Utara kini telah direbut oleh Cina, Thailand dan Australia dan menyisakan bagian Sumatera Utara hanya sebesar 5 %.

Sumatera Utara juga memiliki areal hutan yang cukup luas. Menurut data tahun 2005, luas hutan di Sumatera Utara ialah 3.742.120 ha (sesuai SK Menteri Kehutanan No.44/Menhut-II/2005) yang terdiri dari Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam seluas 477.070 Ha, Hutan Lindung seluas 1.297.300 ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 879.270 Ha, Hutan Produksi Tetap seluas 1.035.690 ha dan Hutan Konversi seluas 52.760 Ha. Sejak tahun 1971, sektor kehutanan telah ditempatkan hutan termasuk hutan alam sebagai salah satu sumber tenaga penggerak ekonomi Sumatera Utara. Misalnya pada tahun 1988/1989, ekspor kayu dan hasil-hasil hutan lainnya menghasilkan devisa senilai US \$ 1.650.136,96 dari kayu dan US \$ 215.760 dari non-kayu.

Pada tahun 2000, jumlah pemasukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari sektor kehutanan mencapai Rp 17.300. 389.007 dan dana reboisasi sebesar US \$ 4.171.795 dan Rp 2.036.441.719. Namun, pada tahun 2005 mengalami penurunan drastis sehubungan dengan merosotnya produksi akibat kerusakan hutan yang ditimbulkan oleh kegiatan eksploitasi yang semakin tak terkendali. Menurut data tahun 2001, luas kawasan hutan dan lahan di Sumatera Utara yang perlu direhabilitasi mencapai 4.296.267 ha yang terdiri dari lahan hutan seluas 2.614.814 ha dan sisanya lahan diluar kawasan hutan.

Kawasan Agropolitan

Sejak tahun 2002 atas dasar Nota Kesepakatan 5 bupati se Wilayah Dataran Tinggi yaitu Karo, Dairi, Simalungun, Tapanuli Utara dan Toba Samosir, pada tanggal 28 September 2002, Sumatera Utara telah memiliki sebuah kawasan agropolitan yang disebut Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan. Nota Kesepakatan tentang pembentukan kawasan agropolitan tersebut kemudian diperkuat oleh Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 050/1467.K tanggal 3 Desember 2002 dan disusul oleh Peraturan Gubernur No. 050/286.K tentang Pembentukan Badan Kordinasi dan Tim Teknis Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan tanggal 26 April 2005.

Agropolitan adalah suatu pendekatan pembangunan kawasan pedesaan (*rural development*) yang menekankan pembangunan 'perkotaan' di pedesaan, dengan misi memoderisasi sistem dan usaha agribisnis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan di kawasan agribisnis tersebut menuju sistem dan usaha agribisnis berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi dalam kawasan agropolitan.

Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan yang merupakan kawasan agropolitan pertama di Sumatera Utara mencakup areal 19.162,25 km² yaitu 38 % dari luas wilayah Sumatera Utara yang mencakup 79 kecamatan dan 25,3 % jumlah penduduk Sumatera Utara. Secara umum, tujuan dari pembentukan kawasan agribisnis tersebut ialah (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani melalui peningkatan nilai tambah dan diversifikasi produk, (2) memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha secara berkesinambungan di pedesaan, (3) membangun / menyediakan sentra agribisnis di pedesaan sekali gus melestarikan fungsi hidrologis dataran tinggi dan menunjang aneka produk wisata agro, (4) meningkatkan daya saing produk-produk agribisnis baik pada tingkat nasional maupun internasional, serta (5) mengurangi arus urbanisasi (*brain drain dan capital drain*).

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan secara bersama oleh kelima kabupaten pendiri (kini setelah pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara dan Dairi menjadi 8 kabupaten) telah diidentifikasi sebanyak 16 strategi yang diadopsi secara bersama untuk menjamin keberhasilan kawasan agropolitan tersebut. Strategi-strategi tersebut meliputi:

- a. Pengembangan dan pengorganisasian ruang kawasan agropolitan
- b. Pengembangan jaringan jalan dan transportasi
- c. Pengembangan jaringan listrik
- d. Pengembangan jaringan komunikasi / telepon
- e. Pengembangan jaringan irigasi

- f. Pengembangan teknologi agribisnis
- g. Pengembangan penyuluhan agribisnis dan sumberdaya manusia
- h. Pengembangan jaringan usaha dan jaringan pembibitan
- i. Pengembangan industri dan jaringan agrokimia
- j. Pengembangan jaringan pasar dan promosi
- k. Pengembangan kelembagaan dan organisasi petani
- l. Pengembangan lembaga pembiayaan agribisnis
- m. Pengembangan jaringan kerjasama antar pengusaha agribisnis
- n. Pengembangan industri alat dan mesin pertanian
- o. Pengembangan industri hilir
- p. Pengembangan usaha tani komoditi

Berbagai komoditas unggulan dalam subsektor tanaman pangan /palawija dan hortikultura telah diidentifikasi pada masing-masing kabupaten untuk disinergikan antara kegiatan produksi, pengembangan dan pemasarannya untuk kepentingan bersama antar kabupaten tersebut.

Melihat luasnya cakupan kesepakatan kerjasama pembangunan antar kedelapan kabupaten tersebut, diperkirakan akan terjadi percepatan pembangunan sekaligus modernisasi wilayah pedesaan di kawasan agropolitan secara bersama-sama. Oleh karena itu strategi dan kebijakan pembangunan jangka panjang Sumatera Utara perlu diintegrasikan dengan strategi dan kebijakan pembangunan Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan. Hal telah dirumuskan dengan jelas dalam Master Plan Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan.

Kawasan Agromarinpolititan

Provinsi Sumatera Utara memiliki 2 wilayah pesisir pantai yang berbeda klimatologi dan karekteristiknya yaitu (1). wilayah Pantai Barat dan (2) wilayah Pantai Timur. Dari total luas wilayah Provinsi Sumatera Utara (meliputi daratan dan lautan) yang mencapai 181.680 km², sekitar 60,5 % adalah merupakan luas lautan atau 110.000 km², sementara luas daratannya hanya 71.680 Km² atau sekitar 39,5 %. Sementara total garis pantai yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara adalah sekitar 1.300 km dengan rincian sebagai berikut: panjang garis pantai wilayah Pantai Timur 545 km, garis pantai wilayah Pantai Barat 375 Km dan garis pantai wilayah Pantai Pulau Nias 380 km.

Disamping itu, jumlah pulau yang telah diidentifikasi di wilayah Provinsi Sumatera Utara ialah sebanyak 419 pulau dengan rincian sebanyak 237 pulau telah memiliki nama dan sebanyak 182 belum memiliki nama. Dengan kondisi geografis sebagaimana digambarkan di atas, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memiliki komitmen untuk mengembangkan potensi kelautan di seluruh wilayah panati tersebut melalui pengembangan Kawasan Agromarinpolititan. Pengembangan kawasan Agromarinpolititan tersebut telah dicanangkan oleh Presiden RI pada tgl 13 Juli 2006 di Medan.

Potensi sumberdaya ikan laut di wilayah Pantai Barat yang meliputi Kabupaten Mandailing Natal, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Nias dan Nias Selatan mencapai 1.076.960 ton/tahun. Kendati potensi ikan laut di wilayah ini cukup tinggi, tingkat pemanfaatan relatif masih sangat rendah yaitu baru mencapai 94.703 ton atau 8,79% dari total potensi. Potensi sumberdaya ikan laut di wilayah Pantai Timur relatif jauh lebih rendah dibandingkan dengan wilayah Pantai Barat yaitu hanya sebesar 276.030 ton/tahun. Tetapi tingkat pemanfaatan telah mencapai 250.489 ton atau 90,75%. Jenis ikan unggulan di wilayah ini adalah ikan kakap, kerapu, teri, kembung, tenggiri, tembang, japuh, pari, cakalang, dan lain-lain.

Master Plan Agromarinpolitikan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan pulau terluar di Sumatera Utara telah selesai disusun oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2007. Master Plan ini akan menjadi rujukan bagi pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam mengimplementasikan program/kegiatan pembangunan di daerah masing-masing.

b. Permasalahan

(1). Dampak krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 masih sangat terasa hingga saat ini. Investasi di semua sektor masih sangat rendah karena kepercayaan investor masih belum pulih sungguhpun secara berangsur telah terlihat perbaikan-perbaikan.

(2). Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara khususnya sejak krisis ekonomi menimpa daerah ini masih terlalu rendah yaitu rata-rata sebesar 4,08 % pertahun. Rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi berdampak negatif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, ketersediaan lapangan kerja, pembentukan modal melalui tabungan dan lain-lain.

(3). Sejalan dengan rendahnya pertumbuhan ekonomi, pergeseran struktur ekonomi yang seyogianya bergerak kearah dominasi sektor-sektor penghasil nilai tambah tinggi seperti industri manufaktur dan sektor jasa-jasa (perdagangan, transportasi, keuangan dan keparwisataaan) masih menurun. Jika dalam periode 1994 kontribusi sektor pertanian dan industri masing-masing sebesar 29,07 % dan 23,17 % maka pada tahun 1999 kontribusi sektor pertanian semakin meningkat yaitu menjadi 33,08 % dan sektor industri menurun menjadi 21,96 % dan pada tahun 2006 masing-masing menjadi 23,44 % dan 25,97%. Penurunan kontribusi sektor perdagangan juga terus terjadi dalam periode 1994-2005.

(4). Kesenjangan kemajuan ekonomi antara Kawasan Pantai Barat, Kawasan Dataran Tinggi dan Kawasan Pantai Timur masih tetap lebar walaupun berbagai strategi investasi telah lama dikembangkan. Pembangunan infrastruktur yang dinilai paling cepat

merangsang pertumbuhan sektor riil di Kawasan Pantai Barat membutuhkan dana yang sangat besar (sangat sulit dipenuhi) sehubungan dengan kondisi topografi wilayah yang cukup berat.

(5). Produktivitas dan kualitas produk /jasa yang diproduksi sektor-sektor riil khususnya pertanian (pertanian rakyat dan perkebunan rakyat), dan industri pengolahan masih memiliki daya saing yang rendah dipasar regional dan global akibat berbagai faktor yang tetap belum tuntas ditangani, antara lain yaitu: faktor ekonomi biaya tinggi/KKN, ketidakmampuan sektor riil khususnya usaha kecil/menengah menghasilkan produk-produk memenuhi standar mutu, kemasan dan ramah lingkungan.

(6). Laju peningkatan produksi pangan yang lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan kebutuhan masyarakat tidak terlepas dari maraknya peralihan fungsi lahan pertanian pangan termasuk lahan sawah beririgasi menjadi lahan untuk tanaman keras. Peralihan fungsi lahan yang terus berlanjut hingga kini sebagian besar dipicu oleh ketidakpastian pendapatan para petani yang mengusahakan lahan mereka untuk komoditas tanaman pangan termasuk padi.

(7). Sistem pertanian khususnya dalam subsektor hortikultura yang masih didominasi oleh teknologi pertanian yang menggunakan bahan-bahan kimia dan telah lama tidak populer di pasar global (karena merusak struktur tanah dan beresiko pada kesehatan) masih belum memperlihatkan tanda-tanda perubahan yang berarti. Perubahan paradigma pertanian kearah *nature-farming system* yang ramah lingkungan masih menghadapi kendala besar.

(8). Kesenjangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan populasi ternak telah menunjukkan defisit daging dan hasil ternak lainnya yang mengganggu ketersediaan protein hewani yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemenuhan kebutuhan protein hewani ini sangat penting karena dia tak dapat digantikan oleh sumber-sumber protein lainnya seperti protein tumbuhan dan lain-lain.

(9). Perkembangan sektor industri masih belum mampu merangsang tumbuhnya agroindustri /agribisnis karena rendahnya jumlah dan kapasitas industri yang bergerak dalam pembuatan mesin-mesin pengolahan input dan hasil-hasil pertanian (pasca panen).

(10). Pembangunan wilayah berdasarkan konsep kawasan agropolitan dan agromarinopolitan walaupun bukan barang baru, di Sumatera Utara masih dalam taraf sangat awal dalam arti sebagian besar kabupaten yang terlibat masih belum sepenuhnya memahami sendi-sendi perencanaan dan implementasi terlebih mengintegrasikan rencana dan program masing-masing kabupaten dalam konsep agropolitan. Problem ini

akan serius karena sejak UU No 22/1999 yang memberikan hak otonomi dalam pelaksanaan pembangunan di kabupaten /kota diberlakukan konsep keterpaduan pembangunan antar kabupaten /kota sudah sangat terpinggirkan.

(11). Master plan Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan yang telah diterima oleh seluruh kabupaten yang tercakup (Karo, Simalungun, Dairi, Pakpak Bharat, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Samosir dan Tapanuli Utara) membutuhkan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menggerakkan ke delapan pemerintah kabupaten agar masing-masing konsekuen dan konsisten menterjemahkannya kedalam rencana tahunan. Hal yang sama juga berlaku pada Kawasan Agromarinpolitan.

c. Capaian /Keberhasilan

(1) Kondisi perekonomian Sumatera Utara sebelum krisis ekonomi selalu lebih baik dibandingkan dengan tingkat nasional baik ditinjau dari tingkat pertumbuhan, pendapatan perkapita dan pemerataan pendapatan. Pasca krisis ekonomi, kendati hingga saat ini belum pulih kondisi perekonomian Sumatera Utara tidak pernah lumpuh karena sektor pertanian yang sebagian besar merupakan komoditi ekspor mendapat peluang besar karena depresiasi rupiah yang sangat tinggi.

(2) Hingga saat ini Sumatera Utara termasuk salah satu daerah penghasil komoditas perkebunan terbesar di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit, karet, dan kakao yang semuanya menghasilkan komoditi ekspor mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Khusus pada perkebunan kelapa sawit, investor asing telah mengambil bagian yang cukup besar dalam peningkatan kontribusi perkebunan dalam pendapatan bruto daerah.

(3) Cadangan sumberdaya energi telah mulai dieksploitasi /dimanfaatkan satu per satu untuk menekan defisit penggunaan tenaga listrik daerah yaitu pembangunan PLTA Sipansipahoras, geotermal di Tapanuli Utara dan lain-lain. Sumberdaya energi batubara yang depositnya sangat besar disamping air terjun Sigura-gura adalah juga merupakan peluang besar bagi Sumatera Utara untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di masa datang.

2). Analisis proyeksi

Proyeksi Peluang

(1). Letak geografis Sumatera Utara yang dekat dengan Malaysia dan Singapura yang merupakan salah satu pusat ekonomi dunia mestinya mampu mengambil manfaat

ekonomi yang cukup besar dari situasi tersebut apabila serius dalam meningkatkan kualitas SDM untuk menjalin kemitraan yang setara dengan pebisnis internasional.

(2) Kerjasama regional IMT-GT yang semakin intensif melakukan pertemuan bisnis dan telah berpengalaman selama lebih dari 10 tahun merupakan peluang besar dalam membangun kolaborasi bisnis dengan mitra bisnis dari Malaysia dan Thailand untuk meningkatkan daya saing global.

(3) Sumatera Utara hingga saat ini masih tetap berfungsi sebagai pintu gerbang memasuki kawasan Sumatera bagian Utara karena di dukung oleh pelabuhan Belawan dan Bandara Polonia yang merupakan pelabuhan terbesar di kawasan tersebut.

(4) Danau Toba dan Dataran Tinggi Bukit Barisan yang telah dikenal sebagai daerah tujuan wisata internasional memiliki potensi besar yang untuk dikenal sebagai daerah tujuan utama apabila sarana dan prasarana kepariwisataan dikemas menurut standar internasional.

(5) Usaha perkebunan dan pertanian rakyat yang menghasilkan beragam jenis komoditas seperti CPO, karet, kakao, kopi, sayur-sayuran dan buah-buahan sangat potensial untuk mendukung investasi pada industri hilir untuk menghasilkan produk-produk industri standar internasional.

(6) Dengan potensi lahan perkebunan dan lahan / padang penggembalaan yang belum dimanfaatkan di Sumatera Utara ditambah lagi dengan banyaknya limbah pertanian / perkebunan seperti pelepah daun kelapa sawit dan lain-lain yang dapat diolah menjadi pakan ternak maka potensi peningkatan produksi ternak dan hasil peternakan misalnya di Kabupaten Simalungun, Tapanuli Selatan dan lain-lain sangat potensial dan dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan Sumatera Utara.

(7) Permintaan dunia terhadap kayu dan hasil-hasil hutan lainnya akan terus meningkat. Sumatera Utara dengan luas areal hutan produksi dan hutan konversi yang cukup luas dan produksi yang sangat beragam akan tetap potensial menjadi salah satu sumber tenaga penggerak ekonomi daerah apabila pengelolaan hutan benar-benar dilakukan secara profesional untuk menjaga sustainabilitas produksi hutan dan kelestarian lingkungan. Disamping itu, mengingat demikian banyak masyarakat kelompok bawah yang kehidupan mereka melekat pada sektor kehutan maka pembangunan sektor ini akan sekaligus mengentaskan kemiskinan penduduk dalam jumlah yang relatif besar.

Proyeksi Ancaman

(1) Peningkatan harga bahan bakar minyak sehubungan dengan menipisnya cadangan sumberdaya energi fosil dunia akan terus berlanjut dengan tingkat kenaikan yang tidak terduga. Bila Indonesia tidak mampu menyediakan sumberdaya energi alternatif yang memadai maka faktor kenaikan harga bahan bakar akan menjadi salah satu ancaman paling serius terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Sumatera Utara.

(2) Perkembangan ekonomi negara-negara tetangga terutama Cina, India, Vietnam, Malaysia dan Thailand semakin mengancam pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara karena arus modal asing lebih tertarik memasuki negara-negara tersebut karena faktor kemudahan investasi dan resiko bisnis yang lebih rendah.

(3) Daya saing komoditas pertanian Sumatera Utara semakin rendah dipasar regional dan internasional karena masih sulitnya produsen Sumatera Utara memenuhi standar mutu yang diinginkan oleh pasar yang dinamis pada efisiensi dan produktivitas yang tinggi.

(4) Defisit daging ternak sebagai sumber utama protein hewani bagi masyarakat Sumatera Utara akan menjadi salah satu ancaman bagi kesehatan masyarakat dan mengganggu pertumbuhan kecerdasan anak-anak yang pada dasarnya sangat penting diperhatikan sejak dini. Kekurangan persediaan daging ternak juga mendorong peningkatan arus daging ternak illegal dari luar negeri yang dalam banyak kasus telah ditemukan tidak memenuhi persyaratan / standar higienis yang ditetapkan oleh pemerintah.

(5) Lemahnya kemampuan para eksekutif bisnis dan aparat pemerintah yang menangani perekonomian dalam menggunakan teknologi informasi dalam bisnis (e-business) / membangun jejaring bisnis merupakan ancaman yang paling serius dalam merebut pasar global. Kemampuan akses terhadap informasi global baik untuk tujuan pengembangan strategi pemasaran maupun menjalin kemitraan melalui pembangunan jaringan bisnis dalam semua bidang dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi telah diakui dan dibuktikan sebagai salah satu kekuatan utama dalam membangun daya saing.

(6) Pesatnya kemajuan sistem dan teknologi pertanian Cina khususnya dalam sub-sektor hortikultura telah menggeser pangsa pasar komoditi sayur-sayuran Sumatera Utara di pasar luar negeri khususnya Singapura dan Malaysia.

(7) Faktor kelangkaan pupuk yang sudah cukup lama terjadi serta maraknya pupuk palsu yang secara nyata telah menurunkan mutu dan produktivitas pertanian rakyat akan masih

terus terjadi sehubungan dengan semakin lemahnya kemampuan industri memproduksi pupuk untuk mengikuti pertumbuhan permintaan.

(8) Produksi hasil-hasil hutan khususnya kayu untuk bahan konstruksi akan semakin langka karena *illegal logging* masih sulit ditindak dan penghutanan kembali kawasan hutan yang gundul /rusak berjalan dengan sangat lambat.

Proyeksi Permasalahan

(1) Masih sulitnya masyarakat tani khususnya pengasil komoditas pangan merombak paradigma pertanian yang individual dan *product-oriented* menjadi *corporate nature farming* telah semakin dirasakan sebagai penghambat utama masuknya komoditas Sumatera Utara ke pasar-pasar luar negeri.

(2) Peranan lembaga-lembaga riset dan pengembangan masih sangat sedikit dalam memberikan kontribusi dalam perbaikan daya saing sektor riil khususnya sektor pertanian dan industri di pasar luar negeri. Langkanya tenaga-tenaga peneliti terampil dan rendahnya anggaran penelitian yang tersedia membuat lembaga-lembaga riset dan pengembangan hanya mampu melakukan kegiatan penelitian rutin.

(3) Langkanya barang-barang modal khususnya mesin-mesin pengolahan hasil-hasil pertanian sangat menghambat tumbuhnya *agro-based industries* yang sangat dibutuhkan dalam menjamin stabilitas pemasaran komoditas hasil pertanian rakyat.

(4) Pasokan energi listrik yang telah lama mengalami kemerosotan merupakan salah satu masalah serius dalam peningkatan kontribusi sektor industri dan jasa-jasa dalam perekonomian Sumatera Utara.

Proyeksi Keberhasilan

(1) Belajar dari pengalaman pahit selama krisis ekonomi dan tekad pemerintah untuk menggerakkan sumberdaya produktif masyarakat melalui penegakan hukum dan pemberantasan penyakit-penyakit sosial khususnya premanisme maka Sumatera Utara akan segera menikmati iklim investasi kondusif.

(2) Usaha Kecil dan Menengah sejak krisis moneter banyak menghadapi kesulitan bahkan berhenti beroperasi akan mengalami pertumbuhan yang seperti keadaan sebelum krisis moneter sehubungan dengan kondisi lingkungan bisnis yang semakin kondusif.

(3) Sumatera Utara akan menjadi salah satu model sistem pembangunan ekonomi wilayah agropolitan. Kuatnya dukungan pemerintah pusat dan kuatnya rasa kebersamaan delapan pemerintah kabupaten dalam mensinergikan rencana pembangunan kawasan agropolitan dan rencana pembangunan masing-masing kabupaten akan memberi dampak *multiplier effect* kepada setiap kabupaten khususnya dalam pembangunan prasarana dan komoditas unggulan.

(4) Industri hilir dari komoditas pertanian akan mengalami kemajuan karena kemajuan pembangunan kawasan agropolitan sangat mendukung kemajuan *agro-based industry*.

2.1.4 Sosial Budaya dan Politik

1). Kondisi Umum Sosial Budaya dan Politik

a. Kondisi Masa Lampau

Aspek sosial budaya yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan antara lain yang utama ialah pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, kemiskinan, agama, kriminalisme.

Pendidikan

Pada tingkat pendidikan sekolah dasar, jumlah murid yang membutuhkan pelayanan pada tahun 1994 adalah sebanyak 1.863.609 orang. Jumlah sekolah yang tersedia dan guru yang melayani masing-masing sebanyak 9.365 unit dan 79.597 orang. Pada tahun 1999, jumlah murid mengalami penurunan menjadi 1.788.060 dan jumlah sekolah dan guru masing-masing sebanyak 9.248 unit dan 74.514 orang. Selanjutnya, pada tahun 2005 jumlah murid menurun menjadi 1.796.775 orang dengan jumlah sekolah 9.594 unit dan jumlah guru 79.444 orang seperti terlihat dalam Tabel-6.

Tabel 6
Perkembangan Jumlah Murid, Guru dan Sekolah pada Pendidikan Sekolah Dasar di Sumatera Utara.

Tahun	Jumlah			Rasio Guru/ Murid	Kapasitas Rata-rata Sekolah
	Murid (Orang)	Guru (Orang)	Sekolah (Unit)		
1994	1.863.609	79.597	9.365	23.4 : 1	198
1999	1.788.060	74.514	9.248	30.0 ; 1	193
2004	1.818.071	76.327	9.436	23.8 : 1	193
2006	1.814.579	82.647	9.691	22.6 : 1	187

Sumber: Sumatera Utara Dalam angka 1994,1999, 2004, dan 2006

Ditinjau dari perkembangan jumlah murid, dalam periode 1994-1999 tingkat pertumbuhan rata-rata jumlah murid sekolah dasar adalah minus yaitu -0,82 % per tahun dan tingkat pertumbuhan jumlah sekolah dan guru masing-masing juga negatif yaitu sebesar -0,25 % dan -0,13 % per tahun. Dalam periode 1999-2006, tingkat pertumbuhan jumlah murid, sekolah dan guru masing-masing sebesar 0,33 %, 0,40 % dan 0,48 %.

Rasio jumlah murid dan sekolah dan rasio jumlah murid dan guru pada tahun 1994 ialah 198 murid per sekolah dan 23,4 murid per orang guru. Pada tahun 1999 rasio tersebut turun menjadi 193 murid per sekolah dan 30 murid per orang guru dan pada tahun 2006 menjadi 187 murid per sekolah dan 22,6 murid per guru. Analisis rasio-rasio tersebut menjelaskan bahwa hampir tidak terjadi perubahan pada rasio permintaan jasa pelayanan sekolah terhadap jumlah sarana pelayanan sekolah dan guru.

Ditinjau dari sudut pertumbuhan jumlah penduduk pada usia sekolah dasar yang baik pada periode 1994-1999 maupun pada periode 1999-2006 yang juga cukup rendah maka rendahnya permintaan pelayanan jasa sekolah menjadi cukup beralasan. Pada tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum perkembangan jumlah murid, sekolah dan guru dalam tahun 1994, 1999, 2004 dan 2006 adalah seperti terlihat pada Tabel-7.

Tabel-6 menunjukkan bahwa pada tahun 1994, rasio jumlah guru terhadap murid adalah 1: 17,13 dan kapasitas rata-rata sekolah ialah 326 orang murid. Pada tahun 1999, rasio tersebut meningkat tajam yaitu 1 : 31,01 dan kapasitas rata-rata sekolah juga meningkat yaitu 456 orang murid. Tetapi pada tahun 2006 rasio guru terhadap murid menurun kembali menjadi hanya 1 : 15,13 dan kapasitas rata-rata sekolah juga turun yaitu hanya 306 orang.

Tabel -7
Perkembangan Jumlah Murid, Guru dan Sekolah pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sumatera Utara

Tahun	Jumlah			Rasio Guru/Murid	Kapasitas Rata-rata Sekolah
	Murid (Orang)	Guru (Orang)	Sekolah (Unit)		
1994	554.652	32.365	1.699	1: 17,13	326,45
1999	778.513	25.104	1.705	1: 31,01	456,61
2004	724.277	33.134	1.876	1: 21,86	386,07
2006	538.039	37.030	1.844	1: 15,13	306,77

Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka, 1994,1999, 2004 dan 2006

Jika ditinjau dari tingkat pertumbuhan jumlah murid, guru dan sekolah dalam periode 1994-1999, terlihat bahwa jumlah murid SLTP meningkat rata-rata sebesar 7,02 % per tahun tetapi jumlah guru malah mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu -4,95 % per tahun. Berbeda halnya dengan periode 1994-1999, dalam periode 1999-2004, jumlah murid menurun dan mempunyai pertumbuhan -1,43 %. Dalam periode 1999-2004, jumlah murid meningkat rata-rata hanya sebesar 1,43 % per tahun dan sebaliknya jumlah guru meningkat rata-rata sebesar 5,70 % per tahun.

Pola perkembangan jumlah murid, guru dan jumlah sekolah pada pendidikan tingkat SMU di Sumatera Utara terlihat sangat mirip dengan pola yang terjadi di pendidikan SLTP seperti terlihat dalam Tabel-8. Pada tahun 1994, rasio guru terhadap murid adalah 1: 12,2 dan kapasitas rata-rata sekolah 296 orang murid. Pada tahun 1999, rasio guru terhadap murid meningkat menjadi 1 : 14,9 dan kapasitas rata-rata sekolah meningkat tajam yaitu 396 orang murid. Selanjutnya pada tahun 2004, rasio jumlah murid terhadap guru meningkat tajam menjadi 1: 19,4 akibat jumlah guru melorot sedangkan kapasitas rata-rata sekolah turun menjadi 343 orang murid, dan tahun 2006 mencapai 375 orang.

Ditinjau dari tingkat pertumbuhan jumlah murid, guru dan sekolah terlihat bahwa dalam periode 1994-1999, jumlah murid tumbuh rata-rata sebesar 4,50 % per tahun dan jumlah guru mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,15 % per tahun. Tetapi, jumlah sekolah mengalami pertumbuhan negatif yaitu -1,41 % per tahun.

Tabel-8
Perkembangan Jumlah Murid, Guru dan Sekolah pada Pendidikan Sekolah Menengah Umum di Sumatera Utara

Tahun	Jumlah			Rasio Guru/Murid	Kapasitas Rata-rata Sekolah
	Murid (Orang)	Guru (Orang)	Sekolah (Unit)		
1994	198.154	16.242	670	1: 12,2	295,7
1999	246.929	16.591	624	1: 14,9	395,7
2004	289.157	14.942	843	1:19,4	343,0
2006	419.143	31.042	1.237	1: 14,4	374,8

Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka 1994.1999, 2004 dan 2006

Pada periode 1999-2006, pertumbuhan rata-rata jumlah murid adalah 3,20 %, sedangkan jumlah guru mempunyai tingkat pertumbuhan negatif yaitu -2,07 % per tahun. Pada sisi jumlah sekolah terlihat pertumbuhan yang cukup besar yaitu rata-rata 6,20 % per tahun.

Kesehatan

Kondisi dan perkembangan kesehatan di Sumatera Utara dalam periode 1994-2006 perlu ditinjau dari perkembangan sarana kesehatan yang tersedia dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Mengingat luasnya sarana kesehatan yang perlu dianalisis maka untuk menghindari kerumitan maka sarana kesehatan yang dianalisis dibagi atas kelompok yaitu: ketersediaan unit pelayanan pada tahun 2006 (Puskesmas sebanyak 449 unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 1.937 unit, BPU sebanyak 888 unit, Posyandu sebanyak 13.001 unit), ketersediaan dokter pada tahun 2006 (Dokter Umum sebanyak 1.328 orang, Dokter Gigi sebanyak 510 orang, Dokter Spesialis sebanyak 423 orang) dan ketersediaan tenaga keperawatan pada tahun 2006 (bidan sebanyak 6.410 orang, perawat sebanyak 8.368 orang). Selanjutnya, dalam analisis dibedakan wilayah pedesaan dan perkotaan untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan pelayanan kesehatan antar desa dan kota. Dengan demikian, rencana pembangunan kesehatan akan dapat lebih diarahkan kepada pemerataan.

Tabel -9
Perkembangan Sarana Kesehatan di Sumatera Utara

Uraian	1994			1999			2004			2005		
	Desa	Kota	Total	Desa	Kota	Total	Desa	Kota	Total	Desa	Kota	Total
Pusk.	14.943	3.061	18.004	16.582	3.015	19.597	14.865	2.763	17.628	351	86	437
Dokter	31	72	103	91	435	526	1.186	936	2.122	1.400	931	2.331
Bidan	9.336	4.927	14.263	7.773	8.538	16.311	8.629	6.227	14.856	9.947	3989	13.936

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka 1994,1999,2004,dan 2005

Keluarga Berencana

Perkembangan keluarga berencana dalam periode 1994-2005 terlihat cukup mengembirakan seperti terlihat pada Tabel-10. Walaupun tingkat pertumbuhan jumlah pasangan usia subur dalam periode 1994-1999 relatif masih cukup tinggi yaitu rata-rata 3,19 % per tahun, dalam periode 1999-2005 telah turun drastis menjadi hanya 1,09 % per tahun. Penurunan jumlah pasangan usia subur ini membuat jumlah akseptor baru juga mengalami penurunan yaitu rata-rata - 5,69 % per tahun.

Peningkatan jumlah akseptor KB tidak terlepas dari peningkatan jumlah sarana pelayanan keluarga berencana seperti klinik KB, tenaga perawat dan lain.lain. Data BPS menunjukkan bahwa dalam periode 1999-2005, jumlah klinik KB meningkat rata-rata sebesar 1,21 % per tahun.

Tabel-10
Perkembangan Jumlah Pasangan Usia Subur, Akseptor KB dan Jumlah Klinik KB di Sumatera Utara

Uraian	1994	1999	2004	2006	Tkt Pertumbuhan (%/th)	
					1994-1999	1999-2006
PUS	1.446.346	1.692.568	1.786.746	1.914.002	3,19	1,09
Akseptor	996.466	1.132.241	1.123.819	1.187.815	2,59	-0,15
Aksept. Baru	292.837	257.019	191.747	231.310	-2,57	-5,69
Jlh Klinik KB	-	1.017	1.080	1.101	-	1,21

Sumber :BPS Sumatera Utara tahun 1994, 1999, 2004 dan 2006

Keluarga Miskin

Kemiskinan masih tetap menyelimuti sebagian masyarakat Sumatera Utara sebagaimana juga halnya di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Data statistik tahun 2005 telah pula menunjukkan bahwa Sumatera Utara yang pada masa lalu dalam banyak indikator selalu berada diatas rata-rata nasional, kini sudah menjadi salah satu peta kemiskinan di Indonesia. Data penduduk miskin dalam tahun 1994-2004 adalah seperti terlihat dalam Tabel-11.

Secara agregat jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara pada tahun 1994 adalah 11,74 % dari jumlah penduduk. Jika dibandingkan antara kota dan desa maka persentase penduduk miskin di pedesaan jauh lebih tinggi. Pada tahun 1999 dan 2004 persentase jumlah penduduk miskin terus meningkat yaitu masing-masing 14,21 % dan 14,93 %.

Tabel-11
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin Pada Tahun				Tkt Pertumbuhan (%/Th)	
	1994	1999	2004	2005	1994-1999	1999-2004
Kota	494.479	711.083	633.400	*	7,54	-2,30
Desa	837.152	963.395	1.166.700	*	2,85	3,90
Total	1.331.631	1.674.478	1.800.100	1.760.228	4,69	1,46
Jlh Penduduk	11.145.300	11.955.400	12.123.360	12.326.678	1,41	0,28
% Miskin	11,72	14,21	14,93	15,66	-	-

Sumber : BPS Sumatera Utara 1994, 1999, 2004 dan 2005

** Data tidak tersedia.*

Secara agregat jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara pada tahun 1994 adalah 11,74 % dari jumlah penduduk. Jika dibandingkan antara kota dan desa maka persentase penduduk miskin di pedesaan jauh lebih tinggi. Pada tahun 1999 dan 2004 persentase jumlah penduduk miskin terus meningkat yaitu masing-masing 14,21 % dan 14,93 %. Pada tahun 2006, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 1.070.037 orang dari 12.643.494 orang penduduk Sumatera Utara atau mencapai 8,46 % dari jumlah penduduk.

Suatu hal yang menggembirakan ialah tingkat pertumbuhan penduduk miskin mengalami penurunan yang dalam periode 1994-1999 walaupun relatif masih cukup tinggi yaitu 4,69 %. Dalam periode 1999-2004 telah turun drastis menjadi hanya 1,46 %. Situasi yang sama juga ditemukan di perkotaan dalam periode 1994-1999. Tingkat pertumbuhan jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi yaitu 7,54 % per tahun tetapi pada periode 1999-2004 menurun drastis dengan tingkat pertumbuhan yang negatif yaitu - 2,30 % per tahun. Hal yang demikian masih belum dicapai di pedesaan. Bahkan sebaliknya, tingkat pertumbuhan jumlah penduduk miskin yang dalam periode 1994-1999 hanya 2,85 % per tahun, dalam periode 1999-2004 meningkat tajam menjadi 3,90 % per tahun.

Berdasarkan data masa lalu, pembangunan antara pedesaan dan perkotaan masih sangat pincang. Disamping itu, jika ditinjau pula tingkat pertumbuhan jumlah penduduk miskin yang dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan jumlah penduduk dalam periode 1994-1999 dan periode 1999-2004 maka terlihat bahwa tingkat pertumbuhan jumlah penduduk miskin dalam kedua periode tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan jumlah penduduk. Gambaran ini membuktikan bahwa proses pemiskinan di masyarakat Sumatera Utara sejak tahun 1994 (sebelum krisis ekonomi terjadi) sebenarnya telah terjadi dan berlanjut terus walaupun dengan tingkat pertumbuhan yang semakin rendah sejalan dengan menurunnya tingkat pertumbuhan jumlah penduduk Sumatera Utara.

Kriminalisme

Kriminalisme di Sumatera Utara telah lama dituding sebagai salah satu faktor penyebab rendahnya daya tarik daerah ini bagi para investor. Bahkan laporan dari masyarakat terus-menerus mengungkapkan betapa kriminalisme di daerah ini sudah demikian meresahkan masyarakat pada semua lapisan termasuk pada masyarakat lapisan paling bawah.

Walaupun masalah kriminalisme terus-menerus dibahas, angka kriminalisme tetap meningkat. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 1999, jumlah peristiwa kriminal yang dilaporkan adalah 13.382 kejadian dan pada tahun 2004 meningkat tajam yaitu 21.742 kejadian. Data ini menunjukkan bahwa peristiwa kriminal secara rata-rata

meningkat 10,19 % per tahun. Dalam periode 2005 jumlah kriminal menurun drastis menjadi hanya 1.193 kejadian dan pada tahun 2006 meningkat sedikit menjadi 1.981 kejadian.

b. Permasalahan

(1). Ditinjau dari angka rata-rata jumlah murid, sekolah dan jumlah guru, maka rasio murid terhadap jumlah sekolah dan guru pada jenjang pendidikan SD, SLTA dan SMU di Sumatera Utara relatif cukup baik. Rasio murid terhadap guru pada jenjang pendidikan SD ialah 1: 23,4, pada jenjang pendidikan SLTP 1: 21,01 dan pada jenjang pendidikan SLTA 1: 19,4. Demikian juga dari sudut perbandingan pertumbuhan jumlah murid, sekolah dan guru relatif cukup berimbang yaitu masing-masing 0,33 %, 0,4 % dan 0,48 %. Permasalahan yang dihadapi ialah pemerataan jumlah sekolah dan guru antar wilayah perkotaan dan pedesaan. Di perkotaan, jumlah guru dan sekolah sangat berlebihan relatif terhadap jumlah murid, sedangkan di pedesaan terjadi kekurangan guru yang amat serius terutama di daerah yang sulit dijangkau transportasi.

(2). Rendahnya kualitas guru, dan sarana pendidikan termasuk bangunan sekolah baik di kota apalagi di pedesaan sudah amat serius. Sebagian besar SD dan SLTP di pedesaan hampir tidak memiliki fasilitas sekolah termasuk guru walaupun sampai tahap minimum. Demikian juga halnya dengan kualitas bangunan sekolah.

(3). Seperti halnya dengan sekolah, jumlah dan perkembangan jumlah sarana kesehatan (rumah sakit/ poliklinik, bidan/perawat relatif berimbang kecuali dokter spesialis masih sangat langka ditemukan di pedesaan. Tetapi kualitas perlengkapan dan persediaan obat-obatan masih sangat kurang sehingga masyarakat sulit terlayani dengan baik. Pada sisi lain, berbagai penyakit epidemik seperti HIV/AIDS, flu burung terutama demam berdarah semakin mengancam masyarakat memerlukan kualitas pelayanan kesehatan termasuk obat-obatan yang semakin memadai.

(4). Keluarga berencana yang telah lama menjadi program serius pemerintah masih menunjukkan hasil yang baik hingga saat ini. Pasangan usia subur (PUS) mengalami tingkat pertumbuhan yang semakin rendah yaitu 3,19 % pada periode 1994-1999 menjadi 1,09 % pada tahun 1999-2004. Walaupun demikian, jumlah akseptor KB dan akseptor baru juga menurun dari masing-masing dari 2,5 % menjadi -0,15 % per tahun untuk akseptor KB dan dari 2,57 menjadi -5,69 % pada tahun 2004.

(5). Akibat krisis ekonomi yang belum tertanggulangi secara tuntas sejak tahun 1997, jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara terus mengalami peningkatan. Jika pada tahun 1994, jumlah penduduk miskin mencapai 11,72 % pada tahun 1994 maka pada

tahun 1999 meningkat menjadi 14,21 % dan tahun 2004 relatif masih sama yaitu 14,93 %. Namun demikian ditinjau dari tingkat pertumbuhannya, telah terjadi penurunan tajam yaitu dari 1,41 % per tahun menjadi 0,28 % per tahun. Tingkat pertumbuhan jumlah penduduk miskin di kota memang semakin menurun yaitu dari 7,54 % per tahun pada periode 1994-1999, menjadi -2,3 % per tahun dalam periode 1999-2004, tetapi di pedesaan terjadi peningkatan dari 2,85 % per tahun pada periode 1994-1999 menjadi 3,99 % per tahun dalam periode 1999-2004.

(6). Berbagai penyakit sosial sejak 1994 hingga saat ini telah mengalami perkembangan yang amat pesat. Kriminalisme khususnya premanisme, pencurian kendaraan bermotor, penyalahgunaan obat-obat terlarang seperti narkoba dan lain-lain, prostitusi, pembajakan kaset/CD, pemalsuan obat-obatan, penggunaan bahan pengawet berbahaya seperti formalin, boraks, rodhamin dan lain-lain dalam bahan makanan rakyat semakin meningkat. Penyakit-penyakit sosial ini telah sangat meresahkan dan sangat mengganggu upaya peningkatan produktivitas masyarakat.

c. Capaian / Keberhasilan

(1). Pembangunan di sektor pendidikan dalam periode 1994-1999 dan 1999-2004 memperlihatkan bahwa tingkat pertumbuhan murid, sekolah dan jumlah guru relatif sudah paralel dalam arti pertambahan jumlah murid khususnya pada jenjang pendidikan SD dan SLTP telah diimbangi oleh pertambahan jumlah guru dan jumlah sekolah. Masalah distribusi sesuai guru yang sesuai dengan perbandingan jumlah murid adalah sumber utama yang menyebabkan adanya kekurangan guru dan sekolah pada wilayah-wilayah tertentu.

(2) Laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara telah menurun secara drastis sehingga mencapai hanya 0,80 % per tahun. Hal ini terjadi karena program keluarga berencana telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya para pasangan usia subur yang mengambil bagian dalam program KB baik secara resmi maupun tidak resmi.

(3) Disektor kesehatan kecepatan penambahan jumlah dokter telah demikian tinggi sehingga rasio jumlah penduduk untuk 1 orang dokter sudah semakin baik walaupun belum mencapai rasio yang ideal. Demikian juga tentang jumlah tenaga keperawatan dan bidan per 1000 penduduk semakin mendekati perbandingan yang baik.

(4) Di sub-sektor keluarga berencana Sumatera Utara telah berhasil menurunkan persentase jumlah pasangan usia subur telah menurun tajam dari 3,19 % menjadi 1,09 %

dan tingkat pertumbuhan peserta KB rata-rata sebesar 1,21 % telah melewati tingkat pertumbuhan penduduk yang besarnya 0,8 %.

(5) Secara agregat, tingkat pertumbuhan jumlah penduduk miskin telah menurun tajam dari 4,69 % menjadi hanya 1,4 % per tahun. Di wilayah perkotaan, tingkat pertumbuhan penduduk miskin telah mencapai angka minus yaitu -2,3 % per tahun.

(6) Indeks pembangunan manusia berada diatas rata-rata nasional dan telah jauh meningkat dibandingkan dengan keadaan tahun 1994 dan 1999.

2). Analisis Proyeksi

Proyeksi Peluang

(1) Kuatnya tekad pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan proporsi anggaran pendidikan dan semakin besarnya keyakinan masyarakat terhadap peran sumberdaya manusia berkualitas sebagai kunci daya saing bangsa merupakan salah satu peluang strategik dalam peningkatan mutu pendidikan.

(2) Adanya upaya kuat dari pemerintah dan legislatif dalam meningkatkan profesionalisme guru dan dosen melalui pemberlakuan undang-undang guru dan dosen akan sangat strategik memecahkan masalah guru dan dosen yang telah lama menjadi salah satu sumber penyebab sulitnya membangun profesionalime guru dan dosen.

(3) Kebijakan khusus serta tujuh instruksi presiden kepada segenap jajaran kementerian dan kepala-kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota guna melakukan trobosan dalam mengentaskan kemiskinan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan pendidikan, penanggulangan pengangguran, pencegahan korupsi/kolusi/nepotisme dan lain-lain merupakan peluang besar untuk mengintensifkan pemecahan masalah-masalah sosial yang telah terasa semakin menekan masyarakat.

(4) Semakin kuatnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan kesehatan, dan keluarga berencana akan sangat efektif untuk meningkatkan kualitas keluarga termasuk dipedesaan yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan sumberdaya manusia Indonesia.

(5) Tekad bulat pemerintah untuk memberantas semua penyakit sosial khususnya kriminalisme yang pada saat ini telah menunjukkan hasil nyata merupakan kunci utama dalam membangun keyakinan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk menumbuhkan investasi dalam yang bersumber dari dalam dan luar negeri.

Proyeksi Ancaman

(1) Gencarnya organisasi bisnis kesehatan luar negeri khususnya Malaysia memasarkan jasa kesehatan bagi masyarakat Indonesia termasuk Sumatera Utara telah berhasil menyedot dana masyarakat yang cukup besar untuk perawatan kesehatan dan sementara sebagian sarana kesehatan di Sumatera Utara semakin tidak terurus.

(2) Kesepakatan GATS (*General Agreement on Trade and Service*) yang telah diratifikasi pemerintah dalam bulan Desember 2005 telah memungkinkan tenaga-tenaga profesional luar negeri beroperasi di Indonesia akan mempersulit posisi tenaga kerja Indonesia dalam mendapatkan pekerjaan bergengsi.

Proyeksi Permasalahan

(1) Pendidikan pada masa sekarang dan masa yang akan datang telah mengalami perubahan paradigma dari *teaching-oriented* menjadi *learning-oriented (student-based learning)* untuk membangun kreatifitas dan sikap yang kuat dan solid pada diri para lulusan. Perubahan paradigma ini membutuhkan guru-guru yang visioner dan terampil. Kondisi ini diperkirakan menjadi masalah dimasa yang akan datang karena kemampuan guru pada setiap jenjang merubah diri masih berjalan lambat.

(2) Lingkaran kemiskinan masih menjadi ancaman besar dalam pembangunan masyarakat produktif yang selalu memunculkan toleransi yang berlebihan dalam sehingga sangat menghambat upaya-upaya dalam membangun masyarakat yang sehat, dinamis dan kreatif.

(3) Sikap hidup berbagai kelompok masyarakat yang sudah memperlihatkan gejala konsumerisme, dan juga meningkatnya kecenderungan mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat termasuk melalui kegiatan yang bersifat kriminal.

2.1 5 Prasarana dan Sarana

1). Kondisi Umum Prasarana dan Sarana

a. Kondisi Masa Lampau

Prasarana dan sarana wilayah yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat ialah jalan / jembatan, pelabuhan, bandar udara, jaringan kereta api, sarana angkutan, kelistrikan dan air minum.

Prasarana Jalan

Panjang jalan di Sumatera Utara pada tahun 1994 ialah 24.739,65 km, yang terdiri dari jalan negara 1.206,53 km, jalan provinsi 2.518,38 km dan jalan kabupaten/kota 21.013,74 km. Pada tahun 1999, total panjang jalan meningkat menjadi 25.783,00 km, yang terdiri dari panjang jalan negara 1.306,00 km, jalan provinsi 3.346,00 km dan jalan kabupaten/kota 21.884,00 km. Pada tahun 2005 meningkat lagi menjadi 32.027,83 km, yang meliputi jalan negara 2.098,05 km, jalan provinsi 2.752,50 km dan jalan kabupaten/kota 27.177,235 km. Hingga tahun 2006, panjang jalan untuk masing-masing kelompok diatas tidak mengalami perubahan.

Data diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat pertumbuhan panjang jalan meningkat rata-rata sebesar 0,84 % per tahun dalam periode 1994-1999 dan 4,04 % dalam periode 1999-2005. Khusus jalan provinsi, tingkat pertumbuhan panjang jalan rata-rata ialah 6,57 % per tahun pada periode 1994-1999 dan -2,96 % per tahun dalam periode 1999-2005.

Sejalan dengan penambahan panjang jalan di Sumatera Utara yang secara agregat mengalami pertumbuhan relatif baik yaitu rata-rata 5,41 %, persentase panjang jalan yang berada dalam keadaan baik juga terlihat semakin meningkat walaupun persentase jalan dalam kondisi kurang baik masih sangat tinggi. Pada tahun 1994, kondisi jalan dalam keadaan kurang baik sangat tinggi yaitu 87,69 %. Pada tahun 1999 dan 2005 menurun menjadi 71,35 % dan 39,79 %. Khusus jalan provinsi, persentase panjang jalan dalam kondisi baik ialah 55,96 % pada tahun 1994, dan meningkat menjadi 62,16 % pada tahun 1999 dan 65,25 % pada tahun 2005, tetapi menurun kembali menjadi hanya 44,96 % pada tahun 2006. Dengan kondisi jalan yang demikian, sukar diharapkan prasarana jalan mampu memberikan kontribusi besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara walaupun secara agregat terjadi peningkatan panjang jalan yang cukup signifikan.

Sejak tahun 1980 an Sumatera Utara telah memiliki jalan tol yang menghubungkan Belawan - Medan- Tanjung Morawa (Belmera). Keberadaan jalan tol ini sangat efektif dalam memperlancar arus angkutan darat dari Pelabuhan Laut Belawan ke kawasan perkebunan dan sebaliknya mengangkut hasil-hasil perkebunan ke Pelabuhan Laut Belawan. Beberapa ruas jalan tol lain yang sudah selesai dirancang ataupun sedang dalam rencana pembangunannya ialah jalan tol Medan-Binjai dan Tanjung Morawa-Tebing Tinggi. Jalan tol Medan-Binjai dan Tanjung Morawa - Tebing Tinggi dinilai sudah cukup mendesak untuk dibangun mengingat kepadatan lalu lintas pada kedua ruas jalan tersebut sudah demikian padat sehingga nilai ekonomi transportasinya telah cukup rendah. Selain itu, untuk mendukung pengembangan wilayah dan mendorong

perekonomian, khususnya wilayah pesisir, direncanakan pembangunan jalan susur pantai, antara lain di Pantai Timur, yaitu dari Kabupaten Langkat sampai dengan Kabupaten Labuhan Batu.

Pelabuhan Laut

Pelabuhan Belawan yang merupakan pelabuhan laut terbesar di luar pulau Jawa adalah pintu gerbang utama melalui jalur laut ke Sumatera Bagian Utara dan merupakan Pelabuhan Internasional atau Pelabuhan Utama Sekunder di Indonesia. Disamping pelabuhan Belawan, terdapat beberapa pelabuhan lain yang relatif berukuran kecil tetapi sangat potensial dikembangkan untuk mendukung perekonomian Sumatera Utara. Beberapa pelabuhan laut lain yang potensial berkembang sebagai pelabuhan internasional ialah Pelabuhan Teluk Nibung di Kota Tanjungbalai dan Pelabuhan Bagan Asahan di Kabupaten Asahan. Kedua pelabuhan ini pada dasarnya adalah pelabuhan interinsuler walaupun secara rutin juga telah lama melayani pelayaran regional (Teluk Nibung-Port Klang dan Bagan Asahan-Port Klang).

Beberapa pelabuhan laut yang difungsikan sebagai pelabuhan utama tertier yang strategis menunjang perekonomian daerah belakang Sumatera Utara antara lain ialah Pelabuhan Tanjung Sarang Elang di Kabupaten Labuhan Batu, Labuan Angin di Tapanuli Tengah dan Sikara-kara di Kabupaten Mandailing Natal, Gunung Sitoli, Kuala Tanjung, Lahewa, Leidong, Pangkalan Berandan, Pangkalan Susu, Tello, Sibolga, dan Teluk Dalam. Khusus untuk Pelabuhan Sikara-kara, saat ini sedang disusun rencana pengembangan pelabuhan untuk meningkatkan daya dukungnya terhadap pembangunan wilayah hinterlandnya.

Pelabuhan regional di Sumatera Utara adalah Pangkalan Dodek, Tanjung Beringin, Tanjung Pura, Tanjung Tiram, Pantai Cermin, Rantau Panjang dan Teluk Nibung perlu dikembangkan untuk menunjang perekonomian daerah khususnya di wilayah hinterland.

Bandar Udara

Bandar Udara Polonia di Medan merupakan bandar udara internasional yang berfungsi sebagai pintu gerbang utama jalur udara di wilayah Sumatera Bagian Utara. Pelabuhan udara ini juga merupakan pusat distribusi yang memiliki cakupan yang luas dan berperan penting sebagai sub-sistem dalam sistem transportasi nasional. Pada saat ini, Bandar Udara Polonia yang berada di jantung Kota Medan sudah demikian padat dan karena lokasinya sangat berdekatan dengan pusat-pusat ekonomi dan permukiman penduduk, perlu dipindahkan ke daerah yang lebih aman. Rencana pemindahannya sekaligus dilakukan dengan memodernisasi fasilitas pelayanannya untuk meningkatkan volume dan kualitas pelayanan. Lokasi yang terpilih dan layak antara lain di daerah Kuala Namu

(Kabupaten Deli Serdang) untuk meningkatkan volume pelayanannya. Untuk pemindahan ini, lahan seluas kurang lebih 1.365 Ha telah disediakan dengan berbagai tingkatan rancangan pemanfaatannya. Diperkirakan pengoperasian bandar udara pada lokasi yang baru ini akan mulai pada bulan Oktober 2009.

Beberapa bandar udara regional yang akhir-akhir ini dioperasikan guna mendorong laju investasi di Sumatera Utara khususnya di wilayah Sumatera Utara Bagian Barat ialah Bandar Udara Binaka di Nias, Bandar Udara F.L. Tobing di Tapanuli Tengah, Beberapa bandar udara lain yang semakin berperan dalam memotivasi ekonomi daerah ialah Bandar Udara Silangit di Tapanuli Utara, Bandar Udara Aek Godang di Tapanuli Selatan dan Bandar Udara Lasondre di Pulau-pulau Batu Nias Selatan yang semuanya masih memerlukan subsidi dana dari pemerintah daerah. Beberapa bandar udara perintis lain yang masih dalam taraf persiapan antara lain ialah Bandar Udara Sibisa di Toba Samosir. Bandar udara lainnya yang dinilai cukup potensial untuk pelayanan penumpang domestik antar provinsi yang sedang dijajaki ialah di Binanga Kabupaten Tapanuli Selatan.

Jaringan Rel Kereta Api

Jaringan rel kereta api yang saat ini masih beroperasi hanya satu jurusan yaitu Medan-Tebing Tinggi-Kisaran- Rantau Prapat. Dan Medan-Pematang Siantar Pada masa lalu, terdapat jaringan rel kereta api yang menghubungkan Medan-Banda Aceh dan Medan-Pancur Batu. Namun sejak pertengahan tahun 1960 an kedua jaringan tersebut dihentikan operasinya. Kendati arus penumpang dan barang semakin meningkat dari tahun ke tahun, belum ada rencana peningkatan kapasitas jaringan rel khususnya pengganti jaringan yang pernah ada. Namun begitu, wacana pembangunan jaringan kereta api Banda Aceh-Medan-Riau telah muncul sehubungan dengan kesepakatan para gubernur se-Sumatera. Studi kelayakan pembangunan jaringan kreta api yang menghubungkan Rantau Perapat (Labuhan Batu) ke Riau melalui Gunung Tua-Sibuhuan (Padang Lawas) sedang dalam taraf perampungan.

Jaringan rel kereta api tersebut sangat dibutuhkan sebagai prasarana angkutan hasil-hasil perkebunan seperti CPO, karet, kakao, teh di daerah-daerah Deli Serdang, Simalungun, Asahan dan Labuhan Batu ke Pelabuhan Belawan atau ke Riau disamping angkutan penumpang dari dan ke daerah-daerah tersebut.

Kelistrikan

Sumber tenaga listrik utama di Sumatera Utara ialah tenaga uap/gas, tenaga diesel dan tenaga air. Pada tahun 1994, total daya terpasang pada seluruh sumber tenaga tersebut ialah 1.311,86 MW. Pada tahun 1999 turun menjadi 1.246,98 MW dan pada tahun 2004

meningkat sedikit sebesar 1.296,94 MW. Dari gambaran ini terlihat bahwa kendati pertumbuhan ekonomi meningkat rata-rata sebesar 4,08 % per tahun dalam periode 1999-2004, daya terpasang pembangkit tenaga listrik hampir tidak mengalami peningkatan bahkan bila dibandingkan dengan tahun 1994, terjadi penurunan daya terpasang sebesar 1,21 %. Kelistrikan di wilayah Sumatera Utara pada tahun 2006 memperlihatkan kondisi yang sedikit semakin membaik yaitu daya terpasang menjadi 1.381.52 MW. Namun demikian kekurangan daya masih dirasakan sebesar 120-125 MW.

Untuk mengatasi kekurangan daya listrik PT PLN sebagai provider utama tenaga listrik telah melakukan kontrak pembelian tenaga listrik dari luar (PT Inalum) sebesar 75,00 GWH. Disamping itu. PT PLN juga menerima tenaga listrik tambahan dari sumber lain sebesar 365,24 GWH. Berdasarkan data PT PLN, pada tahun 2004, total tenaga listrik yang diproduksi sendiri oleh Perusahaan tersebut ialah 5.945,53 GWH dan total tenaga listrik yang bersumber dari luar PT PLN ialah 440,24 GWH (7,40 %).

Sumberdaya Air

Air minum / Bersih

Salah satu sumber air minum terbesar di Sumatera Utara ialah air bawah tanah. Daerah ini memiliki 8 cekungan air bawah tanah yaitu cekungan Air Tanah Medan Area di Langkat, Deli Serdang dan Kota Medan, cekungan Air Tanah Kabanjahe di Kabupaten Karo dan Simalungun, cekungan Air Tanah Sidikalang di Dairi dan Tapanuli Utara, cekungan Subussalam di Tapanuli Tengah dan Nanggroe Aceh Darusalam, cekungan Air Tanah Langsa di Langkat dan Nanggroe Aceh Darusalam, cekungan Air Tanah Teluk Durian di Labuhan Batu dan Riau dan cekungan Air Tanah Natal Ujung Gading di Tapanuli Selatan dan Sumatera Barat.

Cekungan Air Tanah Medan Area sudah dieksploitasi secara intensif sehingga pada tahun 2016 diperkirakan akan menjadi kritis. Pengambilan air tanah di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara yang demikian intensif dilakukan telah pula menimbulkan dampak negatif berupa penyusupan air laut terhadap air tanah. Hal ini dapat dilihat misalnya di daerah Tanjung Pura / Stabat Kabupaten Langkat yang telah mengalami intrusi air laut sekitar 9-14 km. Demikian juga di Pantai Belawan kearah Kota Medan yang telah mengalami intrusi air laut sepanjang 6-8 km dan di Pantai Cermin sepanjang 3.5-8 km.

Air Irigasi

Sebagian lahan-lahan persawahan di Sumatera Utara adalah sawah irigasi. Sumber air utama ialah sejumlah sungai besar seperti Sungai Ular, Sungai Wampu, Sungai Batang

Gadis, Sungai Batang Toru dan lain-lain yang mengalir dari pegunungan dan mengairi sawah-sawah di sepanjang daerah alirannya. Sejak tahun 1970-an pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi secara bersama-sama giat membangun saluran-saluran irigasi untuk meningkatkan produksi padi di setiap daerah yang potensi tinggi. Akibatnya peningkatan produksi padi menonjol dan Indonesia kemudian dikenal dunia sebagai salah satu negara yang paling berhasil membangun ketahanan pangan.

Sejak pertengahan dekade 1990-an, situasi berubah ditandai dari merosotnya pasokan air irigasi dari sungai-sungai besar diatas. Penggundulan hutan disebutkan sebagai penyebab utama terjadinya defisit air yang ditandai dari seringnya air sungai meluap secara tak terkendali pada musim hujan dan mengalami kekeringan yang serius pada musim kemarau dan sungai-sungai mengalami pendangkalan. Karena faktor defisit air irigasi ini maka saluran-saluran irigasi primer, sekunder dan tertier yang dibangun dengan investasi yang cukup besar banyak tak berfungsi dan alih lahan sawah menjadi lahan pertanian lain terjadi secara tak terkendali. Akhirnya produksi padi nasional dan juga Sumatera Utara merosot tajam.

Mengingat kegiatan membangun ketahanan pangan sangat bersifat strategik dan Sumatera Utara telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai salah satu lumbung beras nasional maka peningkatan, pengamanan dan pemeliharaan sumberdaya air irigasi perlu ditingkatkan dengan dan harus mencapai keberhasilan yang tinggi dalam arti, ketersediaan sumberdaya air irigasi seperti halnya pada masa lalu harus dijamin / dipulihkan atau paling tidak mendekati situasi masa lampau. Untuk itu *catchment area* perlu tingkatan, atau dibangun kembali untuk menjaga kontinuitas ketersediaan air irigasi terutama didaerah-daerah persawahan yang potensial seperti Simalungun, Karo, Deli Serdang, Serdang Bedagei, Asahan, Tapanuli Selatan dan lain-lain. Sungai-sungai yang telah mengalami pendangkalan diaktifkan kembali untuk pengendalian kelancaran pasokan air kepersawahan sekitarnya.

b. Permasalahan

1). Kondisi sebagian besar jalan-jalan di seluruh wilayah Sumatera Utara masih baik yang berstatus jalan provinsi maupun berstatus jalan kabupaten berada dalam keadaan yang kurang baik bahkan sebagian sangat buruk. Khusus pada jalan berstatus jalan provinsi, kendati telah terjadi peningkatan kualitas jalan sehingga berada dalam kategori baik yaitu 55,96 % pada tahun 1994 menjadi 62,16 % pada tahun 1999 dan 66,45 % pada tahun 2004, persentase jalan buruk sebesar 33,55 % masih terlalu tinggi apalagi sebagian besar berada diwilayah kantong-kantong produksi.

2). Pelabuhan Belawan yang merupakan pelabuhan laut terbesar di Sumatera Utara masih memiliki kedalaman alur yang sangat terbatas sehingga sulit dilalui kapal-kapal lebih

besar. Demikian juga halnya dengan kelengkapan pelabuhan bongkar muat, naik turun penumpang dan lain-lain termasuk kualitas dermaga pada sebagian pelabuhan yang ada di Sumatera Utara masih belum memadai untuk menunjang angkutan laut secara efektif.

3). Polonia yang merupakan bandar udara terbesar di Sumatera Utara yang telah lama berstatus pelabuhan internasional masih terkendala dengan keadaan (jumlah dan kualitas) sarana bandara, seperti kapasitas ruang tunggu, ruang penjemputan, sistem skuriti/keamanan pelabuhan, lapangan parkir, dan lain-lain dan sangat tidak seimbang dengan laju peningkatan jumlah penumpang yang harus dilayani. Pengembangan Bandar Udara Polonia sulit dilakukan karena terkendala dengan luas lahan yang tersedia.

4). Berbagai bandar udara regional yang dibangun dalam beberapa waktu yang lalu seperti Bandar Udara Binaka, F.L. Tobing, Aek Godang, Lasondre, Silangit dan Sibisa masih dalam taraf pemula yang sehingga belum siap untuk melayani arus lalu lintas udara yang semakin meningkat. Untuk peningkatan fasilitas dibutuhkan dana yang cukup besar perlu dan harus diseimbangkan dengan peningkatan jumlah permintaan.

5) Prasarana pengairan yang merupakan salah satu kunci peningkatan produktivitas tanaman pangan di Sumatera Utara sebanyak 40 % berada dalam kondisi rusak atau tidak berfungsi baik karena kerusakan saluran irigasi maupun karena merosotnya pasokan air . Akibatnya sebagian masyarakat yang tidak lagi terlayani oleh prasarana ini mengkonversikan lahan sawahnya menjadi lahan pertanian tanaman keras seperti jeruk dan coklat, sebagian lagi dalam keadaan ditelantarkan.

6) Pasokan air minum /bersih juga masih tetap mengalami defisit. Eksploitasi air bawah tanah sebagai sumber air bersih untuk keperluan air industri dan rumah tangga dari beberapa cekungan yang telah mendekati titik kritis dan telah menimbulkan intrusi air laut terhadap air bawah tanah. Jika masalah ini tidak dicegah maka potensi ketersediaan air tawar di beberapa bagian wilayah Sumatera Utara akan menjadi masalah serius.

7). Jaringan kereta api yang merupakan prasarana *rapid mass transportation* masih memiliki jalur akses yang sangat terbatas. Tidak pernah ada penambahan jaringan rel wilayah-wilayah produktif.

8). Kapasitas pembangkit listrik semakin terbatas dan semakin tidak mampu mengimbangi pertumbuhan permintaan. Kendati sumber-sumber tenaga listrik seperti air terjun, geothermal, tenaga surya dan lain-lain relatif banyak tersedia di Sumatera Utara. Investasi di sektor kelistrikan masih terkendala dengan kemampuan pasar (masyarakat) untuk membayar tarif sesuai dengan harga pasar sedangkan investasi pemerintah sangat sulit diharapkan. Kelangkaan pasokan tenaga listrik jika tidak dapat ditanggulangi akan menjadi masalah serius bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat.

c. Capaian

(1) Pertumbuhan panjang jalan secara agregat di Sumatera Utara masih mampu mengimbangi pertumbuhan ekonomi yaitu rata-rata 4,18 % per tahun dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dalam periode yang sama yaitu 4,54 % per tahun. Khusus untuk jalan status provinsi, tingkat pertumbuhan panjang relatif lebih besar yaitu 5,41 % per tahun walaupun pada periode 1999-2004 kemudian merosot tajam.

(2) Kendati persentase panjang jalan yang berada dalam kondisi buruk masih sangat tinggi persentase panjang jalan yang mengalami perbaikan cukup signifikan yaitu dari 55,96 % menjadi 66,45 %.

2). Analisis Proyeksi

Proyeksi Peluang

(1) Karena pengaruh kondisi dan kualitas prasarana jalan dan pelabuhan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat demikian tinggi dan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam iklim persaingan global tidak mungkin ditawar-tawar lagi maka agar ekonomi nasional survive, pembangunan prasarana jalan, pelabuhan udara, laut, penyeberangan yang mencukupi pada kualitas yang memadai dimasa yang akan datang mutlak harus menjadi prioritas utama

(2). Meningkatnya permintaan terhadap jasa tenaga listrik dan perbaikan pendapatan masyarakat di masa yang akan datang akan membuka peluang besar bagi calon investor untuk memanfaatkan potensi sumberdaya energi yang tersedia di Sumatera Utara.

Proyeksi Ancaman

(1) Ketidakmampuan Sumatera Utara dalam memenuhi prasarana jalan, pelabuhan laut dan bandar udara, jaringan rel kereta api, pasokan air minum dan tenaga listrik secara memadai dan berkualitas akan menjadi faktor utama penghalang bagi barang dan jasa daerah ini untuk bersaing di pasar.

(2) Pelabuhan Belawan yang merupakan pelabuhan laut terbesar di Sumatera Utara yang masih terkendala dengan kelengkapan fasilitas termasuk di pelabuhan peti kemas dan profesionalisme dalam penanganan kelancaran dan akurasi arus barang akan akan

semakin menghilangkan kepercayaan pelanggan luar negeri untuk memanfaatkan pelabuhan laut tersebut.

(3) Bandar Udara Polonia yang sudah demikian padat dengan arus penumpang sangat rawan dengan kecelakaan karena tidak memiliki lahan yang memadai untuk perluasan pembangunan fasilitas.

Proyeksi Permasalahan

(1) Pembangunan prasarana jalan, dan pelabuhan laut di wilayah-wilayah yang masih belum berkembang masih sulit diharapkan dapat diatasi sehubungan dengan faktor skala ekonomi. Besarnya investasi yang dibutuhkan harus benar-benar didukung oleh kemampuan bayar para pengguna prasarana yang diperkirakan akan berkembang secara lambat.

(2) Pengembangan prasarana angkutan khususnya pelabuhan laut dan udara yang berlokasi pada kabupaten/kota otonom yang bertetangga potensial memunculkan persaingan yang tidak sehat sehubungan dengan keinginan yang kuat pada masing-masing daerah otonom untuk memiliki pelabuhan sendiri.

Proyeksi Keberhasilan

(1) Dengan beroperasinya beberapa lapangan udara di Kawasan Pantai Barat yaitu Binaka, Aek Godang, Dr. F.L. Tobing dan lain-lain maka keterisolasian sebagian besar wilayah di Kawasan Pantai Barat sudah dapat diatasi paling tidak telah memungkinkan wisatawan dan calon-calon investor untuk berkunjung ke kawasan tersebut.

(2) Arus penumpang dan muatan melalui pelabuhan udara dan laut secara agregat memperlihatkan peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini merupakan indikasi bahwa kebutuhan masyarakat terhadap jasa pelayanan pelabuhan semakin meningkat.

(3) Kerjasama antar pemerintah kabupaten /kota walaupun belum terlihat cukup 'hangat' tetapi telah menunjukkan benih-benih pertumbuhan yang menggembirakan. Beberapa contoh kerjasama tersebut antara lain kesepakatan pembangunan Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan, Kawasan Agromarinopolitan di daerah pesisir Pantai Barat dan kawasan perkotaan Medan – Binjai – Deli Serdang (Mebidang) di Pantai Timur dan lain-lain. Kerjasama antar pemerintah kabupaten /kota terutama sangat penting dalam pembangunan wilayah perbatasan sehingga harus terus digalakkan.

2.1.6 Pemerintahan

1). Kondisi Pemerintahan

a. Kondisi Masa Lampau

Berdasarkan Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1956, Undang-undang darurat No. 8 Tahun 1956, Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1956, peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.4 Tahun 1964, Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 17 daerah Tingkat II yaitu 11 kabupaten dan 6 kota. Tetapi dengan keluarnya Undang-undang No. 12 tahun 1998 tentang pembentukan Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Toba Samosir, Undang-undang No. 4 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Padang Sidempuan, Undang-undang No.9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Humbang Hasundutan dan Pakpak Bharat, serta Undang-undang No. 36 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai maka wilayah Provinsi Sumatera Utara berubah menjadi 18 Kabupaten dan 7 kota. Secara keseluruhan, terdapat 361 kecamatan dan 5.626 desa yang tersebar pada setiap kabupaten dan kota. Perbandingan luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk antar kabupaten/kota adalah seperti terlihat pada Tabel-12.

Tabel-12
Perbandingan Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan
Penduduk Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2004 dan 2005

Kabupaten /Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)	
		2004	2005	2004	2005
1. Nias	3.495,39	433.350	441.807	124	126
2. Mandailing Natal	6.618,79	379.045	386.150	57	58
3. Tapanuli Selatan	12.138,30	609.922	626.702	50	52
4. Tapanuli Tengah	2.188,00	278.472	283.035	127	129
5. Tapanuli Utara	3.726,52	255.400	256.201	69	69
6. Toba Samosir	2.474,40	167.587	158.677	68	64
7. Labuhan Batu	9.223,18	933.866	951.773	101	103
8. Asahan	4.580,75	1.009.856	1.024.369	220	224
9. Simalungun	4.386,60	818.975	826.101	187	188
10. Dairi	1.927,80	259.158	261.287	134	136
11. Karo	2.127,29	312.300	316.207	147	149
12. Deli Serdang	2.407,96	1.523.881	1.569.638	633	652
13. Langkat	6.263,30	955.348	970.433	153	155
14. Nias Selatan	1.825,20	282.715	288.233	155	158
15. H. Hasundutan	2.517,66	155.222	156.169	65	66
16. Pakpak Bharat	1.218,30	34.260	34.542	28	28

17. Samosir	2.069,05	119.873	131.073	58	63
18. Serdang Bedagai	1.989,98	583.071	588.176	293	296
19. Sibolga	10,77	87.260	88.717	8102	8237
20. Tanjung Balai	60,52	149.238	152.814	2466	2.525
21. Pematang siantar	79,99	227.551	230.487	2845	2.881
22. Tebing Tinggi	37,99	134.382	135.671	3537	3.571
23. Medan	265,10	2.010.676	2.036.185	7585	7.681
24. Binjai	90,33	232.236	237.904	2571	2.634
25. P. Sidempuan	140,00	172.419	177.499	1232	1.268
Sumatera Utara	71.680,68	12.123.360	12.326.678	169	172

Tabel diatas memperlihatkan bahwa baik luas kabupaten maupun jumlah penduduk sangat bervariasi. Luas kabupaten bervariasi dari 1.218.30 km² (Pakpak Bharat) sampai 12.318,30 km² (Tapanuli Selatan) dan jumlah penduduk berkisar dari 34.260 jiwa (Pakpak Bharat) sampai 1.523.881 jiwa (Deli Serdang). Ditinjau dari tingkat kepadatan penduduk, kabupaten yang paling padat ialah Deli Serdang (663 jiwa /km²) dan yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya ialah Pakpak Bharat. Sementara tahun 2005 penduduk Sumatera Utara mencapai 12.326.678 jiwa dengan kepadatan 172 jiwa/km².

Sejalan dengan pemberlakuan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004 maka pengaturan rumah tangga daerah telah berada pada kewenangan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Namun demikian, Gubernur Sumatera Utara sesuai dengan perannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah tetap memiliki kewenangan atas daerah otonom kabupaten/ kota dalam hal pengkoordinasian pembangunan dan pengawasannya untuk menjamin agar pembangunan pada setiap daerah otonom pada masing-masing provinsi selalu berada dalam koridor pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 3 Tanggal 31 Juli 2001 untuk membentuk dinas-dinas sebagai institusi teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan Undang-undang No.22/1999 .tugas pokok dan fungsi dinas-dinas semakin terbatas karena sebagian besar telah didesentralisasi ke daerah bawahan kabupaten dan kota.

Dalam bidang politik, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara hasil pemilihan umum tahun 2003 yaitu Partai Golkar sebanyak 19 orang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 13 orang, Partai Persatuan Pembangunan

sebanyak 8 orang, Partai Demokrat sebanyak 10 orang, Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 8 orang, Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 8 orang, Partai Damai Sejahtera (PDS) sebanyak 5 orang, Partai Bintang Reformasi (PBR) sebanyak 5 orang, Partai Bulan Bintang sebanyak 3 orang dan Partai lainnya sebanyak 5 orang.

b. Permasalahan

(1) Peran pemerintah provinsi sebagai kordinator pembangunan daerah Sumatera Utara dan sebagai wakil pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan untuk menjamin pelaksanaan pembanguan di daerah otonom kabupaten dan kota tetap terpadu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia masih belum berjalan sesuai dengan baik sebagaimana telah diatur dalam UU No 22/1999 dan PP 30/2004. Akibatnya cukup banyak dana pembangunan pemerintah dimanfaatkan secara tidak efektif karena faktor duplikasi pembangunan.

(2) Integrasi dan sinergitas lembaga eksekutif dan legislatif dalam mencermati rencana dan program pembangunan masih sangat sulit dilakukan karena pertimbangan partai masih sering mendominasi pandangan.

(3) Pelayanan jasa oleh aparat pemerintah kepada masyarakat awam masih sulit dilakukan secara profesional karena faktor KKN masih belum terberantas walaupun upaya secara intensif telah dilakukan.

c. Capaian

(1) Pelaksanaan otonomisasi di daerah kabupaten/kota sudah berjalan walaupun masih memiliki berbagai kelemahan. Walaupun berbagai kelemahan dalam implementasi memang masih sering ditemui antara lain sifat individualisme masing-masing kabupaten/kota yang berlebihan dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam, pemerintah kabupaten/kota semakin sadar akan pentingnya integrasi perencanaan.

(2) Sesuai dengan amanat UU No. 22/1999, Sumatera Utara sebagaimana halnya dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia telah memiliki anggotanya dalam Dewan Perwakilan Daerah. Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berjumlah 4 orang bersama-sama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari daerah pemilihan Sumatera Utara telah membangun sebuah forum komunikasi yang dinilai efektif untuk menyatukan persepsi dengan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara sehingga semua kepentingan objektif bagi pembangunan Sumatera Utara pada tingkat nasional akan lebih mudah terlindungi.

2). Analisis Proyeksi

Proyeksi Peluang

(1) Pengalaman berharga tentang permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan kewenangan daerah otonom selama lebih 5 tahun disertai dengan keluarnya UU No. 32/2004 yang semakin mempertegas peran dan fungsi Gubernur dalam pengkoordinasian / pengawasan daerah-daerah otonom kabupaten /kota telah menempatkan posisi Gubernur Sumatera Utara semakin kuat.

(2) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mendapat dukungan kuat dari para anggota DPD dan DPRD asal Sumatera Utara yang melalui forum DPD-DPRD secara rutin melaksanakan diskusi-diskusi intensif mengenai pembangunan Sumatera Utara.

Proyeksi Ancaman

(1) Sikap kritis masyarakat terhadap kualitas pelayanan para aparat Pemerintah Provinsi telah memperlihatkan intensitas yang semakin tinggi sehubungan rendahnya kemajuan aparat dalam pemenuhan standar minimum pelayanan akan sangat potensial mengancam kredibilitas pemerintah. Profesionalisme aparat dalam semua sektor merupakan salah satu kunci untuk mempertahankan kredibilitas yang tinggi.

(2). Pemerintah Provinsi masih menghadapi kesulitan yang amat besar untuk mencegah tuntutan-tuntutan pemekaran kabupaten/kota yang terus berlanjut yang membuat *overhead cost* pembangunan Sumatera Utara secara agregat meningkat terus. Sebagai akibatnya kemampuan Sumatera Utara secara keseluruhan membiayai pembangunan akan tetap melemah.

(3) Pelaksanaan *e-government* yang telah menjadi simbol kualitas pelayanan pemerintahan di era global masih cukup jauh sehubungan dengan belum terbangunnya secara utuh infrastruktur teknologi informasi dan kesiapan aparat Pemerintah Provinsi dalam perbaikan dan pengembangan SDM sehingga adaptif dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Proyeksi Permasalahan

(1) Kualitas sumberdaya manusia pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diperkirakan masih belum mencapai taraf profesionalisme dalam arti jumlah tenaga-tenaga profesional (tenaga-tenaga yang memiliki *knowledge, skill, dan attitude*) belum berada pada proporsi yang dominan sehingga praktek-praktek *good governance (transparency,*

independence, accountable, responsible, customer focus dan lain-lain) belum dapat terwujud.

(2) Kemampuan Pemerintah Provinsi dan lembaga DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam menjalin sistem komunikasi yang efektif untuk membangun kesamaan persepsi terhadap kepentingan pembangunan Sumatera Utara diperkirakan masih lemah sehubungan kedua belah pihak masih menggunakan tolok ukur masing-masing sesuai budaya masing-masing lembaga. Seyogianya, antar lembaga eksekutif dan legislatif telah lama terjalin sebuah budaya baru yang kental diwarnai oleh kepentingan pembangunan Sumatera Utara untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Proyeksi Keberhasilan

(1) Besarnya upaya untuk mewujudkan *good governance* di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara walaupun cukup sulit diperkirakan akan benar-benar menjadi kenyataan karena strategi implementasinya telah secara intensif disistemisasi dan dikomunikasikan kepada stakeholders

(2) Implementasi Undang-undang No.32/2004 akan mengefektifkan peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam membangun kesamaan persepsi pembangunan Sumatera Utara secara keseluruhan bersama-sama dengan daerah otonom kabupaten/ kota.

2.2 Prediksi Kondisi Umum Daerah

Berdasarkan hasil analisis kondisi umum Sumatera Utara atas data 10 tahun yang lalu seperti telah diuraikan dalam butir 2.1 maka prediksi kondisi umum daerah Sumatera Utara dalam 20 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

2.2.1 Lingkungan Hidup

1) Kondisi lingkungan hidup di daerah Sumatera Utara dalam masa 20 tahun kedepan jika tidak diantisipasi secara serius diperkirakan akan sangat buruk disebabkan oleh paling tidak 4 faktor pokok yaitu krisis pangan, krisis air, krisis energi dan krisis perubahan iklim. Keempat krisis tersebut secara bersama sama berdampak negatif yang serius pada kelestarian hutan yang merupakan tiang agung dari kelestarian lingkungan hidup. Krisis pangan diperkirakan akan terjadi sehubungan dengan pada satu sisi merosotnya lahan-lahan pertanian tanaman pangan khususnya areal persawahan karena konversi lahan-lahan pertanian baik kedalam bentuk areal permukiman maupun areal tanaman perkebunan, dan merosotnya persediaan air irigasi akibat kerusakan hutan yang semakin meluas dan pada sisi lain jumlah penduduk terus mengalami peningkatan walaupun

dengan tingkat pertumbuhan yang semakin menurun. Dalam keadaan yang demikian sulit dihindarkan kelompok masyarakat yang berada pada ujung paling depan yang menghadapi krisis pangan tersebut akan sulit dicegah memanfaatkan sumber daya ekonomi lingkungan secara tak terkendali seperti perambahan hutan untuk lahan-lahan pertanian kering, pencurian kayu (*illegal logging*), penggalian pasir sungai, *illegal fishing* dan lain-lain.

2) Krisis air juga diperkirakan akan menjadi ancaman serius tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan air domestik (*municipal water*) tetapi juga keperluan air industri dan pertanian. Masyarakat akan memanfaatkan sumber-sumber air tanah secara sembarangan dan kelompok yang kurang mampu mengisi kebutuhannya dengan air yang sama sekali tidak memenuhi persyaratan.

3) Krisis energi yang bersumber utama pelonjakan harga pasar dunia minyak mentah yang jauh berada diatas kemampuan beli sebagian besar masyarakat akan memaksa masyarakat untuk menggunakan apa saja yang dapat menghasilkan energi khususnya kayu hutan yang berada di sekitar permukiman.

4) Krisis perubahan iklim adalah merupakan perubahan iklim yang tidak teratur sehingga sulit diprediksi arah dan kecenderungannya. Perubahan iklim yang tidak menentu ini antara lain terlihat dalam bentuk ketidak teraturan curah hujan dan meningkatnya pemanasan global. Ketidakteraturan perubahan ini menimbulkan kesulitan besar dalam mencari upaya untuk mengatasinya.

5) Disamping keempat faktor krisis tersebut, ancaman lingkungan hidup juga muncul dari kegiatan ekonomi masyarakat bawah berupa kegiatan industri rumah tangga khususnya bahan-bahan makanan yang tidak memenuhi persyaratan higienis dan menjualnya secara tak terkendali sehingga meningkatkan gangguan kesehatan masyarakat dan meluasnya pencemaran lingkungan oleh limbah yang ditimbulkan.

6) Kendati keempat faktor krisis diatas bukan tipikal masalah Sumatera Utara, pemerintah provinsi bersama-sama dengan lembaga pemerintahan lainnya termasuk pemerintah pusat dan masyarakat perlu segera mencari pemecahan. Penyelamatan hutan khususnya sepanjang daerah aliran sungai, dan di daerah-daerah tangkapan air (*catchment area*) mutlak harus dapat diamankan dalam periode 20 tahun kedepan melalui berbagai kebijakan dan tindakan tanpa mematikan kelompok masyarakat lemah yang ambil bagian dalam perusakan lingkungan hutan melalui upaya pengentasan kemiskinan secara tuntas.

2.2.2 Demografi

1) Salah satu hal yang menggembirakan mengenai faktor demografi daerah Sumatera Utara ialah menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk. Bahkan dalam periode 1999-2004 tingkat pertumbuhan penduduk telah demikian rendah yaitu sebesar 0,28 % per tahun. Salah satu kecenderungan yang terlihat cukup kuat dalam pola kependudukan Sumatera Utara pada saat ini ialah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang keluarga kecil yang sejahtera sebagai akibat dari tekanan ekonomi, maupun karena kesulitan dalam pemeliharaan (pembiayaan) kesehatan dan pendidikan.

Kecenderungan dalam hal perkembangan jumlah penduduk dalam periode 1994-2004, dan situasi serta pola kependudukan dalam periode tersebut, diperkirakan masih berlanjut atau tidak mengalami perubahan yang signifikan ke masa yang akan datang. Berdasarkan asumsi ini, tingkat pertumbuhan jumlah penduduk rata-rata dalam periode lima tahunan sampai tahun 2025 berturut-turut diperkirakan adalah 1,12 %, 1,05 %, 1,00 % 0,98 % per tahun. Berdasarkan estimasi di atas tersebut, jumlah penduduk Sumatera Utara pada tahun 2011 adalah sebesar 13.022.850 jiwa dan pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 14.961.000 jiwa.

2) Jumlah tenaga kerja, angkatan kerja, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Utara tahun 2005 adalah 71,94 %, diperkirakan masing-masing terus mengalami peningkatan. Peningkatan pada ketida entitas ketenagakerjaan tersebut terjadi antara lain karena peningkatan jumlah penduduk, peningkatan pelayanan kesehatan, ketersediaan lapangan kerja sehubungan dengan berlakunya sistem ekonomi terbuka. Dengan berlakunya sistem ekonomi terbuka tahun 2020 sehubungan dengan GATT / WTO, maka investasi asing diperkirakan meningkat tajam yang akan menyerap tenaga kerja daerah dalam jumlah relatif cukup besar. Berdasarkan asumsi tersebut, jumlah tenaga kerja, angkatan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2021 diperkirakan masing-masing sebesar 80 %, 50 % dan 75 %. Jumlah angkatan kerja 5,80 juta jiwa, terdiri dari 5,17 juta jiwa bekerja dan 636.000 jiwa terkategori sebagai pencari kerja dan tidak bekerja (pengangguran terbuka).

Dilihat dari status pekerjaannya 28,44 % adalah buruh/karyawan, 23,24 % pekerja keluarga, pengusaha (yang mempekerjakan buruh tetap/ bukan anggota keluarganya) 2,08 %. Penduduk bekerja sebagian besar (52,68 %) pada sektor pertanian, sebanyak 17,67 % pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, 10,55 % pada sektor jasa (jasa perorangan, jasa perusahaan dan jasa pemerintahan), dan 6,01 % bekerja pada sektor industri.

3) Pengangguran yang pada masa lalu dan masa sekarang menjadi masalah besar yang telah menghantui sebagian besar tenaga kerja nasional termasuk Sumatera Utara akan masih terus menjadi masalah jika institusi ketenagakerjaan tetap tidak profesional dalam mendekatkan mutu tenaga kerja dengan mutu yang dituntut oleh pasar kerja. Mengandalkan sekolah (lembaga pendidikan tinggi) dalam pemecahan mutu tenaga kerja tidak akan pernah memberikan hasil karena sasaran pendidikan sumber daya manusia di Perguruan Tinggi ialah peningkatan kualitas sumber daya manusia secara umum.

Perkembangan teknologi amat cepat yang mempengaruhi perubahan drastis proses-proses sektor produksi dalam arti luas mengharuskan para lulusan Perguruan Tinggi untuk menyesuaikan diri (keterampilan) dengan tuntutan pasar kerja. Sehubungan dengan keadaan tersebut maka jumlah pengangguran terbuka hingga tahun 2025 diperkirakan masih tetap cukup tinggi yaitu berkisar 10-15 % dari jumlah tenaga kerja jika faktor penyebab pengangguran tidak diatasi dengan baik.

4) Angka harapan hidup masyarakat Sumatera Utara yang terus mengalami peningkatan sejak 10 tahun terakhir akan terus berlanjut sehubungan dengan upaya perbaikan kesehatan. Sejalan dengan tingkat kenaikan angka harapan hidup yang telah dicapai dalam periode 1994-2004 maka dalam periode 2005-2025 angka harapan hidup masyarakat Sumatera Utara diperkirakan akan meningkat menjadi 70, 72, 74, 75 tahun masing-masing untuk periode lima tahunan kedepan.

5) Sejalan dengan peningkatan angka harapan hidup, indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara juga akan terus mengalami perbaikan. Asumsi yang dapat digunakan untuk memprediksi kenaikan indeks pembangunan manusia Sumatera Utara ialah: kenaikan angka harapan hidup seperti telah diuraikan diatas, angka melek huruf akan meningkat secara moderat, lama sekolah rata-rata juga akan meningkat sehubungan dengan program nasional belajar 9 tahun dan pengeluaran riil per kapita yang juga akan meningkat sehubungan dengan peningkatan pendapatan. Diperkirakan, indeks pembangunan manusia akan mencapai angka diatas 75.

2.2.3 Ekonomi dan Sumberdaya Alam

1) Pertumbuhan ekonomi daerah Sumatera Utara kedepan masih sangat sulit mencapai angka yang tinggi kendati indikator-indikator makro ekonomi secara perlahan telah memperlihatkan perbaikan. Beberapa faktor penghambat terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi antara lain ialah semakin tingginya harga bahan bakar minyak, keterpurukan pasokan tenaga listrik, dan rendahnya kualitas prasarana ekonomi wilayah khususnya prasarana jalan. Masalah diatas diperkirakan paling tidak masih belum

dapat dituntaskan hingga tahun 2011 karena masalah yang telah terjadi sudah sampai pada tingkat yang cukup parah.

2) Sehubungan dengan itu maka tingkat pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dalam periode 2005-2025 diperkirakan berkisar antara 6,00-8,5 % pertahun dengan rincian dalam periode 2005-2009 rata-rata sebesar 6,00 % pertahun, periode 2010-2014 sebesar 6,80 % per tahun, periode 2015-2019 sebesar 7,5 % per tahun dan periode 2020-2024 sebesar 8,20 % per tahun. Berdasarkan prediksi tersebut besarnya PDRB Sumatera Utara atas dasar harga konstan 1993 pada tahun 2010 diperkirakan Rp 37.377.200 juta dan pada tahun 2025 sebesar Rp 106.510.100 juta. Jika dikaitkan dengan perkembangan jumlah penduduk pada periode-periode tersebut seperti telah diuraikan sebelumnya maka pendapatan per kapita penduduk Sumatera Utara pada tahun 2010 dan 2025 atas dasar harga konstan 1993 diperkirakan masing-masing sebesar Rp 2.870.100 dan Rp 7.110.000.

3) Struktur ekonomi Sumatera Utara akan mengalami pergeseran secara signifikan walaupun sektor pertanian masih lebih tinggi sedikit dari sektor industri pengolahan. Masih tingginya kontribusi sektor pertanian adalah disebabkan pembangunan sektor industri diarahkan pada sub-sektor agroindustri sehingga kedua sektor tersebut akan mengalami kemajuan secara paralel. Pergeseran ketiga sektor dominan yaitu sektor pertanian, industri pengolahan dan jasa perdagangan dalam periode 2005-2025 jika tidak dilakukan upaya mendasar diperkirakan adalah seperti terlihat dalam Tabel-13. Pada masa lalu upaya untuk mengintegrasikan ketiga sektor dominan pertanian, industri dan perdagangan tidak pernah memberikan hasil yang memuaskan meskipun secara kelembagaan baik ditingkat pusat maupun di tingkat provinsi, kedua sektor industri dan perdagangan telah ditempatkan dalam departemen/dinas yang sama.

Tabel-13 memperlihatkan bahwa pergeseran antara sektor pertanian dan industri dalam perekonomian Sumatera Utara berlangsung sangat lambat. Perobahan struktur kearah penguatan sektor industri dan perdagangan akan dapat diwujudkan apabila pembangunan ekonomi Sumatera Utara mampu mengintegrasikan ketiga sektor tersebut sebagai satu kesatuan utuh dalam memenuhi persyaratan pasar global. Kesulitan dalam mengintegrasikan ketiga sektor tersebut diperkirakan masih akan terjadi tetapi mengingat terbatasnya pilihan yang dapat diambil dalam memberdayakan potensi ketiga sektor tersebut maka dalam periode yang akan datang langkah-langkah yang lebih serius harus dilakukan melalui kebijakan pembangunan agropolitan baik di kawasan dataran tinggi, kawasan pantai, kawasan kepulauan dan lain-lain.

Tabel-13
Perkiraan Pergeseran Pada Kontribusi Sektor-sektor Dominan Pertanian, Industri Manufaktur dan Jasa Perdagangan Pada Periode 2005-2024*

Periode	Sektor			
	Pertanian (%)	Industri	Perdagangan (%)	Lain-lain (%)
2005-2009	28,50	25,25	17,50	28,75
2010-2014	28,00	25,60	18,80	27,60
2015-2019	27,50	26,20	18,50	27,00
2020-2024	27,00	26,70	19,40	26,90

* Jika penanggulangan secara mendasar tidak dilakukan.

4) Pembangunan sektor pertanian harus semakin dikonsentrasikan pada pembangunan sistem pertanian alam (*nature farming system*) pada komoditas yang dibutuhkan pasar global. Kondisi pemasaran komoditas Sumatera Utara yang saat ini semakin terpuruk baik dipasar global maupun domestik karena faktor mutu dan jarak mestinya menjadi pelajaran berharga untuk segera mengambil kebijakan lebih tepat.

5) Pembangunan sektor industri dibutuhkan untuk mendukung sektor pertanian baik untuk pengadaan input pertanian seperti mesin dan alat-alat pertanian, bahan-bahan organik untuk pertanian, mesin dan alat pengolah hasil pertanian dan alat-alat transportasi hasil-hasil pertanian dan hasil-hasil industri .

6) Dalam sektor perdagangan, pelaku-pelaku usaha khususnya golongan kecil dan menengah perlu memodernisasi sistem pelayanan menuju pelayanan modern yang berbasis teknologi elektronik. Pesatnya perkembangan teknologi baik teknologi manufaktur, teknologi transportasi, dan teknologi informasi, pasar global semakin menghindari transaksi tatap muka dan transaksi berbasis aliran kertas. Peranan lembaga perantara dalam perdagangan modern semakin menurun para pebisnis semakin mengandalkan sistem perdagangan berbasis elektronik (*e-business*) karena lebih cepat, lebih murah dan lebih akurat. Bisnis yang tidak dapat diakses oleh pelanggan potensialnya melalui teknologi informasi akan sulit berperan dipasar global.

7) Penggalan sumberdaya alam khususnya pertambangan yang pada masa lalu masih sebatas eksplorasi sudah harus ditingkatkan ke sampai kegiatan produksi untuk lebih menggerakkan perekonomian pedesaan dan meragamkan komditi Sumatera Utara. Sumberdaya alam khususnya sumberdaya energi perlu secara dieksplotasi secara optimal untuk menekan kekurangan pasokan listrik yang sangat dibutuhkan dalam menggerakkan pembangunan Sumatera Utara.

BAB III

VISI, MISI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Umum

Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang mencakup rentang waktu 20 tahun kedepan hanya dapat disusun apabila 'wujud' daerah Sumatera Utara yang ingin dicapai dalam rentang waktu tersebut telah dirumuskan dengan jelas. Wujud yang ingin dicapai tersebut harus benar-benar mampu menjawab permasalahan strategis masyarakat sehubungan dengan perubahan dan perkembangan lingkungan eksternal baik dalam lingkup lokal maupun domestik dan global.

Dengan memperhatikan kondisi masa lalu dan capaian, analisis peluang dan ancaman, proyeksi permasalahan, proyeksi dan prediksi keberhasilan serta perkembangan global dan keinginan masyarakat Sumatera Utara yang terus tumbuh dan berkembang seperti telah dibahas dalam Bab II, maka rumusan visi dan misinya pembangunan Sumatera Utara untuk jangka waktu 20 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

3.2 Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang beriman, maju, mandiri, mapan dan berkeadilan di dalam kebhinekaan.

Penjelasan:

- 1). Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang beriman yaitu masyarakat yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat yang mengamalkan ajaran agamanya dengan sepenuh hati, konsisten dan konsekuen, masyarakat yang memiliki sikap yang kuat untuk saling menghargai dan menghormati antar sesama pemeluk agama dalam bingkai keluarga besar masyarakat Sumatera Utara.
- 2). Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang maju, yaitu masyarakat yang berpengetahuan dan sadar akan supremasi hukum serta selalu menggunakan nurani dan akal sehat dalam mengambil keputusan, dapat mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan global, namun tetap mempertahankan identitas masyarakat Sumatera Utara yang majemuk.
- 3). Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang mandiri serta percaya diri, yaitu masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan potensi daerah dan

karenanya dapat menetapkan dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat itu sendiri.

4). Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang mapan yaitu masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara berimbang jasmani dan rohani, memiliki daya tahan terhadap pengaruh luar yang bersifat merusak, mampu meningkatkan kualitas kehidupannya termasuk lingkungan hidup yang semakin layak dengan tingkat kesenjangan yang semakin kecil.

5). Terwujudnya masyarakat yang berkeadilan di dalam kebhinekaan yaitu masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban atau proporsional dalam lingkup masyarakat yang hidup secara harmonis, sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang merasa terpinggirkan atau terlupakan.

6). Tata pemerintahan yang baik atau *good governance* menganut prinsip-prinsip akuntabilitas, pengawasan, daya tanggap, profesionalisme, efisiensi dan efektifitas, transparansi, kesetaraan, wawasan kedepan, partisipasi dan penegakan hukum.

Misi

Untuk mewujudkan visi daerah Sumatera Utara, dibutuhkan berbagai upaya yang harus dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1). Memperkuat akhlak dan moral penyelenggara pemerintahan dan pelaku ekonomi masyarakat melalui peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2). Memantapkan sistem pembinaan aparatur pemerintahan yang berkualitas, menekan peluang KKN untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sebagai landasan pembangunan masyarakat madani.

3). Mendorong tumbuhnya lingkungan yang kondusif dalam penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.

4). Memantapkan prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah, meminimumkan kesenjangan ketersediaan prasarana dan sarana antar wilayah melalui kerjasama antar wilayah, kerjasama pemerintah daerah dan swasta serta kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga-lembaga ditingkat regional dan tingkat internasional.

5). Memantapkan sendi-sendi pembangunan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada pertanian, agriondustri, kepariwisataan serta sektor unggulan lainnya melalui pembangunan Kawasan Agropolitan maupun Kawasan Agromaripolitan untuk merangsang investasi dalam dan luar negeri yang memanfaatkan sumberdaya alam lokal secara berwawasan lingkungan.

6). Memantapkan sistem pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia berkualitas yaitu yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi serta semangat partisipatoris yang kuat dalam pembangunan lingkungannya secara keseluruhan.

7). Meningkatkan rasa keadilan, kesetaraan, kebersamaan dan rasa persatuan dalam masyarakat yang perwujudannya terlihat antara lain dari kemajemukan komposisi dalam pemerintahan dalam arti luas.

Penjelasan butir-butir Misi

1) Memperkuat akhlak dan moral melalui peningkatan keimanan dan ketaqwaan.

Setiap orang baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat Sumatera Utara apabila memiliki akhlak dan moral yang tinggi yang dibangun melalui keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa akan dapat menangkal pengaruh-pengaruh negatif yang datang dari dalam dan luar negeri. Disamping itu masyarakat yang beriman kuat dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa akan cinta kepada kerukunan baik antar pemeluk agama, antar agama dan antar pemeluk agama dan masyarakat.

2) Memantapkan sistem pemerintahan yang berkualitas.

Tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan agar setiap sumber daya yang dimanfaatkan dalam membangun daerah dan bangsa dapat mencapai hasil guna dan daya guna yang maksimal. Tata pemerintahan yang baik hanya dapat diwujudkan apabila aparatur sebagai tulang punggung pembangunan juga cukup kuat. Aparatur yang kuat akan tercipta melalui sistem pembinaan yang berkualitas tinggi.

3) Mendorong tumbuhnya lingkungan yang kondusif dalam penegakan hukum.

Pembangunan daerah sangat membutuhkan kepastian hukum yang mantap guna menghilangkan keragu-raguan para investor dalam dan luar negeri. Pemerintah Provinsi

harus mendorong dan secara proaktif membantu aparat/ instansi penegakan hukum untuk terwujudnya lingkungan yang kondusif dalam penegakan hukum.

4) Memantapkan prasarana dan sarana ekonomi/fisik daerah

Kecukupan prasarana dan sarana ekonomi/fisik wilayah merupakan persyaratan utama dalam percepatan pembangunan daerah. Wilayah yang memiliki prasarana dan sarana wilayah yang lebih lengkap selalu menunjukkan keberhasilan pembangunan yang lebih baik. Karena pembangunan daerah menganut azas pemerataan maka untuk menghindari kesenjangan wilayah dalam ketersediaan prasarana dan sarana ekonomi/fisik wilayah maka kerjasama antar daerah (kabupaten/kota) dalam pembangunan sarana dan prasarana wilayah serta keterlibatan swasta perlu digalakkan antara lain jalan lingkar luar Danau Toba, Tanjung Morawa-Saribu Dolok-Tongging (Rawa Saring) dan jalan menyusuri Pantai Timur.

5) Memantapkan sendi-sendi pembangunan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sektor pertanian, agroindustri, kepariwisataan dan sektor unggulan lainnya melalui pembangunan kawasan agropolitan untuk merangsang investasi dari dalam dan luar negeri.

Pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan melalui pembangunan kawasan agropolitan sangat efektif untuk menggali potensi sumberdaya pedesaan karena bersifat komprehensif dan multisektor, serta mensinergikan pembangunan antar daerah. Melalui pendekatan pembangunan kawasan agropolitan, daya tarik investasi diperkirakan akan tinggi sehingga pemerataan pembangunan antar daerah semakin tercapai.

6) Memantapkan sistem pendidikan pada semua jenjang untuk menciptakan sumberdaya manusia berkualitas yaitu cerdas, kreatif, inovatif, produktif dengan etos kerja yang tinggi dan semangat partisipatoris yang kuat dalam membangun lingkungannya secara keseluruhan.

Manusia berkualitas hanya akan tercipta melalui sistem pendidikan yang baik yaitu guru-guru berkualitas yang didukung oleh ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan yang berkualitas, dan sistem rekrutmen yang menjamin objektivitas. Karena untuk menciptakan sistem yang demikian dibutuhkan investasi yang besar maka kerjasama yang kuat antar daerah dan dukungan masyarakat khususnya untuk mendukung pemerataan sekolah berkualitas di pedesaan.

7) Meningkatkan rasa keadilan, kesetaraan, kebersamaan dan rasa persatuan dalam masyarakat

Kebhinekaan Sumatera Utara yang terlihat dari masyarakatnya yang multi etnik, dan multi religion memiliki kerawanan ditinjau dari sudut persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, setiap sumber yang potensial memunculkan kerawanan seperti homogenitas yang mengarah kepada disharmonisasi kerja dalam jabatan pemerintahan perlu diminimalkan. Kebinekaan pada dasarnya adalah keragaman potensi yang apabila dipadukan secara harmonis dengan cara memanfaatkan secara maksimal tenaga-tenaga yang telah siap dan membina, mendorong dan memberdayakan secara efektif tenaga-tenaga yang masih tertinggal akan sangat potensial mewujudkan kesejahteraan secara bersama.

8) Mewujudkan Sumatera Utara yang asri dan lestari untuk menjamin keberlanjutan pembangunan

Sumatera Utara yang asri dan lestari merupakan persyaratan bagi kelanjutan pembangunan. Untuk menciptakan Sumatera Utara yang asri dan lestari, pengelolaan pembangunan (penggalian dan pengolahan sumberdaya alam) perlu dilakukan secara bijaksana dalam arti menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, dan pemeliharaan sumberdaya alam serta lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan hidup. Keseimbangan yang dimaksud dicapai melalui pemanfaatan ruang secara serasi antara berbagai pemanfaatan yaitu untuk permukiman, kegiatan sosial-ekonomi, upaya konservasi, keindahan /kenyamanan dan lain-lain.

3.3 Tujuan Pembangunan Daerah

3.3.1 Umum

Arah pembanguan daerah Sumatera Utara pada dasarnya adalah strategi pembangunan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan misi pembangunan guna mencapai tujuan jangka panjang pembangunan Sumatera Utara sebagai upaya untuk mewujudkan visi Sumatera Utara sebagaimana telah dirumuskan diatas. Arah pembangunan jangka panjang harus mencakup arah umum dan arah khusus. Arah umum pembangunan jangka panjang menjelaskan tentang kaidah dan strategi pelayanan umum pemerintah dan pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Arah khusus menjelaskan tentang peran sub-wilayah (kabupaten/kota) di Sumatera Utara yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Sumatera Utara.

3.3.2 Tujuan Pembangunan Jangka Panjang

Tujuan pembangunan jangka panjang Sumatera Utara (2005-2025) ialah mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang produktif, mandiri, berdaya saing kuat baik dalam

bidang ekonomi maupun sosial, berkeadilan dibawah pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang demokratis, bersih dan jujur.

Untuk mencapai tujuan jangka panjang 20 tahun tersebut maka sasaran-sasaran jangka panjang ialah sebagai berikut:

a. Meningkatnya daya saing Provinsi Sumatera Utara baik dalam bidang ekonomi maupun sosial budaya yang membawa masyarakat Sumatera Utara semakin sejahtera.

Kualitas Sumberdaya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia masyarakat Sumatera Utara meningkat secara berkesinambungan sehingga pada akhir tahun 2025, sebanyak 30 % penduduk berada pada kelompok IPM tinggi ($>80,0$), sebanyak 65 % berada pada kelompok IPM moderat atas ($66 < IPM \leq 80$), kelompok IPM moderat bawah ($50 < IPM \leq 66$) tidak lebih dari 5 %. Secara agregat, seluruh kabupaten /kota di wilayah provinsi Sumatera Utara yang mempunyai IPM > 75

Pembangunan sumberdaya manusia Sumatera Utara yang berkualitas dalam jangka panjang antara lain ialah peningkatan derajat kesehatan, pengendalian laju penduduk, peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan pemuda serta perlindungan anak serta peningkatan kesadaran mutu pada masyarakat yang mencakup:

1) Pembangunan kesehatan mencakup peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan melalui upaya peningkatan kesehatan, upaya peningkatan sumberdaya manusia kesehatan, pengadaan peralatan kesehatan dan obat-obatan yang berkualitas serta pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan termasuk dorongan bagi investasi swasta untuk membangun pusat-pusat pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi dengan jumlah yang semakin memadai kebutuhan.

2) Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dilakukan melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana.

3) Pembangunan pendidikan mencakup peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pendidikan yang sesuai dengan laju permintaan jasa pendidikan baik dipertanian maupun dipedesaan diseluruh wilayah Sumatera Utara untuk dengan tetap memperhatikan pencapaian keberhasilan wajib belajar 12 tahun di setiap bagian wilayah. Penambahan tenaga guru baik ditingkat sekolah dasar maupun sekolah lanjutan pertama dan sekolah lanjutan atas perlu dipenuhi sesuai kebutuhan /perkembangan jumlah murid, ditingkatkan mutunya melalui kursus, pelatihan dan permagangan sehingga mampu

menghasilkan lulusan yang berkualitas. Fasilitas sekolah-sekolah baik bangunan, peralatan administrasi dan laboratorium perlu dilengkapi sehingga mencapai paling tidak pada tingkat kebutuhan minimal. Kesenjangan mutu pendidikan antar kota dan desa dan antar daerah perlu diatasi.

4) Pemberdayaan perempuan mencakup peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan termasuk hak-hak demokratis yang melekat pada perempuan.

5) Pembangunan pemuda meliputi peningkatan kualitas sumberdaya pemuda yang memiliki etos kerja tinggi dan dengan kesadaran mutu dan semangat berbangsa dan bernegara yang tinggi sehingga selain dapat berperan sebagai sumber tenaga kerja produktif daerah juga dapat diandalkan sebagai calon-calon pemimpin daerah /nasional dan salah satu elemen dari benteng pengaman bangsa dan negara.

6) Penanaman budaya mutu (*quality conciousness*) pada masyarakat baik diperkotaan maupun di pedesaan serta nilai-nilai yang menghargai prestasi kerja dan kegiatan produktif, efisien, serta memiliki kemampuan jauh kedepan.

7) Peningkatan kemandirian anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya khususnya kebutuhan dasar (*basic needs*) baik secara ekonomi maupun sosial khususnya termasuk pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) antara lain ialah pembebasan masyarakat dari kemiskinan, pengangguran, perbaikan kesehatan dan lain-lain,

Pertumbuhan Ekonomi

Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkesinambungan (berkisar 6,0-8,2 % pertahun), menguatnya struktur ekonomi serta semakin meningkatnya daya saing global produk-produk daerah Sumatera Utara. Pendapatan per kapita masyarakat pada akhir tahun 2025 akan mencapai US \$ 7.100, tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin kurang dari 5 %.

1) Perbaikan struktur ekonomi Sumatera Utara dan persebaran pertumbuhan masing-masing sektor yang harmonis sehingga perekonomian Sumatera semakin kokoh terlihat dari keterkaitan yang kuat antara sektor primer (pertanian dan pertambangan /penggalian), sektor sekunder (industri pengolahan dan konstruksi) dan sektor tertier (perdagangan, keuangan dan jasa-jasa). Kontribusi sektor sekunder diperkirakan akan telah mencapai 45 %, sektor primer sebesar 20 %, sektor tertier 25 % dan lain-lain sebesar 15 %.

2) Peningkatan pertumbuhan sektor industri manufaktur secara berkesinambungan untuk mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 10-12 % per tahun dengan menekankan peningkatan kontribusi sub sektor agroindustri seperti industri pembuatan alat dan mesin-mesin pertanian (mesin pengolahan pupuk/pestisida organik, alat-alat pengolahan lahan pertanian), mesin-mesin pengolahan hasil pertanian dan alat-alat angkutan hasil-hasil pertanian.

3) Peningkatan kualitas objek-objek wisata serta penguatan interlinkage dengan objek-objek wisata domestik lainnya sehingga kompetitif dengan objek-objek wisata maju di luar negeri khususnya objek wisata Danau Toba, Danau Sias dan Muara Opu (Tapanuli Selatan) yang didukung oleh jaringan angkutan udara regional Sumatera Utara yang semakin handal.

4) Peningkatan kemandirian Usaha Kecil dan Menengah mencakup peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pengembangan SDM yang memadai dan pembinaan dan pematapan sistem pemasaran.

5) Pembinaan dan peningkatan kewirausahaan para pedagang kaki lima (PKL) serta penataan lokasi kegiatan usaha yang serasi dengan pertumbuhan kota sehingga searah semakin efektif berubah status menjadi usaha kecil formal yang berdaya saing.

6) Peningkatan jaringan prasarana jalan dan jembatan, pelabuhan laut dan udara yang semakin terintegrasi, mencukupi dan pada kualitas yang mantap. Peningkatan fasilitas pelabuhan udara regional sehingga mampu memberikan pelayanan secara maksimal.

7) Peningkatan pasokan tenaga listrik secara berkelanjutan agar mampu memenuhi pertumbuhan permintaan yang pada harga pasar yang bersaing melalui pemanfaatan sumber-sumber daya energi lokal secara efisien. Pelayanan pos dan telematika yang mampu mengikuti perkembangan teknologi. Sumber-sumber daya air semakin terpelihara sehingga mampu memenuhi permintaan yang terus berkembang.

8) Pembangunan Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan dan Kawasan Agromarinopolitan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk pembangunan infrastruktur ekonomi di pulau-pulau terdepan yang handal dan efektif dalam mengintegrasikan wilayah-wilayah (kabupaten-kabupaten terkait) dalam memodernisasi kegiatan ekonomi (pertanian) di pedesaan untuk membebaskan masyarakat desa dari pemerasan, dan kemiskinan baik di wilayah Dataran Tinggi maupun di wilayah pesisir Pantai Barat dan pantai Timur .

Kebutuhan Pangan

Terpenuhinya kebutuhan pangan khususnya bahan makanan pokok secara berkelanjutan yang ditandai dari terjangkaunya kebutuhan pangan oleh setiap rumah tangga secara cukup, bermutu dan aman serta menjadikan Sumatera Utara sebagai salah satu lumbung beras nasional yang handal. Pembangunan tanaman pangan mencakup:

- 1) Pemberdayaan masyarakat tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan di wilayah-wilayah kantong-kantong produksi tanaman pangan melalui pemantapan model kelompok tani yang berwawasan lingkungan.
- 2) Pemantapan sistem pengadaan dan distribusi bibit tanaman pangan unggul serta sarana produksi pendukungnya seperti pupuk, bahan pestisida dan lain-lain untuk menjamin ketersediaan yang mencukupi pada waktu dibutuhkan.
- 3) Pengembangan pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam (diversifikasi bahan pangan), bergizi dan berimbang sehingga tidak bergantung pada bahan pokok beras secara berlebihan.
- 4) Pemenuhan kebutuhan irigasi di kawasan kantong kantong produksi tanaman pangan serta pelestarian kualitas dan luasan areal pertanian tanaman pangan di kawasan kantong-kantong produksi.

b. Terwujudnya Sumatera Utara yang demokratis, berlandaskan hukum.

Sumatera Utara yang demokratis dan berlandaskan hukum adalah harapan semua orang karena merupakan prasyarat bagi terciptanya perlindungan terhadap hak-hak sosial ekonomi dan politik setiap anggota masyarakat ditengah kehidupan yang semakin kompleks. Perwujudan Sumatera Utara yang demokratis berlandaskan hukum mencakup:

- 1) Percepatan terciptanya *good governance* (transparansi, akuntabel, responsibel, mandiri, kesetaraan) pada pemerintahan provinsi khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepentingan masyarakat.
- 2) Pemantapan kesadaran hukum pada masyarakat, dan peningkatan kemampuan menghargai oleh semua pihak terhadap hak-hak melekat pada individu atau kelompok .
- 3) Penguatan kesadaran segenap lapisan masyarakat dalam melaksanakan peranannya pada semua kegiatan yang bercirikan demokratisme seperti pemilu, pilkada, pilkades dan lain-lain.

4) Perlindungan secara utuh bagi seluruh kelompok masyarakat Sumatera Utara dalam semua aspek kehidupan yang berkaitan dengan pemanfaatan hak-hak demokratis.

c. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi masyarakat serta terlindunginya semua kepentingan yang merupakan hak masyarakat.

Pembangunan untuk mewujudkan rasa aman dan damai bagi masyarakat serta terlindunginya semua kepentingan yang merupakan hak masyarakat mencakup:

1) Penguatan komitmen kerjasama yang kuat antara Pemerintah Provinsi dan aparat penegak hukum yang meliputi Polri, dan kejaksaan, kehakiman dan dalam membasmi secara tuntas penyakit-penyakit sosial pada masyarakat.

2) Penguatan rasa solidaritas dikalangan masyarakat terutama LSM, pers, organisasi profesi, kelompok-kelompok karismatik dan agama terutama terhadap individu atau kelompok yang dirugikan oleh pihak lain.

3) Mendorong peran aktif masyarakat luas dalam penciptaan lingkungan yang aman dan damai di daerah masing-masing serta memberikan jaminan perlindungan kepada anggota masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan lingkungan aman dan damai.

d. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Tingkat pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya diantara seluruh lapisan masyarakat sering digunakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Hal ini penting karena setiap anggota masyarakat tidak memiliki kemampuan yang sama terhadap akses sumber-sumber daya ekonomi dan sosial. Sesuai dengan makna pembentukan suatu negara, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus mampu mewujudkan pemerataan secara berkeadilan. Pemerataan pembangunan dan perwujudan keadilan di seluruh wilayah Sumatera Utara yang mencakup:

1) Pengintegrasian dan pengkoordinasian rencana dan implementasi prioritas-prioritas pembangunan antar seluruh wilayah di Sumatera Utara, yang didukung oleh sarana dan prasarana ekonomi wilayah yang bermutu dan cukup sehingga kesenjangan antar daerah dalam semua aspek kehidupan semakin rendah.

2) Pemenuhan kebutuhan pendidikan (gedung sekolah, guru, alat belajar mengajar), dan kesehatan (rumah sakit / poliklinik / posyandu, dokter, perawat, obat-obatan) yang bermutu dan cukup pada setiap wilayah termasuk pedesaan sesuai dengan

perkembangan kebutuhan masyarakat dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

3) Pemenuhan kebutuhan perumahan serta prasarana dan sarana penunjang yang layak baik di kota maupun pedesaan yang terhindar dari kesan kumuh.

4) Meningkatkan keterampilan dan etos kerja masyarakat khususnya anggota masyarakat / kelompok tertinggal serta memfasilitasi kerja produktif kelompok bersangkutan untuk menanggulangi kemiskinan secara berarti.

5) Menghilangkan segala bentuk diskriminasi termasuk diskriminasi jender dalam semua aspek kehidupan masyarakat baik dalam mendapatkan pelayanan sosial, lapangan pekerjaan, akses terhadap sumber daya ekonomi dan lain-lain

e. Terwujudnya Sumatera Utara yang asri dan lestari di seluruh wilayah termasuk di pedesaan.

Kelestarian dan keasrian lingkungan telah menjadi tema sentral pembicaraan diseluruh dunia termasuk di Indonesia /Sumatera Utara. Hal ini disebabkan lingkungan hidup baik didarat, laut dan udara telah mengalami pencemaran yang semakin mendekati titik kritis. Jika masalah ini tidak ditanggulangi secara serius sangat dikhawatirkan dampak negatif yang tak tertahankan akan terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pembangunan lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam di seluruh wilayah Sumatera Utara termasuk pedesaan mencakup:

1) Peningkatan kualitas pengelolaan dan pendayagunaan ruang dan sumberdaya alam secara serasi, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang terlihat dari terpeliharanya fungsi dan daya dukung lingkungan dan ekosistem (Danau Toba, Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Batang Gadis, Daerah Aliran Sungai Deli, Sungai Belawan, Sungai Belumai, Sungai Ular, Sungai Asahan, Sungai Bilah, Sungai Barumon dan Kawasan Pantai Timur) serta kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi yang secara serasi, seimbang dan lestari.

2) Penguatan perlindungan dan kualitas pemeliharaan kekayaan keragaman, jenis dan kekhasan sumberdaya alam untuk mewujudkan nilai tambah sumberdaya alam Sumatera Utara seperti kehutanan, sungai, danau, perairan dan kelautan dan lahan-lahan pertanian subur.

- 3) Peningkatan kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
- 4) Peningkatan kesadaran masyarakat industri dan masyarakat lain yang dalam kegiatan produksinya terkait dengan masalah-masalah pencemaran lingkungan untuk mengintegrasikan pengembangan usaha dengan pencegahan pencemaran lingkungan.
- 5) Peningkatan keberpihakan kepada masyarakat tertinggal baik dalam hal ekonomi maupun sosial untuk menghindarkan gangguan mereka terhadap lingkungan

f. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermoral, beretika, beriman dan berbudaya.

Terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang harmonis, penuh toleransi, dan tenggang rasa. Disamping itu, kesadaran akan budaya akan membentuk identitas diri yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa sehingga bersma-sama dengan kearifan lokal akan mampu merespons modernisasi secara positif dan produktif. Dengan demikian, pembangunan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat bermoral, beretika dan berbudaya di Sumatera Utara mencakup:

- 1) Pembangunan karakter masyarakat Sumatera Utara yang tangguh, kompetitif dan bermoral tinggi yang dicirikan oleh watak dan perilaku manusia yang beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, dinamis dan berpengetahuan.
- 2) Penjalinan sistem komunikasi yang positif antar kelompok-kelompok etnis, agama, suku dan kelompok-kelompok yang menunjang kepada menguatnya keharmonisan hubungan antar semua kelompok yang ditandai dari tumbuhnya kemampuan menghargai nilai-nilai khas yang dijunjung tinggi oleh masing-masing kelompok.
- 3) Penguatan kesamaan persepsi antar semua kelompok tentang urgensi pembangunan daerah Sumatera Utara sebagai sebuah kewajiban bersama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di Sumatera Utara.
- 4) Penguatan peran lembaga-lembaga lintas budaya dalam menanamkan kebersamaan nilai-nilai luhur masing-masing etnis di Sumatera Utara untuk memantapkan sikap saling menghargai menuju kepada terwujudnya rasa persaudaraan dan kebersamaan sebagai warga dalam melaksanakan partisipasi masing-masing dalam pembangunan Sumatera Utara.

3.3.3 Pembangunan Tata Ruang Wilayah

Pembangunan tata ruang wilayah tidak dapat dipisahkan dari pembangunan sektor-sektor karena keterintegrasian seluruh sektor yang dibangun harus terakomodasi dalam tata ruang wilayah (RTRW). Walaupun pada tahap perencanaan, faktor keterintegrasian sektor-sektor telah terakomodasi dengan baik dalam RTRW, dalam implementasi sering berbagai penyesuaian harus dilakukan sehubungan munculnya berbagai faktor (*disturbance factors*) yang sulit diprediksi besarnya dari dalam perencanaan. Salah satu diantara permasalahan yang dimaksud adalah penetapan kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang kurang proporsional pada beberapa kabupaten seperti Mandailing Natal, Dairi dan Tapanuli Selatan yang membuat produktivitas kedua kabupaten tersebut terganggu.

Oleh karena itu, sejalan dengan kemajuan implementasi rencana pembangunan sektoral, review dan penyesuaian RTRW harus dilakukan secara periodik agar daya dukung ruang dan efisiensi pembangunan yang tinggi tetap tercapai. Sasaran pembangunan tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Utara ialah:

a. Terwujudnya tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Utara yang serasi baik dengan RTRW kabupaten/kota maupun dengan kepentingan pembangunan sektoral Sumatera Utara.

Untuk mendapatkan rencana tata ruang wilayah Sumatera Utara terpadu dan serasi dalam upaya meningkatkan pemanfaatan ruang untuk menciptakan lingkungan kehidupan yang efisien dan efektif secara berkelanjutan, pembangunan tata ruang mencakup:

- 1) Pembinaan penataan ruang melalui kerjasama erat antara wilayah-wilayah terkait baik dilingkungan Sumatera Utara maupun dengan wilayah-wilayah berbatasan, sehingga diperoleh tata ruang wilayah yang harmonis baik antar wilayah (provinsi dan kabupaten/kota) maupun antar sektor-sektor
- 2) Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan tata ruang yang telah disusun meliputi pengendalian perijinan secara akurat dan taat azas.
- 3) Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual serta sosialisasi kepada semua pihak terkait untuk memudahkan implementasi dan pengendaliannya dan terhindarnya pemerintah daerah yang berbatasan dari konflik-konflik yang mengganggu kerjasama.

b. Meningkatkan peran sub-wilayah termasuk pengembangan kawasan perbatasan, antar provinsi, kawasan tertentu, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pembangunan wilayah Sumatera Utara dilaksanakan dengan peningkatan peran sub-wilayah pembangunan yang diarahkan pada pemanfaatan sumber daya alam yang berazaskan kelestarian lingkungan yang menjamin terciptanya pembangunan secara berkelanjutan yang mencakup:

1) Pembangunan pedesaan diarahkan pada kegiatan primer yang sekaligus menjadikan daerah pedesaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung.

2) Pembangunan perkotaan diarahkan pada peningkatan kualitas permukiman dikota, peningkatan kualitas dan produktivitas industri, perdagangan dan kegiatan pelayanan jasa lainnya yang menguatkan *interlinkage* perkotaan dan pedesaan untuk mendukung percepatan pembangunan pedesaan.

3) Pembangunan kawasan strategis seperti kawasan Mebidang, kawasan Danau Toba, kawasan ekosistem TNG Lauser diarahkan pada penggalian / pemanfaatan potensi ekonomis, dan sosial dengan tetap mengacu pada kelestarian lingkungan secara maksimal dan termasuk pembangunan kawasan ekonomi khusus sebagai bagian dari pembangunan perekonomian nasional.

4) Pembangunan kawasan andalan yaitu kawasan yang memiliki sektor-sektor unggulan diarahkan pada pemanfaatan potensi unggulan secara maksimal sekaligus mendorong penguatan pembangunan sektor lainnya.

5) Pembangunan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau terpencil diarahkan pada penguatan perlindungan terhadap kelestarian kawasan dengan tetap memperhatikan penggalian potensi ekonomi dan sosial kawasan.

6) Pembangunan kawasan strategis Hankam diarahkan pada penguatan fungsi pertahanan dan keamanan.

c. Terwujudnya percepatan pembangunan prasarana wilayah tertinggal dan daerah terpencil serta wilayah perbatasan.

Percepatan pembangunan prasarana wilayah tertinggal dan daerah terpencil serta wilayah perbatasan mencakup:

1) Peningkatan kerjasama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pembangunan prasarana wilayah/permukiman

2) Peningkatan kemitraan antar pemerintah provinsi dan dan swasta dalam pembangunan prasarana wilayah di wilayah tertinggal dan wilayah terpencil

3) Peningkatan kualitas pembinaan/pelayanan dan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman

4) Peningkatan prioritas pengembangan dan pembangunan daerah tertinggal, terpencil dan daerah perbatasan

BAB IV

ARAH DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

4.4 Arah Pembangunan Jangka Panjang

Telah diuraikan didepan bahwa tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 Sumatera Utara ialah mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang produktif, mandiri, berdaya saing ekonomi dan sosial, berkeadilan dibawah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang demokratis, bersih dan jujur. Juga telah diuraikan sasaran-sasaran yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran tersebut, arah pembangunan Sumatera Utara dalam periode 2005-2025 ialah sebagai berikut.

4.1.1 Mewujudkan rasa aman dan damai bagi masyarakat dan perlindungan terhadap semua kepentingan yang merupakan hak masyarakat

Terwujudnya rasa aman dan damai masyarakat serta terlindunginya kepentingan masyarakat adalah bentuk yang paling dasar dari kesejahteraan masyarakat. Gangguan-gangguan terhadap masyarakat akibat ulah dan tindakan premanisme, pencurian, penculikan bayi bahkan kelompok pencari keuntungan dengan menggunakan bahan-bahan berbahaya dalam bahan makanan sangat meresahkan dan berpengaruh kuat terhadap penurunan kerja produktif masyarakat. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, perwujudan rasa aman, damai dan perlindungan bagi masyarakat diarahkan pada pemantapan kerjasama pemerintah daerah dengan aparat kepolisian serta penguatan sistem keamanan lingkungan oleh masyarakat.

4.1.2 Mewujudkan Sumatera Utara yang bermoral, beretika dan berbudaya.

Untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermoral, beretika dan berbudaya berhubungan erat dengan penanaman secara mendalam nilai-nilai relegius, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan bagi seluruh anggota masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok dan profesi.

1) Pembangunan agama diarahkan untuk menumbuhkan nilai-nilai religius (ketuhanan yang mendalam) dan memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, memupuk etos kerja, serta menghargai tinggi prestasi kerja. Pembangunan agama juga diarahkan pada peningkatan kerukunan hidup umat beragama dengan menumbuhkan rasa saling mempercayai bahwa semua adalah potensi bangsa sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi/ tenggang rasa secara harmonis.

2) Pembangunan / pemantapan nilai-nilai kemanusiaan diarahkan untuk menumbuhkan rasa saling mengasihi, dan kesetiakawanan sosial antar sesama anggota masyarakat tanpa membedakan warna kulit, etnis, gender dan agama sehingga memotivasi terjalannya kerjasama yang harmonis dan saling menguntungkan dalam semua aspek kehidupan masyarakat.

3) Pembangunan nilai-nilai kemasyarakatan diarahkan untuk menumbuhkan sikap saling menghormati atas hak dan kewajiban sosial setiap individu dan kelompok termasuk penghargaan terhadap adat-istiadat dan budaya kelompok masyarakat lain.

4.1.3 Mewujudkan Sumatera Utara yang demokratis dan berdasarkan hukum

Demokratis yang berlandaskan hukum merupakan landasan bagi peningkatan partisipasi masyarakat secara maksimal dalam berbagai kegiatan pembangunan. Tegaknya hukum ditengah-tengah kehidupan masyarakat akan menciptakan kepastian keadilan untuk semua warga dan ketertiban pada masyarakat.

Untuk mewujudkan Sumatera Utara yang demokratis dan berdasarkan hukum diperlukan pengembangan budaya politik masyarakat dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

1) Peningkatan budaya politik masyarakat diarahkan pada penanaman nilai-nilai demokratis yang dilakukan melalui penciptaan kesadaran terhadap nilai-nilai politik demokratis terutama terhadap nilai Hak Azasi Manusia, nilai-nilai persamaan, dan anti kekerasan.

2) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap arti penting dan keuntungan dari perlindungan dan penjaminan terhadap hak-hak politik masyarakat dilakukan melalui pengembangan sistem komunikasi yang efektif dengan semua lapisan masyarakat melalui berbagai media yang efektif seperti dialog langsung, surat kabar, televisi dan lain-lain yang dapat diakses oleh masyarakat.

3) Pembangunan hukum diarahkan pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap wibawa hukum, penegakan secara konsekuen kekuatan hukum baik terhadap masyarakat maupun pejabat pemerintah dan kelompok-kelompok lain yang melanggar untuk memastikan bahwa tidak ada siapapun yang akan terbebas dari hukum apabila terkait dengan pelanggaran

4.1.4 Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan

Pembangunan yang merata dan dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat sesuai dengan kontribusi masing-masing akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan serta menurunkan potensi konflik di masyarakat.

- 1) Untuk menciptakan pembangunan yang merata dan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, pembangunan wilayah diarahkan pada pemanfaatan potensi sumberdaya daerah dan keunggulan masing-masing kabupaten / kota yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara merata.
- 2) Untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat, pembangunan dilakukan dengan lebih berpihak kepada pembangunan kelompok masyarakat di bagian daerah / kabupaten yang relatif masih tertinggal atau kurang beruntung yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan pelayanan publik dan keprihatinan dengan tetap memperhatikan keterkaitan yang saling menguntungkan dengan kabupaten yang lebih cepat tumbuh dan berkembang.
- 3) Pembangunan pedesaan diarahkan pada pemberdayaan ekonomi rakyat pedesaan agar semakin memperlihatkan penguatan pada ciri agroindustri yang padat pekerja, pengembangan jaringan infrastruktur pedesaan termasuk pembangunan sistem pemasaran yang mantap bagi komoditas masyarakat pedesaan.
- 4) Peranan koperasi dan usaha mikro yang sangat efektif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata dan berkeadilan perlu semakin dimantapkan melalui pembangunan koperasi yang diarahkan pada peningkatan profesionalisme pengurus dan peningkatan pemahaman seluruh para anggota.
- 5) Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan non-diskriminatif.
- 6) Pembangunan Kepemudaan (Asosiasi Pemuda, Mahasiswa) diarahkan secara bertahap dan dilaksanakan guna menciptakan lapangan kerjanya.

4.1.5 Menumbuhkan daya saing Sumatera Utara dalam bidang ekonomi, sosial budaya yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat

1) Untuk menumbuhkan daya saing Sumatera Utara di bidang perekonomian guna mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi dan efektif untuk menciptakan lapangan kerja, pembangunan ekonomi daerah perlu diarahkan kepada transformasi secara bertahap dari perekonomian berbasis komparatif sumberdaya alam menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif seperti keunggulan mutu, keunggulan dalam distribusi /ketersediaan tepat waktu, keunggulan efisien/ harga dan keunggulan pelayanan. Untuk itu interaksi antara kabupaten /kota perlu didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh.

2) Pembangunan daya saing dibidang perekonomian juga diwujudkan melalui perbaikan struktur ekonomi Sumatera Utara dengan mendudukkan sektor industri (agroindustri) yang mengolah bahan baku sektor primer (pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan) dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan daya inovatif sehingga mampu menghasilkan produk-produk bermutu yang memenuhi keinginan pasar yang terus berkembang. Untuk itu kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi sumberdaya manusia khususnya pada sektor produksi perlu ditingkatkan secara bertahap dan berkesinambungan melalui pendidikan, pelatihan dan permagangan sesuai dengan kebutuhannya termasuk kerjasama dalam pengadaan input pertanian yang meliputi alat dan mesin pertanian dan sarana produksi lainnya berbasis kekuatan lokal.

3) Pembangunan daya saing ekonomi dalam sektor produksi dan jasa berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi diwujudkan melalui pembangunan sumberdaya manusia sehingga semakin memiliki kemampuan bekerja berdasarkan ilmu pengetahuan. Untuk menciptakan keadaan tersebut pembangunan sumberdaya manusia Sumatera Utara diarahkan kepada penumbuhan *learning habit* dan *training habit* khususnya pada usia produktif baik secara melembaga maupun secara individual. Dengan demikian, pendidikan anak usia dini (PAUD), program wajib belajar 12 tahun, peningkatan kualitas sekolah umum dan lembaga-lembaga pelatihan termasuk sarana perpustakaan umum berkualitas harus terwujud atau diwujudkan.

4) Pembangunan kelembagaan ekonomi daerah diarahkan kepada penciptaan iklim ekonomi yang kondusif ditinjau dari sudut perijinan, persaingan yang sehat, perlindungan konsumen, penguatan usaha kecil /menengah dan usaha-usaha mikro serta pembinaan jaringan distribusi pemasaran yang sehat dan efektif untuk menjamin pasar bagi produk-produk usaha kecil dan menengah.

5) Pembangunan pertanian rakyat dalam arti luas (pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan rakyat, dan perikanan) diarahkan pada modernisasi kegiatan pertanian khususnya pertanian rakyat dalam arti secara bertahap para petani semakin mampu menggunakan teknologi pertanian yang lebih maju baik dalam pengadaan bibit unggul dan pemanfaatan peralatan/ teknologi budi daya dan pasca panen untuk meningkatkan mutu, efisiensi dan nilai tambah sehingga efektif mendukung pertumbuhan ekonomi pertanian (agribisnis) di Sumatera Utara.

6) Pembangunan sektor pertanian dalam arti luas juga diarahkan kepada tercapainya keseimbangan pemanfaatan lahan-lahan pertanian untuk kepentingan ekonomi dan kepentingan ketahanan pangan. Sehubungan dengan itu agar kebutuhan lahan tidak meningkat secepat pertumbuhan penduduk maka intensifikasi sektor pertanian sudah sangat mendesak dilakukan.

7) Pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi termasuk para pedagang kaki lima (PKL) diarahkan pada penguatan sumberdaya pelaku usaha / kewirausahaan agar semakin mampu berperan sebagai salah satu pelaku ekonomi formal yang handal berdampingan secara harmonis / saling mendukung dengan pelaku ekonomi lainnya baik swasta maupun pemerintah secara berkelanjutan.

8) Pembangunan kepariwisataan diarahkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi pariwisata yang secara signifikan dan efektif menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan khususnya bagi masyarakat lokal di objek-objek wisata yang tersebar diseluruh wilayah Sumatera Utara.

9) Pembangunan sektor perdagangan melalui pembinaan mata rantai perdagangan yang jelas, tegas dan terkendali serta transparan khususnya tentang harga, persyaratan mutu yang diinginkan pasar sehingga seluruh kepentingan kelompok masyarakat khususnya di sektor produk terlindungi.

10) Pembangunan pertambangan dan penggalian diarahkan agar memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat dengan tetap mengedepankan terpeliharanya kelestarian lingkungan dan tetap berpedoman pada Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota atau skenario pengembangan wilayah lainnya.

11) Pembangunan sosial budaya masyarakat melalui penguatan nilai-nilai luhur budaya daerah sebagai bagian dari nilai budaya nasional yang mendukung kepada peningkatan etos kerja, keharmonisan hubungan antar warga serta meningkatkan kesediaan dan kemampuan menerima nilai-nilai positif dari luar yang mendukung peningkatan etos kerja

dan mutu kerja. Pembangunan sosial budaya juga diarahkan pada peningkatan kemampuan menangkal nilai-nilai negatif yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang secara positif dimasyarakat. Pembangunan sosiol budaya perlu dilakukan secara serius dan berkelanjutan karena jika tidak berhasil maka dia akan menjadi penghambat serius terhadap pergerakan roda pembangunan ekonomi daerah.

12) Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial budaya (prasarana jalan / jembatan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, jaringan kereta api beserta sarana transportasi, air /irigasi, listrik dan lain-lain) melalui penggalian potensi alam Sumatera Utara secara optimal baik melalui kerjasama antar daerah maupun kerja sama daerah dengan pihak swasta sehingga secara bertahap dan pasti semakin mampu memenuhi kebutuhan daerah yang terus meningkat.

4.1.6 Mewujudkan Sumatera Utara yang asri dan lestari di seluruh wilayah termasuk dipedesaan

Sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang asri dan lestari merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional maupun pembangunan daerah karena merupakan pondasi dari sistem kehidupan. Sumberdaya alam yang lestari akan menjamin tersedianya secara berkelanjutan setiap sumberdaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan. Lingkungan hidup yang asri merupakan prasyarat bagi peningkatan kualitas hidup. Oleh karena itu dalam mewujudkan Sumatera Utara yang asri dan lestari, pembangunan lingkungan diarahkan kepada:

1)Penggalian dan pemanfaatan sumber alam Sumatera Utara diarahkan kepada peningkatan nilai tambah yang tinggi berbasis tata ruang wilayah yang serasi dan terpadu antara sektor dan antar wilayah yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup dan memberikan kontribusi secara adil kepada wilayah-wilayah terkait dan kepada pihak yang melakukan kegiatan penggalian dan pengolahan.

2) Pendayagunaan sumberdaya alam terbarukan baik di darat maupun di laut secara optimal dalam arti mempertimbangan secara seksama keseimbangan antara pemanfaatan dan kemampuan regenerasi, mencegah terjadinya kerusakan lingkungan oleh setiap kegiatan eksploitasi sumberdaya alam yang kurang terencana, dan secara maksimal menginvestasikan kembali sebagian hasil-hasil eksploitasi sumberdaya alam untuk menumbuhkembangkan pemulihan, rehabilitasi dan pencadangan untuk generasi mendatang.

3) Pengelolaan sumberdaya alam yang tak terbarukan seperti bahan-bahan tambang, mineral dan sumberdaya energi yang banyak terdapat di Sumatera Utara diarahkan pada

peningkatan nilai tambah secara maksimal melalui proses pengolahan industrial dan bukan mengkonsumsinya secara langsung, serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. Pemeliharaan sumberdaya energi yang tak terbarukan diarahkan pada pemanfaatan sumberdaya energi alternatif yang bersifat terbarukan seperti biogas, biofuel yang dapat dihasilkan di Sumatera Utara.

4) Pengelolaan kelestarian sumberdaya air untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah, menyeimbangkan pasokan dan kebutuhan air pada setiap kegiatan yang membutuhkan sumberdaya air serta memperkuat kelembagaan sumberdaya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

5) Pengembangan potensi sumberdaya kelautan melalui pendayagunaan dan pengawasan dalam pemanfaatannya agar tidak menimbulkan konflik serta tetap menjaga kelestariannya yang menjamin keberlanjutan proses ekonomi, sosial dan lingkungan terutama pada masyarakat pesisir. Pengelolaan potensi sumberdaya kelautan juga dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan antara sektor lautan dan daratan yang menyatu dalam strategi nasional.

6) Peningkatan nilai tambah terhadap pemanfaatan sumberdaya alam daerah yang bersiat unik dan khas dilakukan melalui diversifikasi produk-produk daerah serta mengembangkan inovasi dalam pengolahan sumberdaya alam daerah untuk menghasilkan nilai tambah semaksimal mungkin.

7) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten disemua bidang untuk mencegah degradasi lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya peningkatan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

8) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup terutama bagi generasi muda sehingga tercipta sumberdaya manusia yang peduli terhadap isu-isu sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

9) Pembentukan / pembinaan dan penguatan kelembagaan penanganan bencana alam dengan struktur, uraian tugas dan sumberdaya yang jelas dan memadai guna menumbuhkan profesionalisme dalam penanganan setiap bencana alam di seluruh wilayah Sumatera Utara.

4.2 Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang

Untuk mencapai sasaran pokok jangka panjang sebagaimana telah diuraikan dimuka maka pembangunan jangka panjang yang berjangka waktu 20 tahun dilakukan secara bertahap yang masing-masing tahap berjangka waktu 5 tahun. Masing-masing tahap dikenal sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumatera Utara (RPJM-D). Dengan demikian, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Sumatera Utara seluruhnya terdiri dari 4 RPJM-D dan masing-masing RPJM-D memiliki skala prioritas yang arah pengembangan ruangnya adalah mempersiapkan dukungan ruang bagi penambahan penduduk selama 20 tahun kedepan melalui alokasi ruang dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, struktur kependudukan yang terbentuk, serta kecenderungan distribusi penduduk dalam sektor ekonomi (sesuai pengembangan wilayah) yang sifatnya berkesinambungan secara utuh dan konsisten menuju tercapainya Tujuan Pembangunan Jangka Panjang dan bila terwujudnya Sumatera Utara sebagaimana digambarkan oleh Visi dan Misi seperti yang telah depakati.

Perlu dipahami bahwa dalam setiap tahap pembangunan yang berjangka waktu 5 tahun yang masing-masing memiliki fokus atau konsentrasi sektor-sektor sasaran, tidak berarti sektor lain yang non-prioritas akan diabaikan. Sektor-sektor non-prioritas juga masih tetap mendapat alokasi anggaran yang wajar, capaian target sektor tersebut tidak di 'drive' sedangkan target sektor prioritas di 'drive' namun tetap pada tingkat yang realistis untuk dicapai.

4.2.1 RPJM-D ke-1 (2006-2009)

Berdasarkan kondisi eksternal dan internal Sumatera Utara serta situasi nasional dengan berbagai kecenderungan yang terlihat baik yang bersifat positif maupun negatif dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan kemasyarakatan maka dalam pembangunan jangka menengah periode pertama fokus pembangunan perlu ditekankan pada penciptaan lingkungan masyarakat yang aman, damai, adil dan demokratis. Sangat sulit diharapkan bahwa dalam suasana yang kurang kondusif, masyarakat dan juga aparatur pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa telah dapat diwujudkan dan akan dapat bekerja secara kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kerja produktif seperti dituntut oleh rencana dan program kerja yang telah ditetapkan. Karena terbangunnya kerja produktif masyarakat juga tidak terlepas dari dukungan aparatur pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa maka perwujudan *good governance* juga diharapkan dapat berhasil dengan baik dalam tahap ini.

Perlu disadari bahwa untuk menciptakan suasana Sumatera Utara yang aman, damai dan demokratis, pembangunan harus menumbuhkan berbagai kebutuhan dasar masyarakat seperti bahan pangan, pekerjaan, daya beli, ketersediaan barang dan jasa dan tidak terkecuali jaminan pasar bagi produk-produk mereka. Tidak dapat dipungkiri, meningkatnya kriminalisme dan berbagai gangguan sosial lainnya yang telah demikian meresahkan masyarakat, tidak terlepas dari faktor pengangguran yang tidak hanya menghilangkan pendapatan kelompok masyarakat yang menganggur tetapi juga meruntuhkan sistem nilai sosial dan nilai individu orang-orang yang merasakannya.

Dengan demikian pembangunan ekonomi dan berbagai infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi juga tidak dapat diabaikan karena pertumbuhan ekonomi yang diciptakan oleh pertumbuhan investasi merupakan strategi yang efektif dalam penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sehubungan dengan itu, revitalisasi kelembagaan pusat-pusat pertumbuhan, sekali gus pembangunan infrastruktur ekonomi termasuk penggalian sumber-sumberdaya energi Sumatera Utara secara intensif untuk mempercepat perwujudan Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan, Kawasan Agromarinopolitan, Kawasan Ekonomi Khusus dan kawasan andalan perlu dilaksanakan.

Salah satu faktor lain yang sangat berpengaruh dalam mengganggu kerja produktif masyarakat ialah berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam tahap ini kesiapan lembaga penanggulangan bencana perlu dimantapkan termasuk dalam hal kelengkapan dan sarananya sehingga faktor kesiagaan benar-benar dimiliki masyarakat dan potensi kerugian yang diderita masyarakat akibat bencana alam dapat diminimalkan.

Juga tidak dapat diabaikan pentingnya pembangunan ketahanan pangan. Gangguan terhadap ketersediaan pangan sangat potensial memicu kerusuhan sosial karena kelompok masyarakat yang kurang beruntung dalam memenuhi kebutuhan pangannya merasa berhak untuk mengambilnya secara paksa dari pihak lain. Untuk itu, pembangunan sistem irigasi terutama di wilayah-wilayah kantong produksi padi sawah yang potensial perlu diprioritaskan. Juga pemberdayaan hukum dalam menjamin kepastian hukum terhadap semua pihak yang terkait dengan gangguan sosial, dan ekonomi untuk menjamin rasa keadilan bagi semua pihak. Oleh karena itu dalam tahap ini, dibutuhkan strategi pembangunan untuk mengintegrasikan kebutuhan sosial dan kebutuhan fisik yang disamping strategi pemantapan penegakan hukum. Pada tahap ini, terciptanya *good governance* sudah harus dapat dirasakan oleh masyarakat secara signifikan. Oleh karena itu, penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di pemerintahan provinsi maupun pemerintahan kabupaten kota harus sudah terdorong dengan baik. Pembangunan teknologi informasi untuk membudayakan

pemanfaatannya dalam semua aspek kehidupan masyarakat dan kegiatan pemerintahan perlu ditingkatkan.

4.2.2 RPJM-D ke-2 (2009-2013)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai lanjutan dari RPJM-D ke-1 maka RPJM-D ke-2 difokuskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia Sumatera Utara baik pada tingkat aparaturnya pemerintahan maupun anggota masyarakat terutama pada sektor produksi, dan distribusi/ pemasaran khususnya pada pelaku usaha kecil, menengah / koperasi dan usaha mikro termasuk pembinaan pedagang kaki lima sehingga berkembang menjadi pengusaha kecil formal dengan tetap memelihara dan menunjang pertumbuhan sektor-sektor lain yang telah dicapai pada pembangunan RPJM- D ke-1.

Kesejahteraan masyarakat yang komponen-komponennya adalah tingkat pendidikan, pendapatan perkapita, pemerkerjaan (*employment*), kesehatan dan lain-lain dicerminkan dalam Indeks Pembangunan Manusia. Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara maka strategi yang perlu dikembangkan dalam tahapan ini ialah peningkatan pendapatan per kapita yang sekaligus penurunan angka kemiskinan dan pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (melalui percepatan investasi), pengembangan lembaga jaminan sosial, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang didukung oleh pemantapan pelaksanaan pendidikan formal, mulai dari pendidikan anak usia dini, wajib belajar 12 tahun, peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, peningkatan kesetaraan gender, perlindungan anak, penurunan kesenjangan antar daerah, antar kelompok masyarakat dan antar individu, pengendalian pertumbuhan penduduk.

Pembangunan pendidikan sebagai salah satu pilar peningkatan kualitas sumberdaya manusia diarahkan tidak pada sebatas peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara tetapi juga kepada peningkatan kemandirian bekerja, pembudayaan pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi, serta pematangan psikis dalam lingkungan kerja. Faktor-faktor kritis dalam bidang pendidikan yang perlu mendapat perhatian serius dalam mencapai keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia ialah pengadaan guru-guru bermutu yang semakin mencukupi baik pada sekolah dasar maupun sekolah lanjutan, perbaikan gedung-gedung sekolah terutama di daerah pedesaan, perbaikan/ pengembangan kurikulum serta pengadaan buku-buku yang terjangkau. Pembangunan laboratorium terpadu di kota-kota yang memiliki kemampuan pendanaan perlu didukung untuk dimanfaatkan secara bersama oleh sekolah-sekolah di wilayah kabupaten sekitarnya.

Pembangunan sumberdaya manusia yang menjadi fokus pembangunan dalam RPJP-D ke-2 hendaknya tidak diukur dari jumlah lulusan pendidikan formal baik pada tingkat sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas dan lulusan Perguruan Tinggi semata karena walaupun hal tersebut penting, tidak representatif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi perlu dilihat dari meningkatnya kerja produktif dalam penggalian dan pengolahan sumberdaya alam, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya derajat penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh masyarakat, semakin membaiknya interaksi sosial di masyarakat, serta terpeliharanya sumberdaya alam secara berkelanjutan baik yang terbarukan maupun tak terbarukan.

Sarana/fasilitas sekolah seperti kecukupan guru yang berkualitas, bangunan sekolah, laboratorium, kelengkapan administrasi pendidikan dan lain-lain perlu dipenuhi secara bertahap sehingga mendekati paling tidak kebutuhan minimal baik jumlah dan kualitasnya untuk menciptakan lulusan yang berkualitas. Dalam tahapan ini, angka Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara akan berhasil ditingkatkan menjadi >75 dengan kisaran 30 % berada pada IPM > 80, sebanyak 65 % berada pada 66-80 dan sebanyak 5% berada pada kisaran 55-66.

Beberapa kebijakan penting lain yang perlu menjadi prioritas pembangunan dalam tahap ini ialah pengembangan infrastruktur ekonomi pusat-pusat pertumbuhan wilayah (Kawasan Pantai Timur, Kawasan Dataran Tinggi, Kawasan Pantai Barat, Kawasan Pantai dan kawasan unggulan lainnya) yang meliputi jaringan jalan (jalan lingkar luar Danau Toba, jalan Rawa Saring, jalan menyusur Pantai Timur), Penyelesaian pembangunan Bandara Kuala Namu, Pengembangan Pelabuhan Laut, sumberdaya air bersih, dan pemanfaatan potensi sumber tenaga listrik secara maksimal. Juga perlu ditumbuhkan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam peningkatan produktivitas masyarakat khususnya tenaga kerja pada usia produktif baik melalui pendidikan, maupun pelatihan dan permagangan dengan metode yang kontemporer (non-tradisional).

Pengadaan perumahan dan perbaikan lingkungan pemukiman dalam tata ruang wilayah yang serasi dan asri akan semakin ditingkatkan sehingga kebutuhan rumah yang sehat semakin terpenuhi tidak hanya dilingkungan perkotaan tetapi juga di pedesaan. Demikian juga tersedianya pasokan air baik air minum/bersih maupun air irigasi harus terjamin pemenuhannya.

Karena ketersediaan energi sangat strategis dan telah terbukti sebagai salah satu penghambat utama dalam meningkatkan investasi dan produksi nasional maka dalam

tahap ini, masalah-masalah berkaitan dengan kelangkaan pasokan energi hendaknya sudah dapat diatasi secara baik. Untuk mencapai keadaan tersebut, sumber-sumber energi yang tersedia di daerah ini baik tenaga air termasuk mikrohidro maupun panas bumi, tenaga surya dan biomas perlu dimanfaatkan secara maksimal dan hasil-hasilnya dapat diakses oleh masyarakat tidak hanya masyarakat kota tetapi juga masyarakat desa dengan proporsi yang semakin besar.

Dalam rencana pembangunan sektor pertanian perlu adanya dukungan di dalam sarana dan prasarana seperti pembangunan dan perbaikan irigasi, pengadaan bibit unggul (menciptakan varietas baru) serta perkembangan teknologi di bidang pertanian. Untuk mendukung pembangunan sektor pertanian perlu peningkatan pertumbuhan produksi, luas areal perkebunan, peningkatan populasi ternak serta peningkatan ekspor di bidang pertanian.

Masalah dan tantangan yang akan dihadapi di bidang kesehatan yaitu masih relatif rendahnya derajat kesehatan masyarakat, untuk masa yang akan datang peningkatan derajat kesehatan masyarakat di arahkan kepada kebijakan peningkatan pemerataan dan akses seluruh masyarakat/penduduk terhadap pelayanan kesehatan dasar. Disamping itu harus tetap mengantisipasi terhadap rencana penanggulangan dampak bencana alam.

4.2.3 RPJM-D ke-3 (2014-2018)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan dari RPJM-D ke -2, maka RPJM-D ke-3 ditujukan kepada pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia Sumatera Utara yang berkualitas yang berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat.

Sejalan dengan tercipta dan terpeliharanya rasa aman, damai dan tumbuhnya demokratisme masyarakat yang ditandai dari semakin mantapnya pertumbuhan nilai-nilai demokrasi ditengah-tengah masyarakat serta tumbuhnya sumberdaya manusia yang berkualitas sebagai produk dari RPJP-D ke-1 dan RPJP-D ke-2, maka Sumatera Utara akan sudah berada pada posisi yang cukup baik untuk menumbuhkan dan memacu daya saing melalui transformasi daya saing komparatif berbasis sumberdaya alam menjadi daya saing kompetitif berbasis sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.

Untuk itu, pemantapan struktur ekonomi dan keseimbangan persebaran pertumbuhan sektor-sektor melalui peningkatan keterpaduan sektor industri manufaktur (sektor

sekunder) dengan sektor pertanian, kelautan dan sumberdaya alam lainnya (sektor primer) dan sektor jasa-jasa yaitu keuangan, perdagangan, dan transportasi (sektor tertier) yang didukung oleh ketersediaan sumberdaya alam yang berkelanjutan akan menciptakan daya saing yang tangguh bagi Sumatera Utara. Ketersediaan infrastruktur yang mantap sesuai dengan rencana tata ruang yang meliputi mantapnya jaringan jalan terutama kearah kantong-kantong produksi dan daerah pemasaran, terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal (tersedia sepanjang hari) dan efisien (tarif yang realistik) baik untuk kebutuhan industri /sektor bisnis maupun rumah tangga, tersedia pasokan air baik air minum/bersih maupun air irigasi merupakan kondisi penting lainnya yang harus dijamin pemenuhannya melalui pembangunan tahap ketiga ini.

Pembudayaan penggunaan teknologi informasi baik dalam pemerintahan maupun di dunia pendidikan, organisasi bisnis dan lain-lain diharapkan telah tumbuh dengan baik. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah perlu memotivasi dan memberikan dukungan kepada lembaga-lembaga yang membangun infrastruktur teknologi untuk meningkatkan kemampuan aksesnya terhadap informasi. Disamping itu harus tetap mengantisipasi terhadap rencana penanggulangan dampak bencana alam.

4.2.4 RPJM-D ke-4 (2019-2023)

Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJM-D ke-3, maka RPJM-D ke-4 ditujukan kepada perwujudan masyarakat Sumatera Utara yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi, semakin makmur, berkeadilan dan maju melalui percepatan pembangunan semua bidang telah berhasil ditumbuhkan dalam RPJM-D ke-3 dengan fokus pemantapan struktur ekonomi kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan sumberdaya alam yang lestari. Diperkirakan pada akhir periode RPJM-D ke-4, Sumatera Utara akan sudah memiliki struktur ekonomi tangguh dengan kontribusi sektor sekunder (industri) sebesar 45 %, sektor primer sebesar 20 %, sektor tertier dan sektor lainnya sebesar 15 %.

Dalam tahap ini semua hasil-hasil pembangunan yang telah berhasil ditumbuhkan dan dikembangkan dalam ketiga tahap sebelumnya kemudian dimantapkan dan diperkokoh untuk menghindarkan terjadinya arus balik apabila terjadi perubahan lingkungan eksternal yang tak terduga dan tak diharapkan. Kesejahteraan masyarakat harus mampu menunjukkan ukuran-ukuran nyata seperti tersedianya lapangan kerja yang berkualitas (menantang dan berdaya saing), meningkatnya derajat konsumsi akibat peningkatan pemekerjaan dan pendapatan, meningkatnya derajat pendidikan akibat tersedianya sarana pendidikan formal dan non-formal yang berkualitas didukung oleh *e-educatian system* yang semakin luas, tercukupinya pasokan listrik, air, bahan pangan bermutu dan

bergizi secara merata, mantapnya sistem pengelolaan kesehatan, sistem jaminan sosial dan lain-lain. Hal-hal yang masih dinilai lemah perlu diperbaiki, ditumbuhkan dan dimantapkan dalam tahap ini termasuk peningkatan volume dan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, pembangunan transportasi laut dan udara, sumberdaya air termasuk pembangunan irigasi dan penyediaan air bersih/minum, tenaga listrik yang mampu mengikuti pertumbuhan kebutuhan dalam menunjang pembangunan ekonomi dan wilayah secara berkelanjutan.

Lembaga-lembaga dan pranata ekonomi juga lebih dimantapkan, demikian juga lembaga dan sistem pengendalian lingkungan, lembaga dan sistem ketahanan sosial yang mampu menjamin tumbuh dan berkembangnya rasa persatuan dan kesatuan dalam keberagaman suku, etnis, agama, daerah, lapangan pekerjaan dan profesi, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu harus tetap mengantisipasi terhadap rencana penanggulangan dampak bencana alam.

Tahap Berikutnya Tahun 2024-2025

Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, disamping RPJPD ini digunakan Pedoman Perencanaan juga Gubernur terpilih periode 2018-2023 akan menyusun Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang berikutnya untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan dalam mencapai tujuan dan cita-cita negara dalam wadah NKRI.

BAB V PENUTUP

Seperti telah dijelaskan pada bagian awal, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sumatera Utara ini mempunyai cakupan waktu 20 tahun yaitu dalam periode 2005-2025. Muatan pokok terdiri dari visi dan misi pembangunan 20 tahun kedepan, tujuan jangka panjang dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Karena cakupannya cukup panjang maka uraian dan analisisnya sangat deskriptif /kualitatif.

Karena maksud penyusunan RPJPD ini adalah untuk digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi penyusunan RPJM kabupaten / kota dan RPJM Provinsi Sumatera Utara maka dengan tersedianya RPJPD Provinsi ini seyogianya rencana pembangunan jangka menengah daerah-daerah otonom kabupaten dan kota akan semakin mudah diintegrasikan demi sinkronisasi dan efisiensi pembangunan Sumatera Utara secara keseluruhan.

Keberhasilan Provinsi Sumatera Utara untuk mewujudkan visinya ***masyarakat Sumatera Utara yang beriman, maju, mandiri, mapan dan berkeadilan dalam kebhinekaan yang didukung oleh tata pemerintahan yang baik*** sudah tentu hanya dapat dicapai apabila semua pemangku kepentingan pembangunan memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan seluruh arah dan strategi pembangunan yang telah digariskan.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

SYAMSUL ARIFIN